



Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan (ilmiah) adalah suatu keniscayaan. Sepanjang ilmu merupakan hasil akal budi manusia, maka ia tidak “kebal” atas perubahan menuju bentuk kebenaran baru. Ilmu pengetahuan berkembang dalam arus kontestasi pengetahuan berdasarkan dinamika sosial politik yang terus berkembang. Kristalisasi kontestasi ilmu pengetahuan mengarah pada suatu tradisi dan paradigma yang “ketat” dalam lingkup *ontology*, *epistemology*, dan *axiology*. Berdasarkan perdebatan filosofis inilah kemudian diskursus ilmu pengetahuan “terbelah” dalam kategori Teori Tradisional versus Teori Kritis.

Teori Kritis mengecam Teori Tradisional yang hanya bekerja dalam menjelaskan (*erklaren*) realitas sosial apa adanya, ataupun sekadar membuka tabir makna (*verstehen*) atas realitas sosial itu, tanpa adanya upaya melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Teori Kritis berupaya menciptakan pencerahan, pembebasan (*emansipasi*) atas “mitos baru” yang dialami oleh manusia modern. Bagi Teori Kritis, ilmu pengetahuan diciptakan untuk membebaskan manusia dari segala belenggu dominasi. Implikasi aksiologis dari pemikiran Teori Kritis menggeser ideologi ilmu yang sekian lama membentuk mindset ilmuwan bahwa sosiologi sebagai ilmu yang bebas nilai (*value free*) ke arah ilmu yang bersifat emansipatoris.

Uraian komprehensif terkait misi tersebut dijelaskan dalam buku ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, kehadiran buku ini di tangan pembaca diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengantar pemahaman sosiologi kritik. Buku ini dipandang penting menjadi bacaan bagi mahasiswa ilmu sosial (terutama sosiologi), akademisi, dan praktisi sosial.



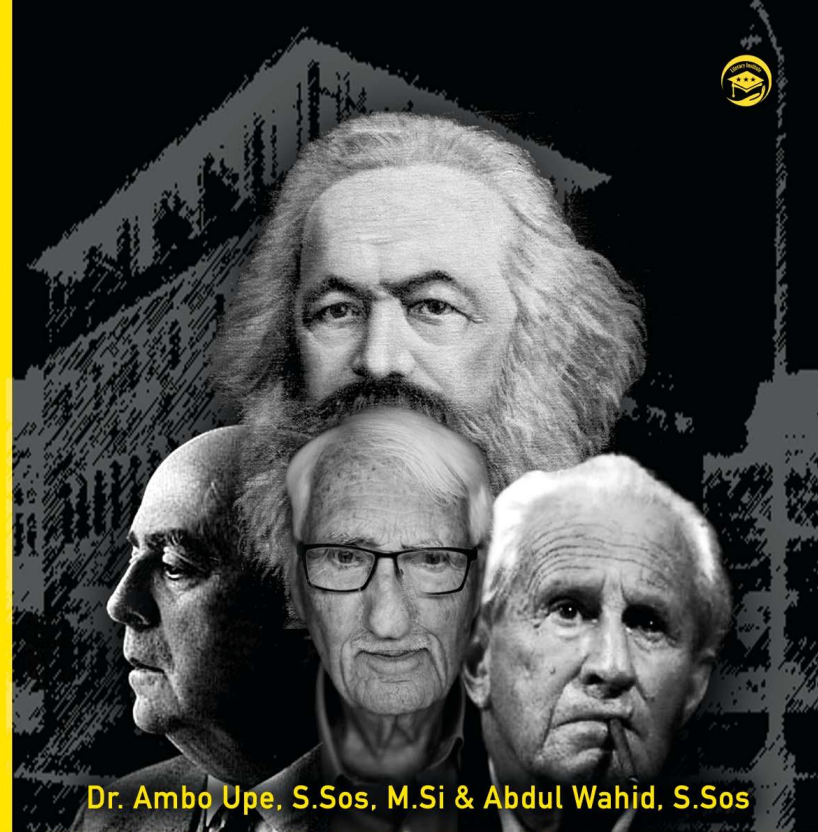
Literacy Institute
© Jl. Wanggu, Kendari 93231
✉ literacyinstitute@yahoo.com
www.literacyinstitute.org
© 0852-9979-3323

ISBN 978-602-5722-34-1



Dr. Ambo Upe, S.Sos, M.Si & Abdul Wahid, S.Sos

PARADIGMA TEORI KRITIS



Dr. Ambo Upe, S.Sos, M.Si & Abdul Wahid, S.Sos

PARADIGMA TEORI KRITIS

SUATU PENGANTAR UNTUK MEMAHAMI SOSIOLOGI KRITIK



PARADIGMA TEORI KRITIS

Dr. Ambo Upe, S.Sos, M.Si.
Abdul Wahid, S.Sos.

PARADIGMA TEORI KRITIS

Suatu Pengantar Untuk Memahami Sosiologi Kritik



Literacy Institute, 2019

PARADIGMA TEORI KRITIS

Suatu Pengantar Untuk Memahami Sosiologi Kritis

Penulis

Dr. Ambo Upe, S.Sos, M.Si.
Abdul Wahid, S.Sos

ISBN: 978-602-5722-14-1

viii + 146 hlm.; 15,5 x 23 cm

Editor

Aryuni Salpiana Jabar, SP. M.Si.

Desain Sampul

Rio Kurniawan

Tata Letak

Agung Dermawansa

Penerbit

Literacy Institute

Bumi Wanggu Permai II Blok D/12
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323
Email: literacyinstitute@yahoo.com
Website: www.literacyinstitute.org

Cetakan Pertama: Mei, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari
penerbit.

Kata Pengantar

Selaku hamba yang bertauhid begitu sadar bahwa segala nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena Berkah, Karunia, dan Ridho Allah SWT. Terbitnya buku ini merupakan salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat tak terhingga yang dilimpahkan oleh Allah kepada penulis. Karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi seraya berharap semoga karya sederhana ini dapat bernilai ibadah dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu kemanusiaan.

Disadari dengan sepenuhnya bahwa materi yang disajikan dalam buku ini bukanlah hal baru, melainkan semua tabir telah terurai secara komprehensif dalam Qalam Allah, khususnya terkait tema-tema tentang perubahan, pencerahan, pembebasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perintah menebar kebaikan. Selain itu, referensi tentang Teori Kritik pun telah banyak dipublikasikan, baik dalam literatur berbahasa asing, terjemahan, maupun yang ditulis langsung oleh orang Indonesia. Meski demikian tidak berarti bahwa perhatian terhadap Teori Kritis telah sampai pada titik klimaks, melainkan perlu terus dikembangkan dalam berbagai lini kehidupan.

Sebagai komitmen akademik penulis dalam mengkaji dan berupaya mengembangkan Teori Kritis, maka dibentuklah kelompok Diskusi Mingguan yang mengupas pemikiran-pemikiran tokoh kritis. Ketika itu, Dr. Ambo Upe, S.Sos, M.Si selaku pengampu mata kuliah Teori Sosiologi Kritik “menangkap” kesan dari mahasiswa akan keterbatasan materi kuliah ini, mulai dari keterbatasan literatur hingga kesulitan memahami alur pikir Teori Kritis. Menyikapi kondisi tersebut, maka bersama Abdul Wahid, S.Sos yang ketika itu masih mahasiswa menyelenggarakan diskusi tambahan di luar jam kuliah, dan dari sanalah sesungguhnya buku ini diracik.

Untuk memudahkan pembaca (pemula) dalam memahami diskusi Teori Kritik, maka dalam buku ini diawali dengan merefleksikan pe-

mikiran filsuf mulai dari masa Klasik hingga Modern. Hal ini dimaksudkan untuk membuka kembali lembaran sejarah peletak dasar ilmu pengetahuan. Dari uraian tersebut ditegaskan bahwa suatu kebenaran ilmu akan terus mengalami dinamika atau perkembangan menuju suatu bentuk kebenaran baru. Sifat dari kebenaran baru tersebut boleh jadi menggantikan secara totalitas kebenaran sebelumnya, ataupun sifatnya melengkapi kebenaran sebelumnya, begitu seterusnya. Demikian ilmu pengetahuan berkembang dalam arus kontestasi pengetahuan berdasarkan dinamika sosial politik yang terus berkembang.

Selanjutnya semarak ilmu pengetahuan mengarah pada suatu tradisi dan paradigma yang “ketat” dalam lingkup *ontology*, *epistemology*, dan *axiology*-nya. Berangkat dari perdebatan filosofis inilah kemudian diskursus ilmu pengetahuan “terbelah” dalam kategori Teori Tradisional versus Teori Kritis. Teori Tradisional bekerja dalam menjelaskan (*erklaren*) realitas sosial apa adanya, ataupun sekadar membuka tabir makna (*verstehen*) atas realitas sosial itu, tanpa adanya upaya melakukan perubahan ke arah keadaan kehidupan yang lebih baik. Teori Tradisional telah menjadi ideologi terhadap semua lini ilmu pengetahuan, dan memisahkan diri (teorinya) dengan kehidupan praksis. Inilah yang menjadi kritikan tajam dari kalangan Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang berupaya menciptakan pencerahan, pembebasan (emansipasi) atas “mitos” yang dialami oleh manusia modern.

Bagi Teori Kritis, ilmu pengetahuan diciptakan untuk membebaskan manusia dari segala belenggu dominasi. Teori Kritis Mazhab Frankfurt menginginkan sebuah paradigma baru dalam ilmu pengetahuan sosial yang mampu membebaskan manusia yang tertindas. Ilmu pengetahuan tidak boleh netral terhadap segala permasalahan sosial yang dialami masyarakat kontemporer saat ini, melainkan ilmu pengetahuan sosial harus bersifat praksis. Karena itu, bagi Teori Kritis ilmu pengetahuan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan dalam kehidupan praksis.

Mazhab Frankfurt dengan paradigma hermeneutika dialektis atau hermeneutika kritis memberikan peluang kepada ilmuwan selanjutnya

untuk terus mengeksploitasi pengetahuan sosial kemasyarakatan yang bersifat lebih hidup dibandingkan paradigma yang berbau positivistik. Dengan wilayah pemikiran itu, sangat menarik untuk dikaji dan dieksplorasi, memungkinkan akan lahirnya pengetahuan yang baru dalam kajian ilmu sosial kemanusiaan kedepannya.

Implikasi aksiologis dari pemikiran Teori Kritis Mazhab Frankfurt adalah menggeser ideologi ilmu yang sekian lama membentuk *mindset* ilmuwan bahwa sosiologi sebagai ilmu yang bebas nilai (*value free*) ke arah ilmu yang bersifat emansipatoris. Uraian komprehensif terkait misi tersebut dijelaskan dalam buku ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, kehadiran buku ini di tangan pembaca diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengantar pemahaman sosiologi kritik. Buku ini dipandang penting menjadi bacaan bagi mahasiswa ilmu sosial (terutama sosiologi), akademisi, dan praktisi sosial.

Kendari, Mei 2019

Penulis

Daftar Isi

Bagian Pertama

Refleksi Pemikiran Filsafat Ilmu Sosial

Bab 1 Filsafat Klasik Hingga Modern	2
A. Pengantar	2
B. Filsafat Klasik	2
C. Filsafat Abad Pertengahan	6
D. Filsafat Modern	8
E. Setting Filsafat Alam ke dalam Filsafat Ilmu Sosial	14
Bab 2 Tradisi Filosofis Ilmu Sosial	20
A. Pengantar	20
B. Filosofi Ilmu Sosial Positivistik	20
C. Filosofi Ilmu Sosial Fenomenologis	29
D. Filosofi Ilmu Sosial Emansipatoris	35

Bagian Kedua

Refleksi Paradigma Sosiologi

Bab 3 Kompleksitas Paradigma Sosiologi	40
A. Pengantar	40
B. Paradigma Fakta Sosial	42
C. Paradigma Definisi Sosial	48
D. Paradigma Perilaku Sosial	54

Bagian Ketiga

Cikal Bakal Sosiologi Kritis

Bab 4 Filosofi Teori Kritis Mazhab Frankfurt	62
A. Pengantar	62
B. Refleksi Historis Teori Kritis Mazhab Frankfurt	64
C. Refleksi Filosofis Teori Kritis Mazhab Frankfurt	73

Bab 5 Lintas Generasi Teori Kritik Mazhab Frankfurt	91
A. Pengantar	91
B. Generasi Pertama	91
C. Generasi Kedua	109
D. Generasi Ketiga	125
Bab 6 Penutup	134
A. Implikasi Teori dan Praksis	134
B. Implikasi Metodologis	138
Daftar Pustaka	140
Indeks	143
Tentang Penulis	144

Bagian Pertama

Refleksi Pemikiran Filsafat Ilmu Sosial

Bab 1

Filsafat Klasik Hingga Modern

A. Pengantar

Secara historis, ilmu pengetahuan terus mengalami dinamika seiring dengan arus spirit zaman, dan setiap masa dalam ilmu pengetahuan senantiasa diwarnai oleh para pemikir dalam konteks sosial politik yang melingkupinya. Jika dirunut konteks perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini, maka tidak dapat terlepas dari peradaban pemikiran Yunani. Karena itu, untuk memahami filsafat ilmu sosial sangat penting dilakukan refleksi pemikiran dari masa filsafat klasik atau yang dikenal dengan istilah masa Yunani Kuno, filsafat Abad Pertengahan, hingga filsafat modern. Uraian dinamika pemikiran dari masa ke masa tidak disebutkan secara tegas dalam buku ini, mengingat banyak pandangan yang beragam terkait waktu (tahun dan bulan) dari masing-masing periode pemikiran tersebut, baik di kalangan sejarawan maupun dari beberapa referensi buku filsafat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van der Meulen bahwa senantiasa banyak fase dari suatu zaman atau peristiwa yang belum terang, sehingga pengetahuan sejarah selalu merupakan lubang-lubang dan tak lengkap, lagi pula ada godaan untuk menyatakan suatu hal dengan pasti melebihi fakta-fakta yang ada (Supraja, 2017). Pada bab ini juga diuraikan setting filsafat alam ke dalam filsafat ilmu sosial yang dimaksudkan untuk menemukan kontribusi ilmu alam dalam ilmu sosial. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran ketiga masa tersebut diuraikan sebagai berikut.

B. Filsafat Klasik

Sejarah filsafat klasik dimulai sekitar Abad VI sebelum masehi, dimana ketika itu muncul para filsuf yang memulai menentang mitos yang dipercaya dan berkembang dalam masyarakat. Para filsuf ketika itu mulai menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa manusia mempunyai

daya pikir yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Sebelum munculnya pemikir di masa itu, masyarakat pada masih dibelenggu oleh mitos, sehingga ketika menghadapi persoalan dalam kehidupannya, maka jawaban selalu bersumber pada mitos. Dengan kata lain, munculnya filsuf Yunani Kuno mendobrak mitos ke arah penggunaan *logos* dalam usaha menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang dihadapi dalam kehidupan.

Sejak masa Yunani Kuno, ilmu pengetahuan telah mengalami perdebatan seputar hakikat alam semesta (*macro cosmos*). Para filosof alam kenamaan diantaranya Thales, Anaximandros, Anaximenes, Herakleitos, dan Parmenides. Dikatakan demikian karena mereka memiliki *concern* pemikiran pada masalah asal usul, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Oleh karena itu, kosmologi atau filsafat alam merupakan bidang filsafat tertua. Perdebatan pemikiran yang pertama kali muncul adalah mengenai “*arche*” yang dalam bahasa Yunani berarti mula atau asal, dari alam semesta. Sebagaimana Thales mengatakan bahwa segala yang terjadi (*causa prima*) di alam ini berasal dari air, dan segalanya akan kembali kepada air. Ia menyampaikan gagasannya bahwa semua yang ada dan hidup dalam alam semesta ini memerlukan makan yang di dalamnya mengandung asas kebasahan (air), sehingga tanpa air semua yang ada dalam alam akan musnah. Dengan demikian, air merupakan unsur yang paling hakiki bagi alam.

Kemudian, Anaximandros membantah argumen dari Thales. Menurutnya, bukanlah air dari segala sesuatu, melainkan segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari sesuatu yang tak terhingga, tak terbatas, dan tak berkeputusan yang disebutnya dengan istilah *Apeiron*. Atau dengan kata lain, *Apeiron* dimaknai sebagai suatu kesadaran bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah sesuatu yang gaib yang tidak berhingga dan tidak berkesudahan. Menurutnya bahwa karena asas pertama adalah asas yang menimbulkan segala sesuatu, maka asas tersebut haruslah merupakan hal yang lebih dalam dari pada unsur yang menyusun alam. Asas itu adalah sesuatu yang tidak terbatas dan tidak memiliki sifat-sifat benda yang dikenal manusia. Meski ia tidak menegaskan bahwa asas tersebut adalah

Tuhan, namun konsep dari asas tersebut memiliki kemiripan dengan konsep Tuhan yang dibawakan oleh agama-agama yang di kemudian hari bermunculan.

Pandangan lainnya tentang filsafat alam (*cosmology*) dikemukakan oleh Anaximenes murid dari Anaximandros bahwa asal dari alam adalah udara. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa udara itu terdapat di mana-mana, ia senantiasa bergerak, dan udara sebagai unsur kehidupan. Menurutnya bahwa semua yang ada dan hidup dalam alam membutuhkan udara sehingga tanpa udara semua yang ada dalam alam akan musnah. Dengan demikian, unsur yang paling fundamental dari alam adalah udara. Lain halnya dengan Herakleitos, bahwa asal usul dari segala sesuatu berasal dari api. Menurutnya, api merupakan lambang dari perubahan yang terjadi di alam ini, dimana nyala api selalu membakar materi dan akan berubah menjadi asap dan debu. Hal ini menegaskan bahwa Herakleitos memiliki ketertarikan pada aspek perubahan yang terjadi dalam alam. “*There is nothing permanent except change*” merupakan salah satu ungkapan Herakleitos yang sangat populer. Kontras dengan Herakleitos, Parmenides berpadangan bahwa realitas dalam alam ini hanya satu, tidak bergerak, dan tidak berubah.

Setelah perdebatan pemikiran-pemikiran pada awal masa Yunani Kuno yang objeknya masih terbatas pada alam dan realitas seutuhnya, maka pada puncak pemikiran masa Yunani Kuno objek pemikiran dan bahasan sudah mulai meluas. Kalau semula objek pemikiran filosofis hanya pada alam, kemudian objek pemikiran para filsuf mulai meluas ke masalah manusia, dengan segala perilaku dan pikirannya, serta masyarakat. Pada puncak kejayaan pemikiran Yunani Kuno akan terepresentasikan oleh pemikiran tiga filsuf besarnya, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates memusatkan perhatiannya kepada manusia sebagai domain ontologisnya (berbeda dengan filosof pra-Socrates yang terfokus pada domain kosmologi). Pemikiran filsafat Socrates selalu berusaha untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yakni dengan cara menghargai nilai-nilai jasmaniah dan ruhaniah. Ia berpandangan bahwa kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan (Poejawijatna, I.R., 1994;

Surajiyo, 2005). “Kenalilah dirimi sendiri” merupakan pepatah Socrates yang populer sebagai bentuk penegasan atas fokus kajiannya terhadap diri manusia. Kontribusi Socrates dalam ilmu pengetahuan tercermin dalam metode dialektika yang digunakannya. Dialektika di sini dimaknai sebagai dialog antara dua pendirian yang bertentangan, atau sebagai perkembangan pemikiran dengan cara mempertemukan berbagai ide.

Masa keemasan Yunani selanjutnya dilanjutkan oleh Plato, murid dari Socrates. Plato dikenal dengan filsafat idealismenya, yaitu suatu pandangan bahwa dunia yang sesungguhnya adalah dunia ide. Ia menguraikan dunia ide dalam beberapa tingkatan, yakni: ide kebaikan, ide jiwa dunia, dan ide keindahan (Maksum, 2016). Plato menegaskan bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya diri segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal melalui pancaindra. Dalam konteks ini, Plato membagi realitas menjadi dua, yakni dunia ide dan dunia nyata. Pandangan demikian ini menunjukkan upaya mempertemukan atau sebagai jalan tengah antara filsafat *menjadi* (Herakleitos, “segalanya berubah”) dan filsafat *ada* (Parmenides, “segalanya tetap”).

Lain halnya dengan pemikiran Aristoteles, murid Plato yang mendasari filsafatnya pada metode empiris, konkret, material. Aristoteles menegaskan bahwa “ada” yang bersifat umum dan tetap terdapat di dalam benda-benda konkret empirik. Di sini, Aristoteles menampilkan teori *hylemorfisme*. *Hylemorfisme* secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *hyle* yang berarti materi, dan *morphe* yang berarti bentuk. *Hyle* dan *morphe* merupakan kesatuan pada benda konkret, sehingga tidak ada *hyle* tanpa *morphe*, begitu pula sebaliknya. Berkat *hyle*-lah sesuatu itu mempunyai identitas, sedangkan berkat *morphe*-lah mempunyai inti yang merupakan kesatuan dari keragaman sesuatu dan dapat dipahami oleh akal budi manusia. Dari konsep tersebut, Aristoteles menegaskan bahwa setiap benda jasmani mempunyai bentuk dan materi yang bukan hanya dapat terlihat, melainkan bentuk dan materi sebagai prinsip-prinsip metafisik. Materi adalah prinsip yang sama sekali tidak ditentukan atau terbuka. Materi adalah kemungkinan belaka untuk menerima suatu bentuk. Bentuk adalah prinsip yang menentukan jenis benda yang menjadikan benda

konkret itu disebut demikian, misalnya mobil, rumah, dan lain sebagainya.

C. Filsafat Abad Pertengahan

Perkembangan filsafat selanjutnya memasuki Abad Pertengahan dimana pemikiran filsuf di abad ini mempunyai corak yang berbeda dibandingkan pemikiran filsuf pada masa Yunani Kuno. Pada masa Yunani Kuno para filsuf berpikir dan mengekspresikan pikirannya dengan bebas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan mencari kebenaran. Sementara pada masa Abad Pertengahan pikiran dan hasil pemikiran para filsuf dibatasi oleh dogma atau agama. Pada era ini, wajah filsafat mengalami perubahan drastis karena segala bentuk ilmu pengetahuan harus didasarkan pada kekuasaan gereja, sehingga filsuf tidak diberi kebebasan dalam mengembangkan potensi berpikirnya. Segala bentuk pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja akan mendapat hukuman berat. Karena itu, pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan sangat terhambat.

Pada Abad Pertengahan, seluruh pengetahuan manusia tidak akan diterima sebelum melapor dengan agamawan yakni gereja itu sendiri. Ini menandakan otoritas kebenaran pengetahuan berpegang pada otoritas Gereja. Pemikiran Abad Pertengahan berorientasi seluruhnya kepada dogmatisme Gereja tidak dapat dilepaskan karena adanya pengaruh sistem sosial politik pada waktu itu, yaitu berlakunya sistem pemerintahan teokratis. Sesuai dengan sistem sosial politik yang berlaku pada waktu itu semua pemikiran dan hasil karya para filsuf, bahkan juga seniman dan ilmuwan dibatasi dan dibelenggu oleh kebenaran agama. Artinya bahwa semua karya filsuf, seniman, dan ilmuwan boleh dipublikasikan jika sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan diharapkan dapat memperkuat atau melegitimasi kebenaran ajaran agama. Karena itu, pada masa Abad Pertengahan dikenal semboyan "*ancilla theologia*" yang berarti semua menjadi abdi agama. Semua produk kebudayaan manusia (filsafat, seni, dan ilmu) harus mengabdikan pada agama.

Filsafat Barat abad pertengahan dapat dikatakan sebagai abad gelap (*the Dark Age*). Dikatakan demikian karena pada masa itu manusia tidak

lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para filsuf ketika itu tidak memiliki kebebasan berpikir, terlebih lagi terhadap pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama dan Gereja. Siapapun yang mengemukakan pandangan yang bertentangan, maka akan mendapat hukuman berat. Pihak Gereja melarang diadakannya penyelidikan-penyelidikan rasio terhadap agama. Karena itu kajian terhadap agama (teologi) yang tidak berdasarkan pada ketentuan gereja akan mendapat larangan yang keras. Meski demikian, tetap saja ada yang melanggar peraturan tersebut dan mereka dianggap orang murtad dan kemudian diadakan pengejaran (Maksum, 2016).

Salah satu contoh kasus “kerasnya” sistem teokratis ketika itu, misalnya kasus Galileo Galilei yang menemukan hukum-hukum alam proses penciptaan bumi dan berlandaskan pada argumen bumi itu bulat. Hal ini, bertentangan dengan ajaran gereja dan Galileo mendapatkan hukuman mati oleh pihak Gereja. Peristiwa ini, mencerminkan semangat berpikir para filsuf untuk tidak lagi menandakan pengetahuan pada otoritas Gereja. Para cendekiawan mau mengemansipasi dirinya pada pemegang kebenaran yakni Gereja itu sendiri. Pada Abad Pertengahan Tuhan menjadi sentrum dari segala bentuk otoritas penciptaan dan kekuasaan. Bagi Abad Pertengahan sejarah bukanlah rentetan alamiah, melainkan terdiri dari rentetan kejadian yang diatur oleh adanya campur tangan dan wahyu Tuhan. Dengan bahasa singkatnya sejarah manusia dituntut oleh penyelenggara Ilahi.

Filsafat Abad Pertengahan pada dasarnya berisikan penyatuan filsafat dan teologi karena filsafat mendasarkan diri pada ajaran Kristen, di mana pemikiran rasional dijadikan landasan demi meneguhkan iman. Demikianlah, salah satu tema utama filsafat Abad Pertengahan adalah pertanyaan tentang hubungan antara iman dan ilmu serta usaha dalam rangka mengatasi perbedaan yang tampaknya tidak dapat didamaikan antara kebenaran wahyu dan perenungan filsafat. Di antara isu-isu penting filsafat Abad Pertengahan yaitu masalah universalialia, khususnya terkait dengan berbagai istilah (*term*) apakah mempunyai realitas atau sekadar konstruksi pemikiran belaka. Tradisi pemikiran skolastikisme inilah men-

jadi cikal bakal atau peletak dasar pendirian universitas yang berkembang pesat menjadi pusat kehidupan intelektual.

D. Filsafat Modern

Selanjutnya perhatian besar akan ilmu pengetahuan kembali bergelora di zaman modern. Para filosof zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisis filsafat, dan karena itu karakteristik filsafat zaman ini biasa juga disebut antroposentrisme. Pada fase ini menunjukkan gaya pemikiran yang berbeda dengan filsafat Abad Pertengahan terutama pada otoritas kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada zaman pertengahan otoritas kekuasaan mutlak dipegang oleh Gereja dengan dogma-dogmanya, sedangkan pada zaman modern, otoritas kekuasaan terletak pada kemampuan akal manusia itu sendiri. Manusia pada zaman modern tidak ingin terbelenggu oleh kekuasaan manapun, kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri yaitu akal. Pada zaman ini filsafat dipengaruhi oleh gerakan *Renaissance* dan *Aufklarung*.

Secara historis, masa *Renaissance* dikenal sebagai masa transisi yang mengakhiri masa Abad Pertengahan dan mengawali masa modern. Sebagai masa peralihan, tentu saja *Renaissance* mengandung unsur-unsur Abad Pertengahan dan Modern, yakni dari kebudayaan kuno maupun kebudayaan baru, meliputi unsur-unsur keagamaan dan *profan*, otoriter dan individualistis. Artinya bahwa *Renaissance* bukanlah pembaruan yang mendadak di segala bidang yang berlangsung secara tiba-tiba, melainkan suatu peralihan yang berangsur-angsur. *Renaissance* adalah masa dimana para filsuf “mengekspresikan” ketidakpuasannya terhadap otoritas keagamaan yang memegang kendali secara penuh dalam berbagai aspek, baik dalam ilmu pengetahuan, filsafat, maupun kebijakan.

Renaissance mengandung pengertian dasar sebagai kelahiran kembali dalam konteks inspirasi kesusastraan, seni, dan filsafat. *Renaissance* juga mengandung makna sebagai gerakan yang ingin melahirkan kembali kebudayaan Yunani Klasik yang selama Abad Pertengahan dianggap “mati”. *Renaissance* merupakan sebagai gerakan kultural yang memberi

reaksi terhadap kebudayaan Abad Pertengahan yang dogmatis dan mengekang kebebasan berpikir manusia dalam mengembangkan pengetahuan dan mencari kebenaran. Gerakan *Renaissance* menghendaki lahirnya kembali manusia yang bebas dan ingin menempatkan kembali manusia pada posisi yang sentral dalam mengembangkan peradaban seperti zaman Yunani Kuno. Karena itu, gerakan *Renaissance* juga dikenal dengan istilah gerakan humanisme. Ide-ide humanisme menjadi tolok ukur penting bagi kalangan pemikir masa *Renaissance* dengan semboyan *sepere aude* (beranilah berpikir sendiri). Prinsip ini memosisikan manusia pada posisi setinggi-tingginya melebihi entitas-entitas lainnya di luar dari manusia itu sendiri. Para humanis adalah manusia yang memiliki kesadaran modern, yang tidak sepakat dengan otoritas dari para Imam Gereja dan kungkungan tradisi Abad Pertengahan. Kaum humanisme menitikberatkan pada kajian yang tidak terlepas dari, seni, filsafat, sastra, dan pengetahuan lainnya.

Misi *Renaissance* difokuskan pada tiga gerakan dimana diantara ketiga sasaran tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Pertama, liberasi yaitu gerakan yang menghendaki munculnya kembali manusia yang bebas yang tidak dibatasi dan dibelenggu lagi oleh dogma agama. Kedua, otonomi yaitu gerakan yang menghendaki kebebasan manusia yang bersifat otonom, terutama dalam merumuskan norma-normanya sendiri dalam bermasyarakat dan berkebudayaan. Manusia tidak boleh dibelenggu oleh suatu kekuasaan baik gereja atau negara atau suatu sistem, melainkan manusia haruslah hanya diikat dan ditentukan oleh dirinya sendiri. Ketiga, emansipasi yaitu gerakan yang menghendaki munculnya manusia yang bebas dan mandiri dalam mengembangkan pengetahuan dan mencari kebenaran, dengan tidak tergantung dan ditentukan oleh otoritas baik gereja maupun negara.

Terjadinya perubahan dari Abad Pertengahan (*the Middle Ages*) yang serba tiranis dari gereja menuju zaman yang serba humanis dengan sangat dalam dilukiskan oleh Kartodirdjo (2014) “lambat laun nilai-nilai kristiani Abad Pertengahan mulai kehilangan arti. Ide-ide tradisional Abad Pertengahan tidak lagi memberi kepuasan. Kepercayaan kepada Tuhan tak lagi memberi arah kepada pandangan hidup manusia. Bukanlah ketuhanan

melainkan kebahagiaan murni yang memegang peranan dalam kehidupan. Manusia baru zaman *Renaissance* sadar akan harga dirinya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang ada di atas manusia yang puas dengan dirinya sendiri. Sekulerisasi mendorong para cendekiawan dan para ilmuwan untuk menyibukkan dirinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu pasti (matematika), ilmu falak, ilmu pengetahuan alam dan lain-lain.

Salah satu peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran modern tergambar dalam perlawanan Marthin Luther terhadap pihak Gereja sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Menurutnya, setiap orang menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri; Jabatan Paus adalah penemuan manusia; Sumber keselamatan satu-satunya adalah keyakinan pribadi; Pendeta sebagai penengah tidaklah dibutuhkan karena setiap orang adalah pendeta bagi dirinya sendiri. Begitulah beberapa ajaran provokatif Luther sebagai biang penggerak spirit pemikiran modern. Selain itu, salah seorang warga (Prancis) Calvin juga mencoba menjebol basis ajaran agama Kristen Katolik. Ia mengajarkan bahwa manusia selamanya telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk masuk surga, selain itu negara tidak memiliki kekuasaan otonom, melainkan sekadar alat kehendak Tuhan. Ajaran Calvin, menempatkan organisasi gereja bersifat demokratis, dan umat manusia menjadi agen yang partisipasi.

Ajaran provokatif Luhter dan Calvin cukup signifikan berpengaruh terhadap kemerosotan kekuasaan Gereja. Gerakan perlawanan tersebut merupakan sebuah sikap atau pendirian kebencian terhadap para Gerejawan. Oleh karena kebencian yang sudah mendarah daging di kalangan pemikir di masa *Renaissance* terhadap sikap Gerejawan, maka manusia masa itu tidak lagi menempatkan Gereja sebagai sumber pengetahuan, melainkan mereka mencari tahu kejadian alam semesta ini dengan berani berpikir sendiri tanpa bimbingan dari pemegang otoritas ataupun tradisi. Akibatnya, para cendekiawan lebih sibuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sekuler: seperti, matematika, ilmu falak, dan ilmu eksakta. Masa ini ditandai dengan rasionalisme pada awal abad XVI dan XVII, ini menjadi dasar yang kuat bagi peradaban umumnya untuk terbang setinggi-

tingginya, lebih-lebih bagi ekspansi intelektual (Kartodirdjo, 2014). Dengan lahirnya metode ilmiah dalam kehidupan modern, maka secara tidak langsung para cendekiawan modern telah menjebol basis agama (Gerejawan) sebagai pemegang otoritas pengetahuan manusia. Dengan kata lain, basis Gereja tidak lagi menjadi pedoman untuk membicarakan sebuah realitas alam semesta pada khususnya. Akhirnya, melahirkan sebuah pengetahuan tentang alam dengan pendekatan metode ilmiah yang sering dikatakan sebagai saintisme. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan kesusastraan menyongsong masa keemasannya. Bergesernya jangkauan manusia kebudayaan manusia, dari visi teosentrisme bergerak menuju antroposentrisme merupakan penggerak kebudayaan modern. Kebudayaan manusia abad modern ditandai dengan pemikiran antroposentis, dimana manusia tidak lagi mengakui otoritas di luar dirinya (Tuhan). Manusia merupakan simbol sekaligus pusat bagi segalanya. Apa yang baik dan buruk ditentukan oleh ukuran manusia (Supraja, 2017).

Sukses gemilang *Renaissance* dalam perubahan cara berpikir manusia dari teosentrisme menuju antroposentrisme telah membawa perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan tanpa terkecuali ilmu alam. Selanjutnya disusul oleh zaman *Aufklarung* (pencerahan). Masa ini dikenal dengan istilah “berani berpikir sendiri”. Menempatkan akal (rasio) sebagai sumber ilmu pengetahuan murni tanpa adanya pengaruh oleh tradisi atau agama. Kosmologi zaman pencerahan (*Aufklarung*) adalah abad ke-18 yang ditandai dengan segala bentuk pendekatan didasarkan pada rasio dan ilmu pengetahuan terhadap agama, ekonomi, sosial, dan politik menjadi trend di masyarakat, sehingga ini menghasilkan pandangan yang bersifat duniawi dan sekuler dan juga membangun opini umum tentang kemajuan dan kesempurnaan di segala bidang. Pada masa pencerahan (*Aufklarung*) segala kebenaran ditempatkan pada rasio murni. Karena itu, sebuah kebebasan yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam. Menurut hukum alam, manusia itu bebas, tetapi oleh penguasa-penguasa yang absolut atau oleh dogma-dogma agama manusia itu diikat dengan peraturan-peraturan yang merugikan dalam bentuk pengekangan.

Ide pokok yang mendasari pembentukan cara berpikir masa pencerahan (*Aufklärung*) sesungguhnya merupakan produk interaksi dan dialog antar berbagai macam komponen sosial dan budaya yang hidup sepanjang Abad Pertengahan sampai *Renaissance*. Masa pencerahan (*Aufklärung*) ditandai dengan perkembangan di semua lini kehidupan manusia, diantaranya adalah perkembangan ekonomi dan tumbuhnya sistem kapital. Daerah koloni yang kaya menghasilkan produksi-produksi baru dan pada saat yang sama itulah merupakan pasar-pasar untuk hasil-hasil industri negara induk. Juga kekayaan budak makin bertambah penting dan menghasilkan kekayaan. Taraf hidup di dunia menjadi semakin tinggi, kekuasaan kapital juga membawa pengaruh kepada Negara. Pendek kata, abad ke-17 ini merupakan periode kemajuan yang pesat penuh dengan janji-janji untuk masa datang. Optimisme dan jiwa lapang mendapat kemenangan. Ini berkaitan dengan adanya kepercayaan akan kemajuan (Kartodirdjo, 2014).

Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan tanpa terkecuali ilmu alam, membawa kemajuan dalam perkembangan kepentingan teknis. Teknologi marak berkembang, pasar, perdagangan yang begitu membludak, akibatnya para kaum intelektual segera mengembangkan berbagai pandangannya tentang realitas duniawi (alam) dengan pemikiran akal. Dengan adanya kemajuan materi, moral agama digantikan dengan moral kepercayaan pada diri sendiri, orang mempunyai kebebasan waktu dan menjadi yakin bahwa dunia senantiasa terus bergerak maju. Kemajuan tidak hanya disebabkan oleh kemajuan di bidang material, akan tetapi juga karena timbulnya ilmu pengetahuan dan kecakapan manusia untuk memperoleh kekayaan materiil dari daerah sekitarnya.

Basis masa pencerahan berpangkal pada pelepasan segala tradisi dan agama Kristen terhadap kebudayaan Barat. Orang percaya bahwa tanpa pertolongan basis adikodrati, pikiran manusia dapat menyelami dunia dan segala gejala-gejalanya. Prinsip ini akan segera menguasai segala bidang kebudayaan: bidang ilmu pengetahuan, bidang etika, filsafat, religi, dan politik. Pada masa ini para filsuf berpandangan bahwa esensi agama tidak terdapat di dalam dogma sebagaimana diterima dari

wahyu dan diambilnya dari kepercayaan, dan yang serahkan menurut tradisi. Melainkan yang sebenarnya haruslah didasarkan atas asas-asas akal. Jadi, sebagai gantinya religi wahyu terdapat religi alam. Dengan menurutkan akal, kita tidak akan tergantung siapapun kecuali pada diri kita sendiri dan dengan begitu dalam arti tertentu kita juga menjadi seperti dewa-dewa. Akal akan membuat manusia mengerti alam dan dengan mengerti itu orang akan menyesuaikan hidup dan kelakuannya dengannya (Kartodirdjo, 2014).

Di masa pencerahan, para cendekiawan mencurahkan waktunya dalam mengkaji alam dengan menggunakan pengetahuannya dengan basis pendekatan yang berbeda. Pertama, kaum rasionalisme, diantaranya, Descartes (1596-1650) dengan semboyan *cogito ergo sum*, Spinoza (1632-1677), Leibniz (1646-1716), dan Pascal (1623-1662). Kedua, kaum empirisme, diantaranya: Thomas Hubbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753), dan David Hume (1711-1776). Sederetan nama tersebut membentuk dunia modern yang menempatkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum alam (Hardiman, 2011).

Abad ke-18, semua tataran dikedepankan pada akal sebagai alat berpikir logik. Akal telah “menjadi” Tuhan bagi semua orang. Jika akal menjadi sangat penting di era pencerahan, secara otomatis akal mampu membuat kalkulasi tentang alam semesta. Dengan kata lain, alam berjalan dengan tetap. Sebuah kalkulus dari akal manusia yang bersifat matematis. Artinya, segala sesuatu yang terjadi tidak secara alamiah. Manusia pencerahan, beranggapan bahwa segala kejadian di dunia baik struktur alam maupun struktur manusia sebagai sesuatu yang terorganisir. Di sinilah letak keunikan di era pencerahan, dimana ide manusia pencerahan sebagai manifestasi dari alam semesta. Dengan kata lain, sejarah pembentukan gagasan sampai pada pencerahan; muncul sebuah kesadaran manusia atas hukum-hukum alam (*nature law*) yang bersifat tetap. Layaknya sebuah hukum pada umumnya ia memiliki kaitan-kaitan yang tetap dan harus antara gejala-gejala. Kaitan-kaitan yang teratur di dalam alam sejak dahulu kala diinterpretasikan dalam pengertian hukum normatif (Supraja, 2017). Mula-mula timbul hukum alam sebagai ganti hukum normatif Tuhan.

Konsep hukum alam digunakan dalam studi mengenai dunia manusia, dengan suatu paendasaran bahwa di dunia manusia terdapat keajekan-keajekan yang dapat diterangkan atas dasar sifat alamiah manusia yang diperoleh melalui deduksi.

Singkatnya, gejala alam yang bersifat tetap dan terorganisir sebagai sikap normatif, sehingga manusia hanya dengan mengikuti atau meniru (*mimesis*) gejala alam itu, maka manusia menciptakan sebuah keteraturan dalam dunianya (kehidupan sosial). Hal ini dilakukan karena manusia benar-benar menginginkan sebuah analisa empiris terhadap gejala alam dan sosial. Hanya dengan manusia memisahkan subjektivitas dirinya terhadap gejala alam, maka diketemukan sebuah ilmu pengetahuan yang rasional objektif yang disebut dengan teori (Hardiman, 2009). Karena itu, pengetahuan empiris-analitis (ilmu alam) yang kemudian menjadi paendasaran ilmu-ilmu alam direfleksikan secara filosofis sebagai pengetahuan yang sah tentang kenyataan (kehidupan sosial).

Sinopsis periodisasi filosofis di atas menegaskan bahwa suatu kebenaran ilmu akan terus mengalami dinamika atau perkembangan menuju suatu bentuk kebenaran baru. Sifat dari kebenaran baru tersebut boleh jadi menggantikan secara totalitas kebenaran sebelumnya, ataupun sifatnya melengkapi kebenaran sebelumnya, begitu seterusnya. Demikian ilmu pengetahuan berkembang dalam arus kontestasi pengetahuan berdasarkan dinamika sosial politik yang terus berkembang.

E. Setting Filsafat Alam ke dalam Filsafat Ilmu Sosial

Dinamika pemikiran para filsuf sebagaimana uraian di atas menunjukkan adanya kejelasan kontestasi pengetahuan dari masa ke masa. Kontestasi tersebut berlangsung secara kontinuitas dalam domain *ontology*, *epistemology*, dan *axiology* yang pada gilirannya membentuk tradisi pemikiran dalam setiap episode ilmu pengetahuan. Sejak awal (masa Filsafat Klasik Yunani Kuno) perdebatan pemikiran sudah dimulai seputar alam semesta, sehingga pemikir di masa ini disebut sebagai filsafat alam. Selanjutnya di masa Abad Pertengahan, posisi ilmu pengetahuan mengalami stagnasi sebagai akibat dari otoritas Gereja. Kebebasan berpikir

barulah kemudian lahir kembali di era modern yang ditandai oleh gerakan *Renaissance* sebagai gerakan humanis, dimana pemikiran manusia mendapatkan posisi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Konsekuensi dari semua itu adalah proses sekularisasi ilmu pengetahuan yang mendorong pemikir-pemikir modern menciptakan hukum-hukum alam sebagai hasil dari pikiran manusia sendiri (antroposentrisme). Dengan demikian, ilmu pengetahuan alam dikembangkan sedemikian rupa dan penemuan-penemuan baru menunjukkan semangat berpikir manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Setting ini menjadi sebuah ke-niscayaan bagi ilmu pengetahuan sosial berkembang dengan sendirinya tanpa metodologi ilmu pengetahuan alam. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan alam menjadi cikal bakal muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan sosial. Segala metodologi ilmu alam digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial agar dapat dikategorikan sebagai saintifik. Singkatnya, gagasan metodologi ilmu pengetahuan alam yang lebih dulu berkembang di kalangan para cendekiawan harus digunakan secara universal dalam semua lini ilmu pengetahuan, tanpa terkecuali ilmu pengetahuan sosial.

Demikian pula pada zaman *Aufklarung*, ilmu pengetahuan alam tengah berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan berbagai macam penemuan yang didapatkan oleh para cendekiawan yang *concern* di bidang ilmu pengetahuan eksak (matematika dan fisika). Tidak salah jika Galileo dan Newton dinobatkan sebagai pendasaran perkembangan ilmu alam, sebab merekalah yang kiranya membuat ilmu alam mengalami keberhasilan dan mengalahkan ilmu-ilmu lainnya. Ketika itu, perkembangan ilmu sosial jauh ketinggalan di tengah perkembangan ilmu alam. Ilmu alam menjadi sebuah raja dalam perkembangan ilmu-ilmu lainnya tanpa terkecuali ilmu sosial. Menurut Popper, ilmu alam yang tengah marak berkembang dimotori oleh Galileo dan Newton, dan ilmu-ilmu sosial belum diketemukan secara pasti dalam perkembangannya siapa yang menjadi Galilei-nya ilmu sosial itu. Nampaknya permasalahan perkembangan ilmu pengetahuan sosial, Popper tidak menempatkan Durkheim, Marx dan Weber sebagai Galilei-nya ilmu sosial (Supraja, 2017).

Dinamika perkembangan pemikiran tersebut menggambarkan kesan

tegas atas setting filsafat alam ke dalam filsafat ilmu sosial. Menurut Supraja (2017), ada dua pengaruh ilmu alam ke dalam ilmu sosial yang kita dapat temukan. Pertama, kecenderungan untuk mencari dan menemukan ritme, pola, hukum atau trend. Tidak ada dua orang, kelompok berada dalam keadaan yang identik. Tugas ilmuwan sosial adalah mencari dan menemukan kesamaan (similaritas), di antara dua orang, kelompok dalam ruang sejarah tertentu. Kedua, kebiasaan untuk menemukan hubungan sebab akibat (kausalitas). Kedua kecenderungan ini dapat ditelusuri pada pemikiran Comte, Saint Simon, yang sejak awal mematok bahwa tugas sosiologi adalah memahami secara ilmiah hukum-hukum kemajuan yang terkandung dalam tatanan sosial sembari terus-menerus menjaga kesinambungan dengan program reorganisasi masyarakat. Singkatnya, ilmu sosial mengandung makna sama persis yang dilakukan oleh ilmu alam yakni mengkaji kenyataan (sosial) dalam ruang dan waktu harmonis sejalan dengan hukum-hukum alam (*nature law*) yang terjadi secara alamiah.

Setting gagasan ilmu alam ke dalam ilmu sosial atau metodologi ilmu alam langsung diterapkan ke dalam ilmu sosial yang paling nampak dinilai adalah sejak Comte dalam karyanya yang sangat terkenal *The Course of Positive Philosophy* yang sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Comte menemukan nama ilmu sosial yakni sosiologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial dalam mengkaji gejala masyarakat dalam pendekatan historisme. Apa yang dituangkan Comte dalam karyanya adalah sebuah metodologi ilmiah yakni objektif, rasional, sistematis, dan terukur yang merupakan metodologi ilmu kealaman yang langsung diterapkan dalam kajian kemasyarakatan. Konsekuensi dari “inspirasi” ilmu alam dalam ilmu sosial tercermin pada suatu pandangan tentang masyarakat yang didentikkan dengan keadaan alam yang terjadi secara evolusi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Spencer bahwa masyarakat sebagai organisme hidup yang sama persis dengan organisme biologis. Masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang berjalan layaknya hukum alamiah. Selain itu, Marx selaku tokoh materialisme, menjelaskan masyarakat dalam perspektif materialisme historis. Marx meramalkan perkembangan sejarah dengan cara menemukan hukum, atau pola perkembangan masya-

rakat. Apa yang dilakukan oleh tokoh sosiologi sekaligus perkembangan ilmu sosial kelak adalah sebuah usaha menyamakan ilmu sosial dengan ritme ilmu alam.

Gagasan ilmu alam yang tertuang dalam positivisme cukup mempengaruhi gagasan ilmu sosial dan humaniora yang dikenal dengan istilah historis-hermeneutis (interpretasi). Adalah Weber sebagai salah seorang tokoh sosiologi yang cukup *concern* dalam mengembangkan sebuah pendekatan post-positivisme atau yang dikenal dengan istilah *Verstehen*. Bagi Weber selaku pemikir metodologi ilmu sosial, tugas sosiologi adalah merumuskan hukum-hukum kelakuan sosial dengan cara memahami hubungan kausal seperti terdapat dalam ilmu alam. Kendati penganut jalan tengah, Weber tetap mengakui sosiologi selain menangkap keunikan-keunikan yang bersifat individual harus menggunakan pula metode ilmu alam agar diakui status ilmiahnya. Keadaan seperti ini, merupakan kungkungan besar metodologi ilmu alam ke dalam ilmu sosial. Artinya, ilmu sosial tidak akan dikatakan ilmu sains jika tidak menggunakan pendekatan yang sama persis pendekatan ilmu alam. Singkatnya, pengetahuan empiris-analitis (ilmu alam) yang kemudian menjadi pendasaran ilmu-ilmu alam direfleksikan secara filosofis sebagai pengetahuan yang sah tentang kenyataan (kehidupan sosial).

Perihal mendasar dipertanyakan dalam setting ilmu alam dalam ilmu sosial adalah bagaimana gagasan-gagasan ilmu pengetahuan alam dapat secara langsung masuk ke dalam gagasan ilmu pengetahuan sosial? Adalah sebuah keniscayaan ilmu pengetahuan sosial pada saat itu yang baru memulai mengembangkan gagasan ilmunya sebagai salah satu ilmu pengetahuan rasional dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapat pengakuan ilmiah, maka harus “bergantung” pada ilmu pengetahuan empiris-analitis (ilmu pengetahuan alam). Metodologi ilmu pengetahuan alam (empiris-analitis) menjadi metodologi ilmiah yang dipercaya di kalangan ilmuawan tanpa terkecuali ilmuawan sosial itu sendiri. Karena itu, ilmu pengetahuan sosial harus menggunakan cara berpikir ilmu kealaman (*naturewissenschaften*).

Lalu, bagaimana dengan posisi ilmu pengetahuan historis-herme-

neutis, bukankah ilmu tersebut sangat jauh berseberangan dengan ilmu pengetahuan empiris-analitis (ilmu kealaman)? Ilmu pengetahuan historis-analitis dengan metodologi interpretatif tetap berada dalam kungkungan ilmu pengetahuan kealaman (*naturewissenschaften*), sebab ilmu tersebut masih menggunakan cara berpikir ilmu pengetahuan alam. Hal ini ditandai dengan penemuan realitas yang benar-benar objektif dan sifatnya yang netral terhadap realitas tersebut. Kenetralan adalah salah satu sifat yang ditemui dalam metodologi ilmu kealaman, yang menggambarkan realitas yang diamati tidak boleh ada campur tangan dari peneliti. Walaupun secara metodologis, ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode interpretatif meminimalisir jarak antara si peneliti dengan objek yang diteliti. Akan tetapi, secara konkret-realistis ilmu pengetahuan tersebut harus kebal terhadap partisipasi peneliti. Hal ini dilakukan karena untuk menemukan pengetahuan yang benar-benar objektif. Pembongkaran makna dengan menggunakan interpretatif adalah usaha untuk melihat realitas di balik yang nampak (*idea*), jika hal tersebut ditemukan, maka menurut ilmu historis-hermeneutis itulah realitas sesungguhnya. Tapi, realitas tersebut hanya sebatas dijelaskan apa adanya tanpa mau mengubahnya sehingga ilmu pengetahuan sosial dengan syarat ilmu historis-hermeneutis tetap terjebak ke dalam kungkungan ilmu kealaman karena menurutnya dengan cara itu untuk menemukan ilmu pengetahuan yang benar-benar ilmiah.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merahnya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dari fase ke fase dapat dideskripsikan sebagai sejarah yang panjang. Terdapat beberapa point penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial di tengah-tengah positivisme yang lebih dahulu menjadi metodologi empiris. Pertama, secara historis ilmu pengetahuan sosial yang baru tumbuh ketika itu harus menggunakan metodologi ilmu empiris (positivisme) agar mendapat mengakuan ilmiah. Kedua, refleksi metodologi ilmu kealaman melahirkan sebuah metodologi ilmiah yang jauh melampaui (filsafat positivisme), yaitu metodologi historis-hermeneutis (metode interpretatif). Dengan kata lain, karena adanya filsafat positivisme (syarat ilmu kealaman), sehingga secara refleksi

melahirkan metodologi interpretatif. Ketiga, akibat pengaruh kuat metodologi ilmu kealaman terhadap ilmu sosial, maka secara logis ilmu pengetahuan sosial masih terjebak dalam kungkungan dogmatisme ilmu kealaman. Usaha melahirkan metodologi ilmu pengetahuan yang benar-benar ilmiah, secara tidak langsung berada pada kehilangan sifat praksis manusia itu sendiri. Akibatnya, ilmu pengetahuan lahir di muka bumi karena hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Singkatnya, ilmu hanya untuk ilmu. Pada persoalan inilah yang menjadi salah satu pemicu lahirnya Teori Kritik yang tidak lagi sekadar berorientasi pada teori semata, tetapi memasuki ruang praksis. Mengenai hal ini akan diuraikan secara detail pada bab-bab berikutnya.

Bab 2

Tradisi Filosofis Ilmu Sosial

A. Pengantar

Sosiologi sebagai salah satu disiplin yang banyak mengkaji dinamika sosial terus mengalami perkembangan pesat. Dinamika pemikiran para ilmuwan sosial telah menghasilkan kompleksitas teori yang dapat dikelompokkan dalam suatu paradigma tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh George Ritzer ke dalam tiga paradigma. Keragaman paradigma terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang mendasari pemikiran masing-masing komunitas ilmuwan mengenai sudut pandang ontologis dan cara kerja epistemologisnya. Mengenal dan memahami tradisi pemikiran ilmu sosial (khususnya sosiologi) berarti juga memahami pandangan filsafat yang mendasari aliran-aliran tersebut. Pada bab ini disistematisasikan tiga tradisi filosofis, meliputi tradisi sosiologi saintifik (positivistik), tradisi sosiologi hermeneutik (fenomenologis), dan tradisi kritis (emansipatori). Dari ketiga tradisi tersebut “dideteksi” arah pemikiran Teori Kritis. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga tradisi tersebut diuraikan pada bab ini.

B. Filosofi Ilmu Sosial Positivistik

Tradisi aliran dalam filsafat ilmu sosial yang paling awal muncul adalah aliran filsafat positivistik. Dikatakan positivistik, sebab aliran ini berurat berakar dari filsafat positivisme saintifik. Dikatakan saintifik, karena aliran ini bersumber dari ilmu kealaman (*naturwissenschaft*). Ilmu kealaman atau dapat dikatakan hukum-hukum alam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang awal muncul di kalangan para cendekiawan. Tak dapat dipungkiri bahwa filsafat positivisme melahirkan metodologi sama persis yang dianut oleh ilmu pengetahuan alam. Metode ilmiah yang mendasari ilmu kealaman, yakni: objektif, rasional, sistematis, dan terukur (Upe, 2010). Aliran filsafat positivisme, juga sering disebut sebagai aliran

Aristotelian, sebab filsafat ini menggunakan pendekatan yang sama persis diajukan oleh Aristoteles yakni, empirisme. Lebih lanjut, metode ini sangat berpegang teguh terhadap fakta-fakta objektif, sedangkan fakta yang berada di luar dari eksistensi itu bukan dianggap fakta, melainkan sebuah spekulasi belaka dari subjektif seseorang.

Perkembangan filsafat positivisme atau tradisi saintifik, dimotori oleh dua pioner pemikir yakni Henry Saint Simon (1760-1825) dan Auguste Comte (1798-1857). Pertama kali yang lebih *concern* terhadap perkembangan filsafat positivisme yakni Auguste Comte, sehingga menjadi sebuah paham filsafat ilmu pengetahuan sejak awal abad ke-20 (Anwar dan Adang, 2013). Dalam konteks epistemologi, kata *positive* yang pertama kali digunakan oleh Comte, berperan vital dalam “mengkafirkan” filsafat dan sains di Barat, dengan memisahkan keduanya dari unsur agama dan metafisik, dimana dalam perspektif Comte berarti mengingkari hal-hal non-indrawi. Hal ini kemudian berkembang menjadi sebuah paradigma positivistik merasuk ke dalam saintifik, dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial humaniora.

Kemudian, perkembangan filsafat positivisme dimasukan ke dalam ilmu pengetahuan sosial, ketika Auguste Comte menulis karya yang berjudul *The Course Positive Pilosophy* pada abad ke-19, dimana Comte menempatkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri di luar dari ilmu pengetahuan alam. Sosiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial, memiliki objek kajian yang dicanangkan dari filsafatnya yakni fakta-fakta sosial sebagai sasaran kajiannya. Karena dengan fakta-faktalah ilmu dapat dikatakan valid.

Menurut Comte positivisme adalah penerapan metode empiris dan ilmiah pada setiap lapangan penelitian. Sarana yang dapat digunakan adalah pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis. Selanjutnya, positivisme bertumpuh pada tesis bahwa ilmu adalah satu-satunya yang valid, dan dengan hanya fakta-fakta yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek yang berada di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode diluar yang digunakan untuk menelaah fakta (Upe, 2010). Sampai

di sini, dapat diketahui bahwa ontologi dari positivisme adalah sebuah realitas yang nampak di permukaan, dapat diraba, dan dirasakan oleh pancaindra manusia itu sendiri. Sehingga memungkinkan metodenya adalah metode empirisme.

Pada setiap kajian lapangan filsafat positivisme terhadap ilmu pengetahuan sosial, tanpa terkecuali sosiologi. Comte mendasarkan bahwa penelitian harus benar-benar objektif. Ia menolak segala yang menyusupi fakta, atau dengan kata lain, menolak yang di luar eksistensi fakta, seperti yang diyakini oleh kaum Platonisme, yakni ide-ide atau gagasan yang termuat dalam benda-benda dan berhubungan dengan konsep-konsep manusia yang objektif dan nyata. Lebih lanjut, Comte, yang dimana filsafat positivismenya, berurat berakar dari sebuah tinjauannya tentang perkembangan cara berpikir manusia yang disebutnya hukum tiga tahap atau hukum tiga tahap yakni, tahap teologis, metafisik, dan tahap positif.

Pertama, tahap teologis, pada tahapan ini, pemikiran manusia masih dihindangi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar dirinya. Kekuatan yang bersifat supranatural yang membuat manusia hanya pasrah dengan keadaannya, yakni pasrah terhadap kekuatan yang berada di luar dirinya. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah yang bersifat gaib (tuhan). Tingkatan pemikiran manusia ini, hanya menganggap seluruh kejadian alam semesta disebabkan oleh kekuatan tuhan, dan manusia hanya pasrah dengan keadaan itu, sehingga menuntut manusia untuk memohon kepada tuhan agar dijauhkan dari segala gejala alam semesta. Pada tahap ini, berevolusi menjadi tahap animisme, politeisme, sampai pada tahap mono-teisme.

Kedua, tahap metafisik, jika pada tahap teologis, manusia hanya pasrah dari belenggu kekuatan yang berada di luar dirinya (tuhan), maka pada tahap metafisik manusia sudah memberanikan diri untuk mencegah kekuatan alam yang berada di luar dirinya dengan cara memberikan penolak bala atau sesajen. Pemikiran manusia pada tahap ini, menempatkan dewa-dewa atau tuhan sebagai kekuatan alam yang mampu memberikan solusi terhadap gejala alam semesta, sehingga manusia ikut berpartisipasi di dalamnya dengan cara memberikan sajian penolak bala.

Ketiga, tahap positif, dimana pemikiran manusia sudah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pada tahap ini manusia sudah menemukan hukum-hukum alam yang dari semua itu adalah bentuk pemikiran akal manusia. Karena dengan akalnya, manusia sudah memberanikan diri untuk menguasai dan mengelola alam. Sehingga, manusia menempatkan metode ilmiah sebagai metodologi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jika pada tahap awal (teologis), manusia hanya dihinggapi rasa khawatir terhadap alam semesta dan manusia hanya pasrah akan hal itu, maka pada tahap kedua (metafisik), manusia sudah memberanikan diri untuk memengaruhi alam semesta, sedangkan pada tahap positif, manusia sudah mampu menundukkan alam dan mengelolanya. Singkatnya, pada tahap positif pemikiran manusia sudah melampaui ilmu pengetahuan (metode ilmiah) untuk mengatur dan mengelola alam.

Dari peristiwa yang diungkapkan Comte mengenai hukum tiga tahapnya, menempatkan tahap positif sebagai tahapan yang tertinggi. Sedangkan tahap pertama dan tahap kedua dianggapnya masih pada tataran primitif dan belum berlaku ilmu pengetahuan. Tak pelak lagi, positivisme menempatkan aliran filsafat empirisme sebagai tonggak analisis realitas faktual sepanjang berbicara tentang objektivistik. Dikatakan objektivistik, sebab aliran ini bersifat objektif dan hanya cara memisahkan jarak antara subjek (peneliti) dengan objek yang ditelidik dapat menemukan data-data objektif.

Dalam perkembangannya, aliran filsafat positivisme dapat dibagi beberapa varian aliran. Akan tetapi, tetap satu tujuan yakni bersifat objektif, sistematis, rasional, dan terukur. Adapun varian alirannya, yakni pertama, positivisme sosial, kedua, positivisme evolusioner, ketiga, positivisme kritis, dan keempat, positivisme logik. Keempat varian dalam filsafat positivisme ini, tetap satu tujuan yakni menggunakan metode saintifik untuk menganalisis realitas sosial. Positivisme sosial adalah penjabaran lebih lanjut tentang kebutuhan manusia dan sejarah. Comte dalam studinya sejarah perkembangan cara berpikir manusia (hukum tiga tahap), mengatakan bahwa matematika bukan ilmu, melainkan alat berpikir logik.

Sedangkan positivisme evolusioner berangkat dari fisika dan bio-

logi yang menggunakan doktrin (Darwimian) yakni evolusi biologis. Dikatakan Darwimian, sebab menempatkan teori evolusi Darwin ke dalam analisis masyarakat. Atas dasar pemikiran ini, Spencer menganggap evolusi adalah proses dari homogen ke heterogen. Positivisme kritis memandang bahwa sesuatu (masyarakat dan budaya) merupakan serangkaian relasi inderawi, dan pemikiran kita adalah persepsi kita atau representasi dari sesuatu itu. Positivisme logik banyak dikemukakan oleh aliran Neo-Kantian. Ia menolak segala bentuk etik transendental bahwa ia menyarankan adanya unifikasi ilmu dan mengganti konsep variabilitas menjadi konsep konfirmabilitas (Upe, 2010). Selanjutnya, filsafat positivisme mengatakan bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual-fisikal. Sehingga tidak salah jika Comte sempat menamakan sebuah hukum masyarakat dengan nama fisika-sosial, akan tetapi nama itu telah ada yang gunakan (Saint Simon), maka Comte menggantinya dengan nama sosiologi sebagai landasan ilmu pengetahuan sosial.

Menelisik ruang filsafat positivisme, maka kita akan diarahkan untuk mengenal sebuah komunitas ilmuwan yang telah lama berdiri. Komunitas ilmuwan inilah yang menjadi dasar filsafat positivisme, terkhusus positivisme logik. Nama komunitas ilmuwan itu adalah lingkaran Wina (Lubis, 2015). Komunitas ilmuwan ini, menggunakan metode analisis dengan pendekatan matematika dan fisika. Ia menolak segala bentuk yang berbau transendental. Artinya, menolak segala bentuk metafisika yang berkembang di kalangan pemikiran filosof alam terdahulu. Hanya dengan cara metode empiris dan matematis, seorang ilmuwan dapat memperoleh analisis benar-benar objektif.

Dengan demikian, filsafat positivisme tidak bisa menjadi sebuah kebenaran bagi kalangannya jika tidak memiliki beberapa aliran filsafat yang digunakannya untuk menjadi sebuah metode analisis realitas faktual. Se-jauh, berbicara tentang metode ilmiah aliran filsafat positivisme, maka kita akan menemukan beberapa variasi aliran filsafat didalamnya. Adapun variasi aliran filsafat positivisme, yakni filsafat materialisme, filsafat realisme, filsafat empirisme, dan filsafat behaviorisme.

1. Filsafat Materialisme

Aliran ini menempatkan materi sebagai pokok (*causa prima*) sumber ilmu pengetahuan. Aliran filsafat ini memandang bahwa materi adalah primer dan ide adalah sekunder. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ide atau pikiran dibentuk oleh keadaan yang berupa materi. Keadaan objektif itu ada, kemudian otak bekerja melahirkan pikiran. Kesadaran (pikiran) dibentuk oleh keadaan (materi). Tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah Karl Marx (1818-1883), ia mengatakan bahwa basis ekonomi melahirkan superstruktur (kesadaran) atau keadaan sosial melahirkan kesadaran sosial atau materi melahirkan ide.

Apa yang diungkapkan Marx adalah materi itu berupa segala sesuatu yang dapat diraba, dirasakan, dan berbentuk. Artinya bahwa materi itu bersifat eksternal dari manusia itu sendiri, dan tidak berada dalam pikiran yang bersifat spekulatif. Karena materi itu berada di luar diri manusia, maka ia akan mempengaruhi manusia itu sendiri. Itulah sebabnya, mengapa Marx mengatakan bahwa keadaan (materi) yang menciptakan atau membentuk kesadaran (subjektif manusia). Akhirnya, sampai disini, kita memahami filsafat materialisme dalam bentuknya yakni hukum kausalitas berlaku dalam diri sang materi. Misalnya, materi dan gerak (Shadr, 2013). Dimana, keduanya saling melengkapi antara materi dan gerak tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Lebih jauh, dikatakan bahwa materi itu berada dalam gerak berkesinambungan dan perkembangan konstan. Ini adalah fakta yang disepakati oleh semua filsuf dan ilmuwan. Faktanya, bahwa adalah materi membutuhkan suatu sebab yang mengerakkannya.

Singkatnya, filsafat materialisme itu berdiri dan jatuh pada logika hukum-hukum alam (*nature law*). Karena itu, Marx menempatkan materi sebagai sesuatu yang primer, sebab dialah penyebab segala sesuatu yang ada (*being*). Selain itu, materi juga sangat jelas di permukaan, karena mampu dirasakan oleh setiap orang dan inilah yang membentuk atau menciptakan kesadaran kita (supranatural). Disinilah, kita menempatkan filsafat materialisme kedalam salah satu kutup dari tradisi positivistik, karena menolak segala yang berbau transendental melainkan yang mampu

dicerna oleh pancaindra manusia itu sendiri.

2. Filsafat Realisme

Pengetahuan disebut benar kalau sesuai dengan kenyataan (realis). Kenyataan (realis) mempunyai diri terhadap subjek yang mengenalnya. Pengetahuan menjadi pengetahuan yang benar kalau diri kenyataan (realis) diakui sebagai norma dan batu ujian pengetahuan yang benar. Dalam filsafat realisme, kita menyakini bahwa objek fisik atau benda yang kita alami secara inderawi itu real atau nyata ada, bukan suatu hasil imajinasi subjek kita sendiri dan adanya tidak tergantung dari kita atau siapapun yang mengalaminya. Dengan kata lain, objek pada benda-benda itu ada pada dirinya sendiri. Objek-objek tersebut tidak tergantung pada yang mengetahui atau tidak tergantung pada ide (pikiran) subjek. Ide (pikiran) dan dunia luar saling berinteraksi, akan tetapi interaksi yang mengetahui tidak memengaruhi dunia apa lagi menciptakan.

Paham realisme ini, dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial, sebagai salah satu metode dalam analisa objek sosial yakni masyarakat. Masyarakat dianggap real dalam dunianya. Artinya, masyarakat berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam (*nature law*) dan individu yang tergabung di dalamnya tidak dapat memengaruhinya, melainkan individu yang mengikutinya. Objek (masyarakat) ada dengan sendirinya, sedangkan individu hanya berinteraksi dengan objek tersebut tanpa memengaruhinya. Tokoh yang terkenal dalam paham realisme ini adalah Bertrand Russel. Bagi penganut realisme, makna sebuah objek hanyalah sebagian dari objek itu sendiri (*simple part of the object it self*).

3. Filsafat Empirisme

Empirisme adalah sebuah paham yang menganggap bahwa pengalaman yang bersifat faktual adalah yang layak menjadi sumber pengetahuan (Sumarna, 2006). Aliran ini beranggapan bahwa seluruh ide datang dari pengalaman (*experience*) dan tidak ada proposisi tentang suatu benda dalam kenyataan yang dapat diketahui sebagai kebenaran yang independen dari pengalaman. Aliran ini mengatakan bahwa pengetahuan manusia didapatkan hanya dengan pengalaman yang konkret, bukan dari penalaran rasional yang abstrak dan spekulatif, apa lagi pengalaman kewahyuan dan

intuisi yang sulit memperoleh pembenaran faktual.

Paham empirisme, menyangkal semua pembenaran yang tidak dapat dibuktikan secara faktual atau dinampakan di permukaan. Misalnya, menyangkal sebuah idea yang populerkan oleh Plato. Karena seperti itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, melainkan bersifat spekulatif. Di era modern, paham ini telah berkembang dengan pesat, dan John Locke (1632-1704) beserta sejawatnya yakni Hume, dan Barkeley (1685-1753), sebagai pioner dari perkembangan aliran empirisme. Locke dengan konsep tabula rasa mengatakan bahwa manusia sejak lahir ibaratkan kertas putih tanpa coretan. Kertas putih itu akan terisi dengan sendirinya melalui pengalaman hidupnya di dunia. Apa yang diilustrasikan Locke adalah seluruh tanggapan, perasaan, dan tindakan manusia tidak pernah keluar dari koridor pengalamannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa filsafat empirisme jatuh pada ketetapan pengalaman kita sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling valid, sebab dengan cara itu, seorang filsuf empiris, mendapatkan pengetahuan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Filsafat Behaviorisme

Aliran filsafat behaviorisme adalah salah satu paham yang menempatkan analisis sosial ke dalam psikologi sosial. Paham ini, menempatkan perilaku manusia sebagai fokus kajiannya. Dimana menurut para penganut behavioral mengatakan bahwa hanya dengan menganalisis perilaku manusia yang itu benar-benar dikatakan sebagai konkret-realistis. Karena perilaku manusia benar-benar nampak terlihat di permukaan. Berbeda yang dianalisis oleh kaum fungsionalis. Hanya menempatkan nilai, norma, dan aturan sebagai fokus kajiannya, sedangkan hal tersebut tidak bersifat konkret-realistis, maka dari itu kaum behavioral menyangkal hal tersebut.

Aliran ini, dalam perkembangannya menempatkan stimulus-respon sebagai anasir dalam mengkaji perilaku sosial. Hal ini, sebagaimana salah seorang tokohnya yang terkenal B.F. Skinner. Menurutnya, psikologi stimulus-respon dapat memberikan rangsangan atau respon terhadap perilaku seseorang. Selanjutnya, dapat memberikan ganjaran dan hukuman

terhadap pola perilaku itu. Skinner berpendapat bahwa kepribadian atau perilaku terutama adalah hasil dari sejarah penguatan individu. Pola perilaku individu dibentuk oleh apa yang dinamakannya stimulus-respon, yang terjadi secara repetitif, sehingga dapat membentuk pola perilaku itu. Dalam sebuah karyanya, Skinner membuat tiga asumsi dasar, yaitu: (1) Perilaku itu terjadi menurut hukum (*behavior can be controlled*), (2) Perilaku dan kepribadian manusia tidak dapat dijelaskan dengan mekanisme psikis seperti *id* dan *ego*, (3) Perilaku manusia tidak ditentukan oleh pilihan individu.

Apa yang diasumsikan oleh Skinner tentang perilaku sosial, menempatkan paham behaviorisme ke dalam salah satu aliran positivisme, sebab perilaku sosial dianalisisnya menurut hukum stimulus-respon sedangkan hal itu bersifat eksternal dari individu dan memengaruhi individu untuk melakukan tindakan. Sampai di sini, jelaslah bahwa aliran behaviorisme tidak salah ditempatkan sebagai salah satu dari aliran positivisme. Secara umum, penekanan kaum behavioris dalam mengkaji sesuatu realitas yakni sebagai berikut:

- a. Objektivisme, yakni teknik-teknik objektif untuk mengumpulkan data.
- b. Orientasi S-R (stimulus-respon), yakni seluruh proposisi dinyatakan dalam istilah-istilah stimulus-respon.
- c. Peripheralisme, yakni suatu fenomena diklasifikasikan sebagai suatu mental yang telah direduksi kedalam objektivikasi, yakni melalui S-R.
- d. Penekanan atas pengajaran dan beberapa bentuk asosiasi S-R sebagai landasan hukum dari pengajaran tersebut.
- e. Environmentalisme, yakni merujuk pada kondisi lingkungan seseorang dalam pengertian kondisi fisik secara kasar.

Dari uraian panjang lebar di atas, dapat ditarik benang merahnya, bahwa filsafat positivisme sebagai filsafat awal, dalam ilmu pengetahuan sosial, dimana Comte menempatkan sosiologi sebagai ilmunya dalam mengkaji kehidupan masyarakat. Hal yang tak dapat dipungkiri adalah Comte ingin mensejajarkan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan alam yang lebih jauh berkembang sebelumnya. Mendasarkan hal ini, Comte bermaksud menempatkan metode ilmiah (saintifik) ke dalam

lapangan penelitian ilmu pengetahuan sosial. Menurutnya, hanya dengan metode ilmiah, kita dapatkan realitas sosial yang benar-benar objektif. Dengan demikian, secara reflektif aliran filsafat ilmu sosial positivistik dapat juga dikatakan sebagai aliran saintisme.

C. Filosofi Ilmu Sosial Fenomenologis

Tradisi aliran filsafat ilmu sosial yang kedua adalah filsafat fenomenologi. Tradisi ini diklaim sebagai penyangkal tradisi aliran positivisme. Karena itu, sering disebut juga aliran post positivisme sebab aliran ini tidak sepaham dengan nalar filsafat positivisme. Jika positivisme menempatkan fakta empiris sebagai pencipta realitas sosial, maka fenomenologi menempatkan manusia sebagai pencipta sejarahnya, sehingga manusia dapat dikatakan makhluk historis. Artinya, manusia sebagai makhluk yang kreatif mampu memberikan makna sosial terhadap ruang publik masyarakat.

Secara etimologis, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* artinya tampak dan *phainen* berarti memperlihatkan. Sedangkan *logos* berarti kata, ucapan, kebenaran, rasio, atau ilmu. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa saja yang tampak oleh panca indra manusia. Fenomenologi juga diartikan gejala yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semua. Kebalikannya kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati lewat indra. Dalam filsafat fenomenologi, suatu gejala tidak selamanya harus diamati oleh indra, karena gejala juga dapat dilihat secara batiniah, dan tidak harus berupa kejadian-kejadian. Jadi, apa yang kelihatan dalam dirinya sendiri seperti apa adanya (Achmadi, 2011). Dengan melihat pengertian tersebut. Fenomenologi tidak dapat terlepas dari syarat metode ilmiah dalam menganalisis gejala sosial, sebab mereka harus mengungkap realitas yang benar-benar objektif dan realitas objektif itu berada dalam diri sang penciptanya yakni subjektif manusia.

Berbeda dengan filsafat positivisme, fenomenologi melihat gejala-gejala sosial dalam bentuk holistik. Tidak memecah-pecah gejala ke dalam

bentuk parsial seperti yang dilakukan oleh kaum nalar positivisme. Ilmuwan fenomenolog bermaksud melihat hakikat gejala sosial ke dalam bentuk yang lebih universal. Artinya sebuah realitas gejala dibentuk oleh kesadaran penciptanya sendiri (manusia). Hal ini dapat ditelusuri bahwa realitas itu berada di belakang layar fakta dan karena realitas berada di belakang layar fakta, maka kaum fenomenologi menganggap hal itu sebagai kebenaran selaku pencipta fakta tersebut. Singkatnya, filsafat fenomenologi ingin membongkar realitas transenden sepanjang realitas itu dapat diamati.

Aliran fenomenologi berkembang dengan syarat ilmu-ilmu sosial Jerman yang diwarnai pemikiran Platonik. Dikatakan demikian, sebab dasar dari pemikiran fenomenologi bersumber dari filsafat Plato. Metode berpikir Plato menyangkal cara berpikir filsafat modern, terkhusus filsafat positivisme yang melihat kebenaran universal dapat dicapai melalui generalisasi dari gejala-gejala bersifat individual. Berbeda dengan positivisme, metode Plato dalam memandang kebenaran universal tidak dapat dicapai hanya dengan melihat gejala-gejala yang nampak di permukaan saja. Menurutnya, hakikat manusia dapat dikenal dengan cara mengenal pengertian umum tentang manusia, bukan melalui pengertian tentang seorang manusia. Nampaknya, metode berpikir Plato mendasarkan bahwa ada realitas di luar eksistensi materi sebagai penggerak dari realitas yang nampak di permukaan.

Dalam pengertian sederhana, sebenarnya filsafat fenomenologi dalam pengetahuan sosial tanpa disadari telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengamati fenomena, membuka diri, membiarkan fenomena itu tampak pada kita, lalu kita memahaminya. Kita memahaminya dalam perspektif fenomena itu sendiri, bagaimana ia bercerita pada kita. Dengan lain perkataan, kajian fenomenologi memberikan ruang kepada objeknya untuk berbicara. Berbicara di sini, diartikan sebagai sebuah tindakan subjektif yang diarahkan kepada orang lain. Jika, bersifat subjektif, maka secara tidak langsung kajian filsafat fenomenologi melampaui kajian nalar positivisme yang mendewakan sebuah realitas semu, pasif, rigid, dan berupa angka.

Paham fenomenologi, sebenarnya sudah dipakai sejak lama dalam kajian metodologi ilmu pengetahuan untuk memperoleh teori kebenaran. Sebagaimana Bagus dalam Hasbiyansyah (2008) mengatakan bahwa pada awalnya fenomenologi diperkenalkan oleh J.H. Lambert pada tahun 1764 untuk menunjukkan pada teori kebenaran. Kadang-kadang fenomenologi dapat ditemukan dalam karya-karya Imanuel Kant. Kant menganalisis sampai dimana akal kita atau kesadaran kita bersifat rasional dan menemukan sebuah otoritas subjek. Artinya, akal kita hanya sebatas kesadaran yang dapat memikirkan sebuah *fenomena* bukan *nomena*. Selanjutnya fenomenologi disistematisasikan oleh Hegel dengan asumsi dasar bahwa pengetahuan muncul dalam kesadaran (Hasbiyansyah, 2008). Dengan demikian, secara historis fenomenologi sudah berkembang di kalangan filsafat terdahulu seperti sekaliber Kant dan Hegel.

Seiring perkembangannya, fenomenologi disistematisasikan sebagai dasar filsafat sosial kepada Edmund Husserl (1839-1939), dimana pemikirannya bahwa objek/benda harus diberikan kesempatan berbicara, yaitu dengan cara deskriptif fenomenologis. Tujuannya adalah untuk melihat hakikat gejala-gejala secara intuitif. Fenomenologi di satu sisi sebagai filsafat di sisi lain ia juga sebagai metode. Dalam metodologi, filsafat fenomenologi menempatkan data kualitatif sebagai bentuk ungkapan deskriptif naratif terhadap gejala-gejala yang diteliksikanya. Husserl dalam filsafat fenomenologisnya menempatkan realitas objektif ke dalam bentuk yang bersifat general. Artinya, objek yang menampilkan gejala-gejalanya diberi ruang berbicara secara bebas, tidak membatasi pada persoalan pertanyaan seorang peneliti.

Lebih lanjut, Husserl dalam filsafat fenomenologi membutuhkan beberapa reduksi. Reduksi dibutuhkan supaya dengan intuisi kita dapat memperoleh hakikat objek-objek. Reduksi-reduksi ini yang menyingkirkan semua hal yang mengganggu kita untuk mencapai *wesensschau*. Reduksi Pertama, menyingkirkan segala sesuatu yang subjektif. Sikap kita harus objektif, terbuka untuk gejala-gejala yang harus “diajak bicara”. Kedua, menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. Ketiga, menyingkirkan seluruh reduksi

pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain harus, untuk sementara dilupakan. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala sendiri dapat memperlihatkan diri, menjadi fenomenin (memperlihatkan diri).

Menurut Husserl objek ilmu tidak terbatas pada sesuatu yang empirik sensual, tetapi meliputi hal-hal yang tidak lain dari persepsi, pemikiran, dan kemauan subjek (Upe, 2010). Husserl menjelaskan bahwa kita harus kembali pada benda-benda itu sendiri (*zu den sachen selbst*). Objek-objek harus diberikan kesempatan berbicara melalui deskriptif fenomenologis guna mencari hakikat fenomena atau gejala-gejala (*wesenchau*). Kesadaran bukan dari kenyataan, melainkan kenyataan diciptakan oleh kesadaran. Dengan perkataan lain, objek-objek faktual diciptakan oleh kesadaran (subjek) atau kemauan subjek.

Kaum fenomenologi menyangkal realitas objektif diciptakan oleh kenyataan empiris sebagai mana yang dianut oleh kaum positivis, melainkan objek atau gejala berasal dari subjektif-historis. Dengan demikian, filsafat fenomenologi menempatkan ontologi makna-makna sosial yang diciptakan dari kesadaran subjek. Karena itu, tugas kaum fenomenologis harus menangkap makna-makna sosial tersebut. Dalam kajian ini, Husserl menempatkan penafsiran (interpretasi) sebagai metodenya dalam rangka memperoleh gejala-gejala makna sosial tersebut. Penafsiran sebagai metode tentunya dapat mereduksi fakta-fakta objektif secara holistik dengan menempatkan individu sebagai objek kajian yang aktif, bebas, dan penuh makna. Hal ini dimaksudkan untuk mencari data yang benar-benar bersifat objektif dan mendalam. Secara reflektif historis, filsafat fenomenologi ditempatkan dalam kajian bidang ilmu pengetahuan sosial untuk menangkap realitas sosial yang berada di belakang layar. Paham fenomenologi sebagai aliran filsafat memiliki beberapa variasi aliran filsafat yang menjadi pendukungnya. Beberapa variasi tersebut yakni sebagai berikut:

1. Filsafat Idealisme

Aliran filsafat idealisme berkembang di kalangan filsuf Jerman, diantaranya Immanuel Kant yang mengedepankan idealisme sebagai sumber pengetahuan manusia. Idealisme yang dimaksudkan adalah idealisme yang berada pada rasio manusia itu sendiri. Kant menganalisis sampai sejauh

mana kemampuan atau batasan rasio manusia. Kant menemukan bahwa rasio hanya mampu melihat fenomena yang berada dalam dirinya sendiri (roh absolut).

Kant menggunakan istilah “*das Ding an sich*” untuk menemukan otaritas subjek yang berada dalam dirinya sendiri. Pandangan ini bertentangan dengan Hegel sebagai seorang idealisme. Kant berpandangan bahwa subjek telah sempurna dalam dirinya sendiri, sementara Hegel mengatakan subjek tidak sempurna dalam dirinya sendiri, melainkan ada proses negasi yang terjadi sehingga membentuk realitasnya yakni rasio. Apa yang disangkal oleh Hegel adalah menempatkan manusia sebagai makhluk historis, dimana manusia sebagai subjek yang memiliki rasio tentunya tidak pernah terlepas dari tantangan hidupnya, karena atas dasar tantangan itu, manusia akan memperoleh substansinya sebagai manusia, ini disebutnya sebagai hukum dialektika. Dialektika yang dimaksud Hegel di sini masih sebatas pemikiran (rasio) manusia itu sendiri, maka dari itu disebut dengan idealisme Hegel. Meski terdapat perbedaan antara keduanya, namun pada prinsipnya filsafat idealisme menekankan pentingnya sebuah pikiran (ide) sebagai konstruk dari realitas materi. Aliran ini memandang (ide) atau pikiran sebagai sesuatu hal yang primer dan materi sebagai sesuatu yang sekunder. Hal ini berarti, bahwa objek yang konkret itu ada merupakan hasil dari pikiran (ide). Filsafat idealisme, dimotori oleh tokoh yang terkenal yakni Plato (427-347 SM). Menurutnya, ide melahirkan materi (dunia).

2. Filsafat Rasionalisme

Aliran filsafat ini menempatkan akal sebagai segala-galanya sumber pengetahuan. Artinya, dengan sistem logika yang dimiliki akal seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Rasionalisme menghendaki adanya pembahasan yang general dan sistemik, dan mengungkap makna di balik realitas empiris sensual. Para penganut rasionalisme memandang bahwa hanya dengan proses abstraksi terhadap realitas maka dapat memperoleh ilmu yang valid dengan sistem logikanya. Tokoh yang amat terkenal dari aliran rasionalisme adalah Rene Descartes (1596-1650). Menurutnya, hanya dengan pikiran (akal) dapat menciptakan sesuatu. Dengan istilahnya

yang terkenal yakni “*cogito ergo sum*” yang berarti “aku berpikir, maka aku ada”. Metode ini yang dipakai dalam filsafat modern. Descartes menyebutnya sebagai metode kesangsian (Hardiman, 2011).

Pandangan Descartes mengenai metode kesangsian adalah bermaksud “menelanjangi” sebuah realitas yang bersifat spekulatif atau khayalan yang berada dalam realitas objektif. Misalnya, apakah sebuah benda itu bergerak karena atas dasar kekuatan gaib atau khayalan saja. Descartes menegaskan bahwa hanya dengan kesangsian kita tidak akan tertipu ataupun terperdaya oleh khayalan. Justru semakin kita menyangsikan segala sesuatu, entah kita sungguh ditipu atau ternyata tidak, termasuk menyangsikan bahwa kita tidak dapat menyangsikan, kita semakin meng-ada (*exist*). Singkatnya bahwa apa yang ditandaskan oleh aliran filsafat rasionalisme adalah bentuk kesangsian akal (rasio) dalam menciptakan sesuatu yang ada (*being*).

3. Filsafat Humanisme

Sejak zaman *renaissance* pemikiran humanisme telah berkembang dengan pesat. Mereka menolak otoritas dari gereja sebagai pemegang kendali kekuasaan (Hardiman, 2011). Landasan ini menempatkan kaum pemikir sebagai tonggak pengerak ilmu pengetahuan. Aliran filsafat humanisme memandang bahwa posisi utama manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Humanisme ditandai dengan sebuah gerakan yang didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan manusia (sebagai ganti kemampuan adikodrati) hasrat intelektual, dan penghargaan akan disiplin intelektual. Singkatnya, pencipta realitas itu sendiri adalah manusia itu sendiri.

Dari uraian di atas menempatkan filsafat fenomenologi sebagai kajian metodologi dalam ilmu pengetahuan sosial. Filsafat fenomenologi sangat, erat kaitanya dengan tradisi aliran hermeneutik. Dikatakan, hermeneutik, sebab fenomenologi dalam melihat gejala sosial yang terjadi adalah menempatkan manusia sebagai makhluk historis, artinya manusia-lah pencipta sejarahnya sendiri dan itu ada pada tradisi aliran hermeneutik. Berbeda dengan positivisme, filsafat fenomenologi melihat gejala sosial sebagai suatu yang kompleks yang bersifat (naturalis). Jika positivisme

sebagai filsafat yang berkembang dengan melihat fakta empiris, maka filsafat fenomenologi melihat gejala sosial dalam bentuk transenden. Uraian ini, memberikan satu persoalan khusus tentang posisi manusia apakah dia pencipta keadaan atau malah sebaliknya.

D. Filosofi Ilmu Sosial Emansipatoris

Dikotomi subjek-objek, kuantitatif-kualitatif, *transendental-empiris*, *erklaren-verstehen* dan kesadaran-keadaan dalam filsafat fenomenologi dan filsafat positivisme masih belum dapat membebaskan permasalahan sosial yang begitu kompleks dalam kehidupan masyarakat. Kedua filsafat ilmu sosial tersebut masih berkuat pada sebuah pandangan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan perkataan lain, ilmu hanya untuk ilmu pengetahuan, tanpa berpikir sebagai sebuah paradigma filsafat untuk membebaskan manusia dari segala belenggu dominasi, sehingga manusia dapat mencapai pencerahan. Seputar filsafat positivisme dan fenomenologi hanya menjelaskan (*erklaren*) dan memahami (*verstehen*) realitas apa adanya tanpa upaya mengintervensi atas permasalahan sosial sebagai objek kajiannya. Lain halnya dengan filosofi ilmu sosial emansipatoris bermaksud lebih dari sekadar penjelasan dan pemaknaan, melainkan sampai pada upaya pembebasan dari belenggu yang mendominasi. Tradisi emansipatoris tidak melihat realitas apa adanya, melainkan menginginkan sebuah intervensi dari seorang tokoh emansipasi dalam melihat objek permasalahan yang dikajinya. Artinya, bahwa seorang peneliti (tradisi emansipatoris) menginginkan penerapan metode ilmiah dalam permasalahan sosial yang tengah terjadi agar problem tersebut dapat dibebaskan dan mencapai pencerahan. Dengan demikian, filsafat ilmu sosial emansipatoris tidak netral terhadap objek kajiannya, karena dengan cara itu problem sosial dapat dibebaskan dari segala belenggu dominasi.

Filsafat ilmu sosial emansipatoris lahir karena risih terhadap kedua filsafat awal dalam mengkaji masyarakat. Di sini diartikan sebuah kritik pedas yang dialamatkan filsafat positivisme yang telah mendewakan metode ilmu pengetahuan alam atau hukum-hukum alam (*nature law*) ke dalam ilmu pengetahuan sosial, dimana filsafat positivisme memiliki ciri-

ciri, seperti bebas nilai (*value free*), netral terhadap realitasnya (masalah sosial), universal, objektif, dan mempertahankan *status quo*. Sementara itu, menurut tradisi emansipatoris atau dikenal dengan istilah paradigma kritis, menolak ciri-ciri filsafat positivisme tersebut, karena ciri-ciri itu, hanya melanggengkan keadaan yang ada (*status quo*) walaupun keadaan itu diketahui telah rusak total. Sedangkan filsafat fenomenologi, mendapatkan pula kritikan terhadap filsafat ilmu sosial emansipatoris, dimana filsafat ilmu sosial fenomenologi dituding oleh filsafat ilmu sosial emansipatoris terlalu berlebihan dalam memerhatikan realitas subjektif, bahkan dikritik sebagai ilmu yang amoral dan pasif, tidak memberikan posisi nilai yang kuat atau dapat secara aktif membantu orang untuk melihat ilusi palsu di sekitar mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupannya (Upe, 2010). Di sinilah, nilai plus bagi tradisi emansipatoris mampu memberikan sebuah pendekatan terbaru dalam ilmu pengetahuan sosial dalam rangka membebaskan manusia yang tertindas sebagai cita-cita dasarnya.

Optimisme yang dicita-citakan oleh tradisi emansipatoris melahirkan sebuah paradigma baru dalam metodologi penelitian sosial yang sering disebut metodologi sosial kritis. Pada hakikatnya tradisi emansipatoris menawarkan sebuah alternatif metodologi ilmu pengetahuan sosial yang berusaha mendialogkan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan, seperti filsafat, teori struktural fungsional, empirisme, transendental, teori kognitif, nilai moral kehidupan, sehingga mencapai sebuah metodologi yang kaya atas ilmu pengetahuan. Hal inilah yang dilakukan oleh Jurgen Habermas sebagai kritiknya terhadap nalar positivisme (empiris-analitis) dan fenomenologi (historis-hermeneutis). Wujud nyata dari aliran emansipatoris adalah tradisi kritis Mazhab Frankfurt sebagai manifestasi dari teori Karl Marx yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas yakni masyarakat sosialisme, sehingga tidak salah jika tradisi Mazhab Frankfurt sebagai Neo-Marxisme. Sederetan nama yang tergabung dalam tradisi Mazhab Frankfurt adalah Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse (sebagai generasi pertama) dan Jurgen Habermas (sebagai generasi kedua) (Hardiman, 2009, Sindhunata, 1983).

Pada prinsipnya, Teori Kritik Mazhab Frankfurt, mencita-citakan sebuah masyarakat yang bebas dari dominasi atau ketertindasan (emansipasi), dalam rangka mencapai sebuah pencerahan. Selain itu, Teori Kritik pula menghubungkan ilmu-ilmu sosial empiris dan interpretatif dengan klaim normative, sehingga menciptakan sebuah teori praksis. Menurut aliran ini, jika manusia pada kehidupan yang bersifat praksis, maka kemungkinan akan mencapai sebuah pencerahan. Praksis diartikan sebagai bentuk moral kegiatan hidup manusia, maka dari itu teori harus bersifat praksis.

Secara metodologis, tradisi ilmu pengetahuan sosial emansipatoris menggunakan metode partisipatoris. Khususnya dalam PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dan yang lainnya (Upe, 2010). Pendekatan ini, menempatkan seorang analisis sosial terjun langsung bersama-sama kelompok masyarakat tertentu yang mendapatkan masalah sosial yang cukup besar dan mau membebaskannya (emansipasi) dan ini sebagai metode terbaru. Pendekatan PRA juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertindak dalam mencapai hal-hal yang lebih baik lagi. Dalam hal ini pemberdayaan dari bawah. Sebagai sebuah metode terbaru, tradisi emansipatoris membuka ruang analisis sebagai gerakan transformasi sosial. Dikatakan demikian, karena selain sebagai metode ilmiah, juga memberikan solusi atas permasalahan sosial yang tengah dihadapi oleh sekelompok masyarakat yang ingin dibebaskan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah dalam beberapa poin yakni sebagai berikut: Pertama, refleksi historis filsafat positivisme dikukuhkan ke dalam filsafat ilmu pengetahuan sosial dan menjadi paradigma tersendiri, ketika Comte sebagai Bapak positivisme menamakan ilmunya yakni sosiologi. Kedua, filsafat fenomenologi dikatakan sebagai metodologi ilmu pengetahuan sosial, ketika positivisme tidak sukses memberikan penjelasan gejala sosial dalam tataran fenomenologis. Ketiga, tradisi emansipatoris lahir sebagai kritik terhadap filsafat positivisme dan fenomenologi yang tidak mampu membebaskan masyarakat yang tertindas (emansipasi) dengan menggunakan dialektika, historikal, dan praksis. Keempat, dinamika kontestasi tradisi filosofis yang mendasari ilmu sosial

berlangsung secara *continue*, dimana tradisi emansipatori lahir sebagai refleksi historis terhadap ketegangan yang dihadapi setiap filsafat dalam menjawab permasalahan kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua

Refleksi Paradigma Sosiologi

Bab 3

Kompleksitas Paradigma Sosiologi

A. Pengantar

Sejak Comte melahirkan sosiologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, maka sejak itu pula sosiologi dianggap sebagai ilmu yang mampu berdiri sendiri di luar dari ilmu pengetahuan alam yang terlebih dulu berkembang. Ia membayangkan sebuah metode ilmu pengetahuan sosial sebagai analisis studi tentang masyarakat dan itu, sosiologi yang menjadi hukum metodologinya. Awalnya, Comte menamakan studi empirisnya tentang masyarakat dengan sebutan fisika sosial (*social physic*). Akan tetapi, nama itu sudah ada yang memakainya, maka ia menamakan studi empirisnya dengan sebutan sosiologi. Menurutnya, sudah selayaknya studi empiris tentang masyarakat dikembangkan di kalangan para ilmuwan sosial. Comte menginginkan kesejajaran ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan alam. Di sinilah cikal bakal metodologi yang digunakan dalam kajian tentang masyarakat memiliki kesamaan dengan metodologi ilmu pengetahuan alam.

Secara historis, sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial telah memenuhi prasarat ilmu pengetahuan pada umumnya, sebab sosiologi bersifat objektif, sistematis, empiris, rasional, dan terukur (Upe, 2010). Seiring perkembangannya, sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial tidak pernah terlepas dari perdebatan yang cukup panjang di kalangannya mengenai tentang apa yang seharusnya dikaji dalam sosiologi. Tidak salah jika, Soekanto pernah menyatakan bahwa sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial itu bersifat ilmu murni dan bukan terapan apalagi ilmu khayalan. Oleh karena itu, klaim Soekanto tersebut, sosiologi tidak pernah terlepas dari kekebalan kritik di kalangan ilmuwan sendiri sepanjang, berbicara mengenai paradigma.

Perbedaan pandangan di kalangan para ilmuwan sosiologi, dapat berdampak pada perbedaan metodologi yang digunakan dalam mengkaji

gejala sosial kemasyarakatan. Karena perbedaan metodologi yang digunakan, maka melahirkan perbedaan teori pula yang berkembang di kalangan ilmuwan sosiologi. Karena sosiologi tidak kebal terhadap kritikan, tentang apa yang seharusnya menjadi pokok kajian sosiologi, maka, di kalangan ilmunya memiliki masing-masing paradigma. Apa yang dimaksud dengan paradigma adalah sebuah pandangan mendasar di kalangan para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok kajian (*subject matter*) pada ilmu. Paradigma berbicara mengenai exemplar-exemplar, metode-metode, teori-teori, serta instrumen di dalamnya. Ada beberapa yang menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan ilmuwan sosiologi tentang apa yang menjadi pokok kajian dalam sosiologi itu sendiri. Pertama, karena dari semula pandangan filsafat yang mendasari pemikiran ilmuwan tentang apa yang semestinya menjadi substansi dari cabang ilmu yang dipelajari itu berbeda. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari pandangan filsafat yang berbeda itu, maka teori-teori yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing komunitas ilmuwan pun berbeda. Ketiga, metode yang dipakai untuk memahami substansi ilmu itu juga berbeda diantara komunitas ilmuwan (Ritzer, 2014).

Konsep paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Kuhn menolak afirmasi yang berkembang di kalangan ilmuwan bahwasanya ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif. Kuhn menyangkal pernyataan tersebut, bahwasanya ilmu pengetahuan berkembang secara revolusi. Bukan secara kumulatif. Selanjutnya, Kuhn melihat ada perdebatan yang sengit di kalangan para ilmuwan sosial. Melihat hal ini, Kuhn menyarankan konsep paradigma ditempatkan sebagai pengetahuan pembedaan di kalangan para ilmuwan tersebut. Akan tetapi, Kuhn tidak menyebutkan konsep paradigma secara spesifik, melainkan ada kurang lebih 21 konsep yang disebutkan mengenai paradigma. Masterman mereduksi 21 konsep paradigma menjadi tiga konsep, yakni paradigma metafisik, paradigma sosiologis, dan paradigma konstruk (Ritzer, 2014).

Berbicara mengenai paradigma dalam sosiologi, dikenal ada tiga paradigma dalam sosiologi yakni paradigma fakta sosial, paradigma

definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Paradigma ini, sering disebut sebagai mainstream ilmu saintifik, sebab di kalangan para penganutnya menempatkan *science* sebagai metodologi yang universal. Artinya, kepada semua lini ilmu pengetahuan dapat diterapkan. Ketiga paradigma tersebut, akan diuraikan secara gamblang dalam bab ini.

B. Paradigma Fakta Sosial

Paradigma ini didasarkan pada filsafat positivisme atau tradisi sosiologi saintifik. Filsafat ilmu sosial positivistik diposisikan sebagai roh dari paradigma fakta sosial karena melihat gejala-gejala sosial yakni fakta empiris-objektif yang benar-benar ada di kalangan masyarakat itu sendiri. Meski demikian, dalam perkembangannya paradigma fakta sosial sesungguhnya ingin memisahkan kajian filsafat dalam bidang ilmu pengetahuan sosial sebagaimana dilakukan oleh Emile Durkheim ke dalam sosiologi. Durkheim, menginginkan sosiologi benar-benar sebagai ilmu pengetahuan yang murni tanpa ada tendensi dari filsafat dan psikologi sebagaimana ditegaskan dalam karyanya *The Rule of Sociological Method* (1895). Apa yang ditandakan oleh Durkheim adalah mau meneliti gejala-gejala sosial yang benar-benar objektif. Durkheim melihat sosiologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang baru lahir mendapatkan ancaman dari kedua reduksi ilmu pengetahuan yang lebih dulu berkembang yakni filsafat dan psikologi. Menurutnya, sosiologi harus dipisahkan kepada kedua ilmu itu, sebab sosiologi hanya sebatas spekulatif belaka jika masih berada dalam kajian filsafat positivisme.

Paradigma fakta sosial menempatkan objek kajian dalam dua bentuk yakni kesatuan yang bersifat material (*material entity*) yaitu barang sesuatu yang nyata ada, sedangkan kesatuan yang bersifat non-material (*non-material entity*) yakni barang sesuatu yang dianggap ada. Sebagian besar fakta sosial ini terdiri dari sesuatu yang dinyatakan sebagai barang sesuatu yang tak harus nyata, tetapi merupakan barang sesuatu (*a thing*) yang ada dalam pikiran manusia atau sesuatu yang muncul di dalam dan di antara kesadaran manusia. Realitas materi dan non-materi ini merupakan realitas yang bersifat intrasubjektif dan intersubjektif.

Fakta sosial yang dimaksud oleh Emile Durkheim adalah fakta yang benar-benar objektif dan berada di luar diri manusia. Menurutnya, fakta sosial adalah cara berpikir, berperasaan, berperilaku dan bertindak manusia yang berada di luar (eksternal) diri manusia dan bersifat memaksa. Dengan konsep ini, fakta sosial (*social fact*) yang dimaksud adalah struktur dan pranata sosial yang berisikan nilai, norma, aturan-aturan, dan inilah yang membentuk seseorang dalam bertindak, berperilaku, dan berperasaan yang bersifat memaksa. Dengan demikian, fokus kajian sosiologi adalah struktur sosial (*social structure*) dan pranata sosial (*social institution*). Struktur sosial merupakan satu kesatuan sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi terorganisir dalam interaksi antar kelompok dan individu. Sedangkan pranata sosial adalah sebuah nilai-nilai, norma-norma, dan aturan yang menjadi pedoman hidup dalam lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan seperti keluarga, ekonomi, agama, pendidikan, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan.

Perhatian utama paradigma fakta sosial terfokus pada hubungan antara struktur sosial, pranata sosial, dan hubungan antar individu dengan struktur, serta hubungan antar individu dengan pranata sosial (Upe, 2010). Paradigma fakta sosial menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan dalam memperoleh data di lapangan, maka paradigma ini menggunakan metode *interview* dan *questioner*. Walaupun *interview* tidak begitu relevan dalam paradigma ini, sebab mengkaji tentang barang sesuatu (*a thing*) yang dianggap nyata, tapi belum dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, paradigma ini lebih tepat menggunakan *questioner* sebagai teknik pengumpulan datanya.

Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan secara filosofi yakni pertama, secara ontologi paradigma fakta sosial menempatkan struktur dan pranata sebagai objek kajian dalam ilmu pengetahuan sosial, tanpa terkecuali sosiologi. Struktur dan pranata sosial dianggap sebagai barang sesuatu (*a thing*) yang nyata ada, tapi tidak dapat dilihat secara langsung, seperti lembaga sosial. Kedua, secara epistemologi paradigma fakta sosial menggunakan teknik *questioner* dalam mencari fakta sosial yang dimaksud tersebut. Dengan tujuan, mengelola data berupa angka-angka ke

dalam analisis statistika. Ketiga, secara Axiologi, paradigma fakta sosial memberikan jarak peneliti dengan objek yang ditelisik, sehingga tidak memperoleh nilai-nilai dalam proses penelitiannya. Singkatnya, paradigma fakta sosial bersifat bebas nilai (*value free*).

Dalam paradigma ini, memiliki beberapa variasi teori yang sesuai dengan objek kajian yang dimaksud yakni fakta sosial, yakni teori struktural fungsional, teori konflik, teori sosiologi makro, dan teori sistem. Hanya, penulis batasi dua teori saja yang sering disinggung yakni teori fungsional dan teori konflik. Karena fakta sosial bersifat eksternal dari manusia itu sendiri, maka konsep dan teori yang dihasilkan bersifat makro. Mengapa demikian? Karena sebuah teori adalah representasi dari realitas fakta itu sendiri. Adapun beberapa teorinya yakni sebagai berikut:

1. Teori Fungsionalisme

Teori ini menekankan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (*equilibrium*). Teori struktural fungsional bersumber dari aliran Darwinisme yang menempatkan teori evolusi-biologis Darwin sebagai kerangka teoritis dalam mengkaji masyarakat. Analisis fungsi dan struktur telah diperkenalkan oleh Comte sejak awal munculnya sosiologi yakni mengkaji tentang struktur sosial dan dinamika sosial (*social dynamic*). Dalam membahas struktur masyarakat, Comte menerima premis bahwa masyarakat adalah laksana organisme hidup, akan tetapi dia tidak benar-benar mengembangkan tesis ini. Adalah Spencer, seorang ahli sosiologi Inggris pertengahan abad ke-19 yang membahas berbagai perbedaan dan kesamaan khusus anatara sistem biologis dan sistem sosial (Poloma, 2013). Pembahasan Spencer tentang masyarakat sebagai organisme hidup dirangkum dalam beberapa butir sebagai berikut:

- a. Masyarakat maupun organisme hidup sama-sama mengalami pertumbuhan.
- b. Disebabkan oleh penambahan dalam ukurannya, maka struktur tubuh-sosial (*social body*) maupun tubuh organisme hidup (*living body*) itu mengalami penambahan pula.

- c. Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun organisme sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu.
- d. Baik di dalam sistem organisme maupun sistem sosial, perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya di dalam sistem secara keseluruhan.
- e. Bagian-bagian tersebut, walau saling berkaitan, merupakan suatu struktur-mikro yang dapat dipelajari secara terpisah.

Dari ciri-ciri yang dikemukakan Spencer tentang organisme hidup adalah bentuk kajian teori fungsional dalam melihat masyarakat. Dapat ditarik sebuah asumsi tentang teori struktural fungsional yakni sebagai berikut: Pertama, masyarakat adalah satu kesatuan sistem sosial. Kedua, memiliki bagian-bagian elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Ketiga, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa pula pada perubahan yang lain. Singkatnya, asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer, 2014). Dengan demikian, para penganut teori ini menganggap secara ekstrim realitas adalah fungsional dari segala lini kehidupan sosial.

Sederetan nama tokoh sosiologi yang tergolong ke dalam teori fungsional diantaranya: Pertama, Auguste Comte (1798-1857), teori yang relevan yaitu statika sosial (*social static*) yang mewakili struktur sosial dan dinamika sosial (*social dynamic*) mewakili perkembangan atau fungsi masyarakat. Kedua, Herbert Spencer (1820-1903), analisa Spencer tentang organisme biologis dan organisme hidup (masyarakat). Menurutnya, baik organisme biologis maupun organisme hidup sama-sama memiliki satu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi. Ketiga, Emile Durkheim (1858-1917) yang melihat masyarakat dalam perkembangannya terbagi menjadi dua yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Selain tokoh-tokoh di atas, ada juga sederetan nama sosiolog yang mengembangkan teori fungsional paradigma fakta sosial dalam konteks modern yakni adalah Talcott Parsons (1902-1979), dengan melihat sebuah sistem agar tetap *survive* maka syaratnya harus memiliki satu kesatuan sistem yang

disebutnya A-G-I-L. Kemudian dilanjutkan oleh Robert K. Merton (1927-1931) tentang fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest.

2. Teori Konflik

Jika teori fungsional menekankan keteraturan sosial (*social order*), maka teori konflik menekankan konflik sebagai salah satu dinamika dalam kehidupan masyarakat. Teori konflik lahir dari pada kritik terhadap teori fungsional yang terlalu berlebihan terhadap keteraturan sosial (*social order*) sehingga sulit mengalami perubahan sosial dalam masyarakat. Singkatnya, teori fungsional dianggap bersifat konservatif. Para penganut teori konflik melihat masyarakat selalu mengalami ketegangan sosial yang berujung pada perubahan sosial itu sendiri, karena itu sering juga disebut sebagai teori revolusioner, sepanjang berbicara perubahan sosial. Teori konflik, dikategorikan ke dalam paradigma fakta sosial karena para penganut teori ini menempatkan kajian struktur sosial (*social static*) dalam segi konfliknya. Dengan demikian, kajian teori konflik pun sama dengan fungsional dalam kategori paradigma fakta sosial, sebab sama-sama melihat barang sesuatu (*thing*) benar-benar ada dalam wujud materi yang nampak sebagai objek dasar dalam paradigma fakta sosial.

Teori konflik dibangun atas dasar penentang teori fungsionalisme. Oleh karena itu tidak mengherankan jika proposisi yang dikemukakan sangat berseberangan dengan fungsionalisme struktural. Kaum fungsionalisme struktural melihat masyarakat berada pada dalam kondisi yang bergerak secara statis dalam kondisi keseimbangan (*equilibrium*), maka menurut tokoh konflik melihat masyarakat sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya (Ritzer, 2014). Kalau fungsionalisme struktural melihat setiap elemen atau unsur dalam kehidupan masyarakat mendukung stabilitas sosial (*social stability*), sementara penganut teori konflik melihat setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi atau disosiatif. Asumsi dasar teori konflik adalah struktur dalam masyarakat berada pada ketegangan dan mengakibatkan konflik, sehingga terjadi sebuah perubahan sosial. Tokoh yang terkenal adalah Karl Marx dan dilanjutkan oleh Ralf Dahrendorf,

Lewis A. Coser, Randall Collins, dan masih banyak yang lainnya.

Secara paradigma, sangat tepat jika teori konflik ditempatkan ke dalam paradigma fakta sosial. Pasalnya, teori ini melihat struktur sosial dalam keadaan tidak stabil atau bertentangan. Tesisnya adalah distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata menjadi sebuah faktor terjadinya sebuah konflik secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah sebagai salah satu tanda dari adanya posisi dalam masyarakat. Singkatnya, perbedaan struktur sosial masyarakat akan menjadi faktor utama konflik dalam masyarakat. Perbedaan posisi itulah yang menjadi dasar objek kajian para sosiolog menurut teori konflik dan itu menjadi salah satu konsep paradigma fakta sosial.

Sampai di sini, dapat dipahami bahwa teori konflik sangat berseberangan teori fungsionalisme struktural dalam melihat realitas sosial. Selain itu, analisa fungsionalisme lemah dalam melihat perubahan sosial. Hal ini tidak salah jika Parsons sebagai salah seorang penganut fungsionalisme struktural mendapatkan serangan kritikan terhadap teorinya yang tidak mampu menjelaskan perubahan sosial. Terlepas dari permasalahan itu, baik fungsionalisme struktural maupun struktur konflik sama-sama dalam kategori kajian paradigma fakta sosial. Karena kedua-duanya melihat masyarakat dalam kajian struktur dan pranata sosial sebagai barang sesuatu (*thing*) yang benar-benar nampak di permukaan.

Dalam perkembangannya, teori konflik tidak terlepas dari berbagai macam pandangan yang berbeda-beda di kalangan penganutnya, walaupun sama melihat masyarakat dari segi analisa konflik. Sederetan nama tokoh sosiolog yang menganut teori konflik yakni, Pertama, Karl Marx menganalisis masyarakat dengan struktur kapitalisme awal yakni masyarakat borjuis dan masyarakat proletar. Kedua struktur ini sama-sama menginginkan materi sehingga saling bertentangan satu dengan yang lain kemudian berujung pada masyarakat tanpa kelas yakni sosialisme. Kedua, Ralf Dahrendorf dengan konsep konflik otoritas kepentingan. Menurutnya, bukan kepemilikan sebagai faktor pembentukan kelas sosial melainkan struktur otoritas yang membentuknya. Singkat, struktur otoritas dapat mengakibatkan konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan. Ketiga,

yang tergolong juga sebaga peletak dasar sosiologi konflik adalah Lewis Alfred Coser (1913). Tokoh yang satu ini, unik dalam analisa struktur konflik dalam masyarakat. Jika, pandangan sosiolog awal melihat konflik dari segi negatifnya, maka ilmuwan yang satu ini melihat konflik dari segi positif. Menurutnya, konflik memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, analisis konflik Coser dikenal dengan istilah fungsionalisme konflik. Singkatnya, dalam pandangan Coser konflik bagian dari masyarakat, konflik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sehingga lebih penting untuk dijelaskan ketimbang konsensus.

C. Paradigma Definisi Sosial

Dalam kajian sosiologi sebagai cabang ilmu sosial tidak terlepas dari refleksi para penganutnya, sehingga menimbulkan sebuah paradigma kedua yakni paradigma definisi sosial. Paradigma definis sosial sebagai kritik terhadap paradigma awal yakni fakta sosial. Paradigma ini menempatkan subjek sebagai pencipta sejarahnya, sehingga memosisikan individu sebagai aktor yang bebas lagi kreatif, bukan pada aktor yang sepenuhnya diatur oleh nilai-nilai, norma-norma, dan aturan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Durkheim.

Exemplar paradigma definisi sosial dikemukakan pertama kali oleh Max Weber dalam analisisnya tentang tindakan sosial (*social action*). Menurutnya, objek kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan subjektif individu sepanjang tindakan itu memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Weber melihat masyarakat sama dengan Durkheim selama mengkaji fakta sosial. Akan tetapi, Weber tidak memisahkan individu dan struktur atau lembaga, melainkan struktur sosial dan lembaga sosial tersebut membantu tindakan sosial individu yang penuh arti dan makna itu. Mempelajari pranata sosial tanpa memperlihatkan tindakan manusianya berarti mengabaikan segi-segi prinsipil dari kehidupan sosial (Anwar dan Adang, 2013). Hal ini menandakan individu sebagai aktor dalam hal pembentukan sejarahnya yang terjadi secara dialektis antara subjektif dengan materi yang berada diluar dirinya (pranata) sosial.

Paradigma definisi sosial sebagaimana Weber sebagai peletak dasarnya adalah sebuah analisa sosial yang mengkaji aktor dalam bertindak. Dengan demikian, strukturnya adalah tindakan sosial yang penuh arti dan makna. Jika demikian, maka objek paradigma definisi sosial adalah makna sosial yang terkandung dalam tindakan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang sosiolog yang menganut paradigma ini harus mampu membongkar makna-makna sosial yang telah diciptakan oleh individu dari proses tindakannya. Paradigma definisi sosial menempatkan interpretasi dalam metodologi kajiannya, secara khusus Weber menyebutnya dengan istilah *verstehen*. Klaim metodologi tersebut merupakan representasi dari roh filsafat fenomenologi. Artinya, para penganut paradigma definisi sosial, secara reflektif bersumber dari filsafat fenomenologi sebagai roh atau dasar filsafatnya, sebab sangat mengedepankan sebuah teknik memahami (interpretasi) dalam melihat gejala sosial yang terjadi. Selain itu, paradigma definisi sosial menurut perkembangannya, dipengaruhi oleh hermeneutik yang mengedepankan sebuah historisitas dari subjek yang bertindak.

Paradigma definisi sosial sebagai salah satu paradigma sosiologi, tidak melihat manusia dalam hidup keterpaksaan oleh struktur dan pranata yang ada, melainkan manusia berada pada proses interaksi antara struktur dan pranata yang ada. Dengan istilah manusia dibantu dalam bertindak oleh pranata yang berisikan nilai-nilai dan norma. Oleh karena itu, ada proses pertimbangan manusia dalam bertindak, sehingga sampai pada konsep yang bersifat rasional. Proses interaksi itulah yang memunculkan berbagai macam makna-makna sosial yang berkembang. Bahkan para penganut paradigma ini mengatakan gejala sosial disebabkan oleh makna sosial yang diciptakan manusia itu sendiri. Lebih lanjut Weber sebagai tokoh utama paradigma ini menegaskan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai ilmu yang mencoba memahami apa yang dipahami (*understanding of understanding*). Jika, tindakan sosial melahirkan sebuah makna sosial yang sangat subjektif itu, maka harus membutuhkan analisa ilmiah untuk mengetahui tindakan sosial yang penuh arti dan makna itu. Oleh karena itu, sifat intersubjektif dalam

paradigma definisi sosial sangat tepat, sehingga menghasilkan metodologi ilmu yang bersifat ideografik.

Paradigma definisi sosial memiliki beberapa varian teori yang terkandung didalamnya, diantaranya teori tindakan (*action theory*), teori interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*), dan teori fenomenologi (*phaenomenology*). Ketiga teori ini jelas mempunyai perbedaan, tetapi juga memiliki beberapa kesamaan dalam faktor yang menentukan tujuan penyelidikannya serta gambaran tentang pokok persoalan sosiologi. Ketiga teori ini memiliki kesamaan ide dalam pandangannya tentang manusia. Menurutny, manusia merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Kesamaan yang lain adalah berpendirian bahwa realitas atau gejala sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, nilai, kebiasaan, dan semuanya yang tercakup dalam konsep fakta sosial. Manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol dari fakta sosial itu. Ketiga teori tersebut disajikan secara singkat sebagai berikut:

1. Teori Aksi (*Action Theory*)

Teori aksi mencoba untuk melihat konsep *verstehen* dari Weber, para penganut teori ini memandang individu yang mengalami dinamika, kreativitas, jiwa kesukarelaan. Mereka mencoba menempatkan dirinya pada posisi sang aktor. Teori aksi yang diperkenalkan oleh Weber menekankan pada tindakan subjektif yang penuh arti (*subjective meaning*). Tindakan penuh arti ini bersumber dari individu sepanjang tindakan itu bermakna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Menurut Ritzer (2014) beberapa asumsi fundamental teori aksi yang dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parson sebagai berikut:

1. Tindakan sosial muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
2. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur,

metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang akan dilakukan.
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif seperti metode *verstehen*, imajinasi, *sympathetic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*).

Berdasarkan asumsi teori aksi di atas, menegaskan bahwa perilaku atau tindakan seseorang bersumber dari hasil suatu keputusan subjektif aktor. Parsons lebih memilih menggunakan kalimat *action* dari pada *behavioral*. *Action* menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas, dan proses penghayatan individu. Sedangkan *behavior*, merujuk pada mekanisasi antara perilaku (*respon*) dengan rangsangan dari luar (*stimulus*). Ada beberapa tokoh yang mengembangkan teori aksi (*action theory*) yakni sebagai berikut: Pertama, Florian dalam karyanya *The Method of Sociology* (1934) dan *Social Action* (1936). Kedua, Robert M. Mac Iver dalam Karyanya *Sociology: Its Structure and Change* (1931). Ketiga, Talcott Parsons, *The Structure of Social Action* (1937). Keempat, Max Weber dalam karyanya *Tindakan Sosial (Social Action)*.

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interkasionisme simbolik sebenarnya merupakan lanjutan teori aksi. Teori ini menganggap teori aksi mengalami kemacetan saat melihat perilaku manusia yang berorientasi makna. Menurutnya, teori aksi hanya teori yang kosong tanpa melihat simbol-simbol yang melakukan tindakan yang penuh arti itu. Teori interaksionisme simbolik sangat dipengaruhi oleh kedua tokoh filsuf yakni John Dewey dan Charles Horton Cooley. Kedua tokoh ini yang pertama kali memakai istilah interaksionisme simbolik ke dalam teorinya. Teori interaksionisme simbolik

berkembang di kalangan para penganutnya di Universitas Chicago, sehingga teori ini dinamakan aliran Chicago. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Herbert Blumer dalam kategori modern. Blumer sangat dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Mead yang juga salah seorang tokoh interaksionisme simbolik.

Menurut Mead dalam analisa tentang psikologi sosial menempatkan individu sebagai aktor yang aktif, sehingga ada proses akan jadi, ke-timbang sesuatu yang sudah lengkap. Artinya bahwa tindakan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh diri dan lingkungan sosialnya. Ini adalah proses dialektis antara diri dan lingkungan sosial. Diri akan berkembang ketika seseorang mengambil peran orang lain. Dalam proses ini, diri akan menyadari dirinya sendiri yang disebabkan oleh lingkungan sosialnya. Misalnya, anak kecil bermain mobil-mobilan tidak perlu mesti menyadari orang lain. Akan tetapi, ketika anak itu dalam proses pertandingan maka dia akan mempertimbangkan orang lain. Ini mendakan bahwa diri itu selalu berbanding lurus dengan lingkungan sosial. Artinya dia mempertimbangkan apa yang dia akan lakukan ketika interaksi terjadi.

Terlepas dari itu, Blumer mengembangkan analisa psikologi sosial Mead ke dalam interaksi yang dipengaruhi oleh simbol-simbol. Bagi Blumer (1969), interaksionisme simbolik tertumpu pada tiga premis (Poloma, 2013) yakni sebagai berikut:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dan interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Blumer menyatakan interkasi manusia dijembatani oleh simbol-simbol. Oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan orang lain (Poloma, 2013). Konsep ini didasarkan bahwa kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh simbol-simbol dalam berinteraksi, sebab manusia saling membatasi melalui penafsiran pada saat berinteraksi. Pembatasan itu yang ditafsirkan adalah simbol.

3. Teori Fenomenologi

Fenomenologi selain sebagai filsafat ilmu dan metodologi, ia juga dikatakan salah satu teori yang berkembang di kalangan paradigma definisi sosial. Tidak salah jika paradigma definisi menempatkan salah satu filsafat fenomenologi sebagai teori. Persoalan pokok yang dibahas dalam teori ini adalah sebuah pembentukan gejala masyarakat. Alfred Schutz sebagai salah seorang penganut teori ini tidak jauh berbeda dengan tindakan sosial Weber. Dimana berpendirian bahwa tindakan manusia dapat menjadi sebuah hubungan sosial ketika orang lain memberikan makna dan arti tindakan itu. Pemahaman secara subjektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahami serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksud oleh aktor (Ritzer, 2014).

Schutz mengkhhususkan perhatiannya satu bentuk dari subjektivitas yang disebutnya: antar subjektivitas. Konsep ini merujuk pada suatu pemahaman pemisahan subjektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Terlepas dari persoalan itu, teori fenomenologi tetap pada analisa gejala individu yang menciptakan makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Lebih jauh, teori ini menempatkan proses interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah proses saling memahami antar hubungan seseorang dalam baik lingkungan kecil maupun organisasi.

Ada beberapa unsur pokok dari teori ini yakni: Pertama, perhatian terhadap aktor. Hal ini berbicara masalah metodologi. Bagaimana memahami makna yang diciptakan oleh aktor yang bertindak itu, atau lain perkataan, memahami makna tidak seharusnya memahami secara realitas faktual, sebab aktor juga sebagai penghasil dan pencipta sejarahnya sendiri. Kedua, memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*). Ketiga, memusatkan kepada masalah yang mikro. Keempat,

memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan.

Dengan demikian, teori fenomenologi mengkaji masyarakat dalam konteks aktor yang kreatif sebagai pencipta sejarahnya atau keadaan serta gejala sosial yang ada. Sebagai seorang ilmuwan fenomenologi harus mampu memahami proses penciptaan itu dengan melihat makna sosialnya. Sederatan tokoh yang terbilang populer dalam pengembangan teori fenomenologi adalah Alfred Schutz, Weber, Husserl, Dilthey, dan masih banyak lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan ke dalam bentuk filosofi yakni sebagai berikut, Pertama, secara ontologis, paradigma definisi sosial mengkaji masyarakat yang dilihat dari hasil ciptaan individu-individu dalam tindakannya yakni makna sosial. Tugas para penganut paradigma ini harus menangkap makna yang telah dihasilkan dari tindakan manusia itu. Kedua, secara epistemologi. Paradigma definisi sosial menggunakan teknik observasi dan interview dalam memahami hakikat ontologi yang dikajinya dengan menggunakan metode *verstehen*. Ketiga, secara aksiologi, maka didapatkan bahwa paradigma ini bersifat bermuatan nilai (*value laden*) karena sikap peneliti harus meminimalisir jarak dengan objek kajiannya.

D. Paradigma Perilaku Sosial

Paradigma ini menempatkan objek kajian sosiologi pada perilaku sosial yang dipengaruhi oleh struktur dan pranata sosial secara berulang-ulang. Menurut penganut paradigma perilaku sosial seharusnya objek kajian sosiologi adalah yang konkret-realistis. Jika paradigma fakta sosial, menekankan nilai, norma dan aturan dalam pembentukan tindakan individu, sementara paradigma definisi sosial menempatkan individu pada kebebasan dalam bertindak, maka berbeda dengan paradigma perilaku sosial yang dimana menempatkan individu pada tindakannya di atas kontrol nilai secara berulang-ulang. Dengan demikian, paradigma ini memosisikan individu tidak sepenuhnya bebas bertindak dan tidak sepenuhnya juga dikontrol oleh pranata, melainkan individu bertindak karena adanya nilai yang terjadi secara berulang-ulang dan membentuk sebuah pola. Singkat-

nya, paradigma ini melihat gejala sosial yang berupa konkret-realistis berupa perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya.

Paradigma perilaku sosial sangat dipengaruhi oleh filsafat behaviorisme, dimana B.F. Skinner sebagai salah seorang tokohnya. Menurutnya, paradigma fakta dan definisi sebagai objek kajian sosiologi masih berada pada spektrum mistik. Artinya fakta dan definisi diartikan sebagai barang sesuatu yang belum nampak di permukaan, sebab pranata dan struktur objek fakta sosial benar adanya, tapi belum menjadi barang sesuatu yang nampak. Sedangkan pemikiran manusia berupa tanggapan kreatif terhadap sesuatu rangsangan dari luar dirinya yang menjadi objek kajian definisi sosial belum dikatakan sebagai barang sesuatu yang konkret-realistis.

Pada dasarnya ide tentang paradigma ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial, sehingga secara ekstrim paradigma perilaku sosial dengan kedua paradigma lainnya mempunyai perbedaan yang tidak dapat terelakkan. Paradigma ini lebih memusatkan diri pada perhatian tentang hubungan antar-individu dan hubungan individu dengan lingkungannya. Singkatnya, paradigma ini merupakan studi tentang hubungan antar individu dengan objek sosial dan hubungan antara individu dengan objek non sosial (Upe, 2010).

Secara konseptual paradigma perilaku sosial dengan kedua paradigma lainnya yakni, pada paradigma fakta sosial aktor dalam melakukan tindakannya dipaksakan oleh struktur dan pranata yang berisikan nilai, norma dan aturan-aturan. Sedangkan pada paradigma definisi sosial menempatkan aktor dalam kreativitas berindak dan tidak sepenuhnya diatur oleh nilai-nilai, norma dan aturan apa lagi memaksanya. Kemudian pada paradigma perilaku sosial, menempatkan aktor tidak sepenuhnya bebas dalam memberikan tanggapan yang diberikan oleh ketentuan sifat dasar stimulus yang datang dari luar secara berulang-ulang. Jadi tindakan aktor itu sangat bersifat mekanistik.

Secara metodologis, paradigma perilaku sosial boleh saja menggunakan questioner, interview, dan observasi. Akan tetapi, paradigma ini lebih tepat jika menggunakan eksperimen karena dengan metode

eksperimen peneliti dapat mengamati secara langsung perilaku sosial yang kemungkinan terjadi berulang. Selain itu, metode eksperimen memiliki keutamaan bagi para peneliti untuk mengontrol secara ketat oleh objeknya. Hal ini menegaskan bahwa paradigma perilaku sosial menempatkan metode empirisme dalam melihat gejala sosial. Walaupun kajiannya sangat dipengaruhi oleh behavioral, akan tetapi semua itu hanya bisa diperoleh melalui pengamatan empirisme sehingga mendapatkan realitas yang konkret dan bersifat objektif. Ada beberapa varian teori yang terkandung dalam paradigma perilaku sosial yakni, teori sosiologi perilaku (*behavioral sociology*), dan teori pertukaran (*exchange theory*).

1. Teori Sosiologi Perilaku

Teori sosiologi perilaku (*behavioral sociology theory*) adalah sebuah psikologi perilaku yang dimasukkan ke dalam sosiologi. Fokus kajian teori ini kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Akibat, tingkah laku itu diperlakukan sebagai variabel independen. Ini berarti tingkah laku yang dianalisis itu melalui akibat-akibat yang mengikutinya kemudian. Singkatnya teori ini menjelaskan analisa tingkahlaku yang terjadi sekarang dengan akibat-akibatnya tingkahlaku yang akan terjadi ke depannya. Dengan mengetahui apa yang diperoleh tingkah laku di masa lalu akan dapat diketahui apa yang akan aktor lakukan di masa sekarang ini apakah aktor mengulangnya dalam situasi sekarang. Ini salah satu proposisi dari teori tersebut.

Konsep inti dari teori ini adalah ganjaran (*reward*). Ganjaran diartikan sebagai sesuatu faktor yang mengakibatkan sehingga seseorang melakukan tindakannya secara berulang-ulang. Perulangan tingkahlaku akan terjadi ketika seseorang mendapatkan sebuah ganjaran (*reward*). Perulangan dirumuskan dalam pengertiannya terhadap aktor. Sesuatu ganjaran yang tidak membawahi pengaruh terhadap aktor tak akan diulang. Inilah menjadi rujukan proposisi dari teori sosiologi perilaku.

2. Teori Pertukaran (*Exchange Theory*)

Teori pertukaran atau dikenal dengan *exchange theory* adalah salah satu teori sosiologi dalam paradigma perilaku sosial. Dikatakan demikian,

karena teori ini menganalisis perilaku sosial dalam reduksionisme psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori pertukaran adalah G. C. Homans. Pandangannya sebagai penyeringan terhadap pandangan Durkheim tentang *emergence*. *Emergence* diartikan di sini sebagai ganjaran (*reward*) atau hadiah sebagai sesuatu yang menjadikan faktor utama terjadinya perulangan perilaku aktor dalam bertindak. *Emergence* digunakan dalam teori pertukan sosial Homans sebagai landasan untuk menjelaskan perilaku perulangan yang terjadi pada setiap aktor.

Pandangan teori pertukaran yang dimaksudkan oleh Homans adalah seseorang bertindak karena ada tujuan tertentu. Tujuan inilah yang memiliki pertimbangan perulangan yang terjadi dari proses tindakan itu. Dengan kata lain, selama proses interaksi berlangsung seseorang bertindak karena kemungkinan perulangan yang terjadi. Perulangan diartikan sebagai perilaku yang disebabkan oleh ganjaran dan menghindari sebuah hukuman.

Menurut Homans dalam analisis teori pertukaran sosial terjadi sebuah konsep resiprositas. Ini berarti seseorang bertindak karena adanya ganjaran dan menghindari hukuman yang terjadi secara berulang-ulang. Teori pertukaran sosial itu dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi elementer, dimana orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalanya berharap memperoleh barang dan jasa yang diinginkan (Poloma, 2013). Ahli teori pertukaran memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi, pertukaran terjadi tidak selamanya diukur dengan uang, melainkan berupa non-materi berupa pujian, kasih sayang, menghormati dan lainnya.

Dengan demikian, dapat diartikan teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Homans adalah teori sosiologi yang mencoba mereduksi psikologi perilaku dan ekonomi elementer ke dalam interaksi sosial itu sendiri. Artinya bahwa seseorang berinteraksi saling berhubungan timbal balik untuk memenuhi segala kebutuhannya baik fisik maupun non fisik. Jika seseorang telah terpenuhi kebutuhannya secara tidak langsung dia akan mencoba melakukan tindakan yang serupa. Disinilah yang dimaksud

dengan pertukaran sosial.

Dari uraian di atas, mengenai sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda sebuah tinjauan sintesa Ritzer adalah sebuah kepastian exemplar dalam melihat sosiologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial memiliki tiga paradigma yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Exemplar paradigma dalam sebuah ilmu pengetahuan diartikan sebagai kajian tentang, metodologi, teori-teori, dan instrumen apa yang dipakai dalam ilmu pengetahuan tersebut tanpa terkecuali sosiologi. Paradigma sosiologi yang telah dipaparkan di atas bukanlah sesuatu yang finish. Artinya bahwa perkembangan sosiologi ke depan tidak hanya terbatas pada tiga paradigma saja, melainkan banyak paradigma. Hal serupa yang dikatakan Ritzer sendiri sosiologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial tidak kebal dengan kritikan metodologi, sehingga melahirkan banyak paradigma atau istilahnya *multiple paradigm*.

Dalam pembahasan tentang exemplar tiga paradigma yang telah diulas di atas, memberikan sebuah kesimpulan. Pertama, dari segi konsep, paradigma fakta sosial menekankan pentingnya sebuah analisa struktur dan pranata sosial sebagai objek kajian sosiologi, sebab itu menjadi barang sesuatu yang benar-benar ada, sehingga para penganutnya menempatkan analisa metodologis ilmiah ke dalam sosiologis. Sedangkan paradigma definisi sosial mengkaji masyarakat dilihat dalam konteks yang lebih menekankan pada kenyataan sosial yang bersifat subjektif lebih dari eksistensinya yang terlepas dari individu. Apa yang dikaji dalam paradigma definisi sosial adalah barang sesuatu yang bersifat fleksibel yakni makna sosial, maka dari itu menempatkan konsep memahami (*verstehen*) dalam memperoleh data makna sosial itu. Sedangkan paradigma perilaku sosial pada hakikatnya menjelaskan konsep tentang gejala sosial yang konkret-realistik. Apa yang dimaksudkan adalah perilaku sosial yang kemungkinan terjadi perulangan yang disebabkan oleh ganjaran dan menghindari hukuman. Individu diibaratkan sebuah mesin mekanik yang terjadi secara berulang-ulang, sehingga menempatkan eksperimen dalam kajiannya.

Kedua, dari segi teori paradigma fakta sosial berbicara mengenai struktur sosial dan pranata sosial, maka teorinya tidak jauh beda dengan konsepnya yakni teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Sedangkan paradigma definisi sosial memiliki beberapa varian teori yakni, teori aksi, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Sementara paradigma perilaku memiliki teori sebagai berikut, teori *behavioral sociology*, dan teori pertukaran sosial (*exchange theory*). Ketiga, dari segi metodologi paradigma fakta sosial menggunakan metodologi *interview* dan kuesioner. Sedangkan paradigma definisi sosial menggunakan metodologi interpretasi (*verstehen*). Sementara paradigma perilaku sosial menggunakan metodologi dalam kajiannya yakni eksperimen dan bisa juga kuesioner. Ketiga paradigma sosiologi yang disintesa Ritzer tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tiga paradigma dalam sosiologi menurut sintesa Ritzer

Tokoh	Paradigma		
	Fakta Sosial	Definisi Sosial	Perilaku Sosial
	Emile Durkheim	Max Weber	B.F. Skinner
Konsep penting	Pentingnya sebuah analisa struktur dan pranata sosial sebagai objek kajian sosiologi, sebab itu menjadi barang sesuatu yang benar-benar ada. Penyelidikan berada pada dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu lainnya.	Mengkaji masyarakat dilihat dalam konteks yang lebih menekankan pada kenyataan sosial yang bersifat subjektif lebih dari eksistensinya yang terlepas dari individu. Kajian paradigma definisi sosial menekankan pada sesuatu yang bersifat fleksibel dan penuh makna.	Menjelaskan gejala sosial yang konkret-realistik, yaitu perilaku sosial yang kemungkinan terjadi perulangan yang disebabkan oleh gangguan dan menghindari hukuman. Individu diibaratkan sebuah mesin mekanik yang terjadi secara berulang-ulang.
Teori-teori	- Struktural - Fungsional - Konflik	- Aksi (<i>action</i>) - Interksionisme Simbolik	- <i>Behavioral Sociology</i> - Pertukaran

	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem - Makro Sosiologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomenologi 	Sosial (<i>Sociologi Exchange</i>)
Metodologi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Quesioner</i> - <i>Interview</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - <i>Interview</i> 	- Eksperimen

Sumber: Diadaptasi dari George Ritzer (2014).

Bagian Ketiga

Cikal Bakal Sosiologi Kritis

Bab 4

Filosofi Teori Kritis Mazhab Frankfurt

A. Pengantar

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial, telah menempatkan berbagai macam para komunitas ilmuwan yang senantiasa tidak puas dengan exemplar dalam ilmu sosial. Ada yang senantiasa berada pada payung filsafat positivisme, dan ada juga yang senantiasa berada di bawah payung filsafat fenomenologi. Kedua filsafat ini tengah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mengalami jalan buntu dengan mendasarkan diri pada saintisme sehingga mengembangkan ilmu untuk ilmu, tanpa mau keluar dari kungkungan dominasi yang senantiasa menindas.

Menyoal hal itu, kritik tajam dialamatkan pada teori tradisional (positivisme) oleh tradisi emansipasi atau dikenal dengan Teori Kritis mazhab Frankfurt yang akan dibahas dalam bab ini. Dimana Teori Kritis tidak sepaham dengan teori tradisional (positivisme). Mereka mengatakan teori tradisional sangat mandul terhadap kehidupan praksis manusia. Oleh sebab itu, mereka sangat mengecam aliran positivisme yang mendominasi cara berpikir manusia modern saat ini. Yang tak kalah pentingnya adalah mereka mengatakan bahwa cara berpikir manusia modern adalah sama persisnya cara berpikir manusia mitos. Dengan kata lain, modernitas adalah mitos. Adalah Horkheimer salah seorang tokoh Teori Kritis yang paling mengecam cara berpikir positivisme. Menurutnya, cara berpikir positivisme yang mengakibatkan manusia modern kembali pada mitos.

Teori Kritis Mazhab Frankfurt (Frankfurt School) menempatkan dirinya sebagai Teori Kritik masyarakat. Mereka beranggapan terjadinya manusia mitos dalam masyarakat modern adalah bentuk ketidaksadaran masyarakat yang ditindas secara halus. Artinya, masyarakat modern tidak sadar bahwa mereka telah ditindas oleh manipulasi sistem, sehingga mem-

butuhkan sebuah “obat” dalam pembebasan ketertindasan itu. Kendati berada dalam keterpaksaan, manusia modern tetap menjalankan hidupnya sebagaimana mestinya. Klaim Teori Kritis terhadap keadaan masyarakat itu, sangat tepatlah jika mereka diposisikan sebagai tradisi aliran ilmu sosial emansipatoris karena gagasan yang diungkapkan adalah sebuah cita-cita pembebasan kaum tertindas dalam bentuk kepedulian dan politis terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Nuansa Teori Kritik Mazhab Frankfurt sangat dipengaruhi oleh tradisi filsafat Marxisme. Marx sangat mengecam sistem kapitalisme yang menyebabkan kesengsaraan masyarakat karena adanya kepemilikan alat produksi. Marx mencita-citakan sistem sosialisme dimana hak-hak masyarakat dapat terpenuhi akibat tidak adanya kepemilikan melainkan kesetaraan hak di dalam masyarakat sosialis. Kendati, Teori Kritis Mazhab Frankfurt masih sangat dipengaruhi tradisi Marxisme (Neo-Marxisme), akan tetapi para penganutnya tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Marxisme, melainkan sebagian ajarannya ditinggalkannya. Hal ini, menjadi tradisi emansipasi dalam Teori Kritis Mazhab Frankfurt, karena sangat mencita-citakan kesamaan hak dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada yang ditindas dalam masyarakat, melainkan sebuah pembebasan dari segala dominasi sistem baik yang halus maupun yang nampak di permukaan.

Cara pemikiran Mazhab Frankfurt dikenal pula dengan istilah Teori Kritik Masyarakat (*eine Kritische Theorie der Gesellschaft*). Maksudnya adalah teori itu membebaskan manusia dari segala manipulasi teknokrasi modern. Teori Kritis Mazhab Frankfurt dalam cita-cita emansipasinya, ditemukan dua kemungkinan yang ingin dicapainya. Pertama, emansipasi dalam ruang filosofi dan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan Kritik Ideologi. Kedua, emansipasi dalam ruang praksis masyarakat yang ditandai dengan partisipatori masyarakat tertentu dalam mencapai pencerahan. Franz Magnis dalam pengantar buku Dilema Usaha Manusia Rasional (Shindunata, 1982) mengatakan bahwa ciri khas Teori Kritik Masyarakat ialah bahwa yang dikritik itu bukan kekurangan-kekurangan di sana-sini, melainkan keseluruhannya. Teori kritis membuka irasionalitas daripada

pengandaian-pengandaian sistem yang ada. Membuka bahwa sebenarnya produksi tidak untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan kebutuhan manusia diciptakan, dimanipulasi demi produksi. Dan Teori Kritis berharap bahwa rasionalitas semu sistem itu sudah sobek, mematahkan belenggu dan membebaskan pada kemanusiaannya yang sebenarnya. Apa yang diungkapkan oleh Suseno adalah Teori Kritik Mazhab Frankfurt mau menyadarkan masyarakat dengan kesadaran kritisnya bahwa dia ditindas oleh hasil ciptaannya sendiri, sehingga yang tadinya rasional berubah menjadi irasional.

Dalam tradisi emansipasi, Mazhab Frankfurt menempatkan rasio manusia sebagai alat pencerahan, bukan pada masyarakat proletar yang sebagaimana Marx katakan (Hardiman, 2009). Hal ini berarti kajian Teori Kritik Mazhab Frankfurt melampaui ajaran Marxisme ortodoks, sehingga tepat jika mereka dikatakan sebagai pemikir Neo-Marxisme. Untuk memahami dasar pemikiran Teori Kritis Mazhab Frankfurt, maka dalam bab ini diuraikan refleksi historis dan refleksi filosofis Mazhab Frankfurt,

B. Refleksi Historis Teori Kritis Mazhab Frankfurt

Secara historis, pemikiran Teori Kritis lahir dari proses sejarah yang panjang yang ditandai dengan adanya gerakan-gerakan buruh Jerman, kemudian sampai pada Perang Dunia I, sampai pada proses gerakan buruh di luar Jerman. Peristiwa ini hanya sebagai bagian dari lahirnya pemikiran Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Dalam konteks pemikiran, Teori Kritik lahir sebagai proses penyegaran dari ajaran Karl Marx, dimana Marx menginginkan sebuah teori bersifat praksis dalam kehidupan masyarakat. Marx mengajarkan bahwa perkembangan masyarakat kapitalis akan berjalan sedemikian rupa sehingga sistem ini akan menuju penghancuran diri oleh dirinya sendiri. Marx, sangat percaya bahwa sistem kapitalisme yang dinyatakan sebagai sistem yang paling bobrok di zamannya, karena telah menguras hak-hak kaum buruh, akan hancur secara alamiah mengikuti hukum-hukum alam atau hukum ekonomi kapitalisme.

Ajaran tersebut dipopulerkan salah seorang sahabatnya yakni Friedrich Engels yang kemudian diterima sepenuhnya di kalangan gerakan

buruh Jerman, dengan Partainya Sosial Demokrat Jerman. Dalam kongresnya di Erfurt tahun 1891, gerakan yang pada waktu itu merupakan gerakan buruh terbesar di Eropa, semua itu menerima pandangan Marx sebagai pendasaran Partai mereka. Pengaruh luas gerakan ini ditandai dengan Internasionale II telah menyebabkan teori Marx diterima di kalangan gerakan buruh di luar Jerman, termasuk Partai Sosial Demokrat Rusia di mana Lenin sebagai penggeraknya.

Persoalan pandangan Marx tentang perkembangan kapitalisme di Eropa menjadi sebuah pendasaran resmi di kalangan gerakan buruh internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa ajaran Marx (determinisme ekonomis) telah merasuk dalam jiwa sanubari di kalangan para buruh di era kapitalisme awal. Uraian determinisme ekonomi adalah gambaran tentang kapitalisme dimana sistem kapitalisme akan terus mengisap kaum buruh dan sementara itu terjadilah konsentrasi modal di tangan kaum kapitalis yang menyebabkan makin membengkaknya jumlah anggota kelas proletar. Sampai pada titik kritis tertentu, sistem kapitalis ini akan ambruk dengan sendirinya dan segera akan digantikan sistem yang baru, yakni sistem sosialisme, dimana kekuasaan terletak di tangan kaum proletar atau kaum buruh. Pandangan ini, dipercayai sebagai sejarah masyarakat berjalan menurut keniscayaan hukum alam dan ekonomis (Hardiman, 2009). Pandangan ini telah dibekukan sebagai ideologis oleh gerakan buruh Internasionale II. Tafsiran ini tak lain sebagai penafsiran positivistik ajaran Marx dalam *Das Kapital*. Tafsiran ini tentunya telah melenyapkan peran sejarah kelas proletariat atau kaum buruh, sebab anggapannya adalah sistem sosialis akan datang dengan sendirinya secara otomatis dengan kepastian alamiah.

Ajaran tersebut menjadi sebuah utopia belaka. Artinya, ramalan ilmiah itu tidak pernah terjadi hingga Perang Dunia I. Konflik kelas yang diidamkan tidak pernah terjadi dan kedatangan zaman baru, era sosialisme juga tidak dapat diharapkan lagi. Di bawah kendali iklim “stalinisasi”, membuat ajaran Marx makin merebak dan terkontrol, diskusi terbuka di kalangan akademisi mengenai ajaran Marx tidak dimungkinkan. Di bawah kontrol dan sensor para cendekiawan mengenai kritis terhadap ajaran

Marx sangat dicurigai, sehingga menimbulkan situasi yang tidak menentu bagi para cendekiawan tersebut. Dengan demikian, sangat wajarlah jika para cendekiawan mengalami sikap kelesuan di kalangan mereka. Mereka diperhadapkan pada situasi yang tidak menentu. Hal ini ditandai dengan yang terjadi di Republik Weimar, dimana para cendekiawan dihadapkan oleh masalah situasi yang tidak menentu. Di satu pihak, mereka tidak mau bergabung dengan partai komunis pro-Soviet yang bagi mereka yang kritis dianggap telah berpaling dari ajaran lurus Marx, yaitu membebaskan kaum yang tertindas. Di lain pihak, mereka juga tidak mau bergabung dengan Partai Sosial Demokrat yang sudah kehilangan sifat revolusioner Marx-ismenya (Hardiman, 2009).

Dalam perkembangannya, iklim “Stalinisasi” mempertahankan ego terhadap ajaran Marx. Para cendekiawan tetap melakukan sikap kritis terhadap ajaran Marx, serta melakukan revisi secara kritis terhadap ajaran tersebut. Akibatnya, sikap Marxisme ortodoks tidak mampu membendung berbagai kritis terhadap ajaran Marx yang telah dibekukan menjadi alat ideologi. Usaha yang dilakukan oleh para cendekiawan untuk merevisi pemikiran Marx adalah memahami maksud dan tujuan Karl Marx sendiri mengenai wawasan dialektika Hegel. Oleh sebab itu, revisi ini mau tidak mau disebut sebagai penghidupan kembali idealisme Jerman. Tokoh yang terkenal menghidupkan kembali dialektika Hegel dalam Marxisme adalah George Lukacs.

Bangunan revisionisme ajaran Marxisme yang dilakukan Lukacs, mendorong para cendekiawan lainnya dalam mengembangkan teori Marxisme yang kemudian dijadikan sebagai teoritis kritis di kalangan para cendekiawan khususnya mereka yang beraliran Neo-Marxisme. Lebih lanjut revisionisme terjadi salah seorang aktivis Partai Komunis Jerman, Karl Korsch dalam bukunya yang terkenal Marxisme dan Filsafat. Korsch menyangkal ajaran Marx ortodoks dengan mengatakan bahwa hakikat ajaran Marx adalah tafsiran praktis atas kesadaran manusiawi, tetapi maksud Marx dilenyapkan oleh tafsiran positivistik atau bahkan ajaran Internasionale II (Leninisme dan Stalinisme). Dengan demikian, kebangkitan kembali ajaran Marxisme ditandai dengan dialektika Hegel

yang kemudian merebak ke dalam idealisme Jerman. Hal ini merupakan sebuah usaha penyegaran kembali ajaran Marx yang telah beku dalam ideologinya sendiri karena setting gagasan positivistik ke dalam teori Marxisme sangat kental.

Apa yang diinginkan dalam penyegaran kembali ajaran Marx adalah teori itu harus bermaksud praksis dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran (superstruktur) para revolusioner harus tercipta agar mencapai pada maksud praksis dalam kehidupannya. Pendek kata, teori tidak semestinya hanya berkuat pada pengembangan ilmu pengetahuan belaka, melainkan teori harus memiliki sikap praksis dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya kebebasan dari segala dominasi (terdistorsi). Hal inilah yang diidamkan oleh kaum cendekiawan yang *concern* merevisi ajaran Marxisme ortodoks, tanpa terkecuali Mazhab Frankfurt sendiri. Dalam sejarahnya, usaha merevisi ajaran Marxisme (Korsch dan Lukacs) tercium oleh Moskwa, maka pembersihan filsafat praksis tersebut akan segera dilakukan. Singkatnya, Lukacs dipaksa menyangkal karyanya dan harus kembali kepada ajaran lurus Marxisme. Sedangkan Korsch yang bergabung dalam partai Komunis Jerman, ditendang dalam partainya sebab ia tetap mempertahankan pandangannya tentang filsafat praksis Marxisme.

Meskipun filsafat praksis memudar dan kehilangan arahnya, keduanya telah meninggalkan konsep penting dalam karyanya yang kemudian membentuk teori kritis Marxisme berikutnya, yaitu, konsep alienasi yang diambil dari pemikiran Marx, Hegemoni dari pemikiran (Gramsci), Praksis dan konsep reifikasi dari Lukacs (Hardiman, 2009, Agger, 2003). Dengan demikian, usaha gelombang pertama revisionisme ajaran Marxisme mengalami kemunduran dan mandek di tangan perjalanan. Maka, usaha gelombang kedua Marxisme muncul dengan konsep yang sangat jauh berbeda dengan Marxisme ortodoks. Kendati berbeda dengan Marxisme ortodoks, mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Marxisme yang mencita-citakan masyarakat yang bebas dari segala dominasi dan manipulasi sistem (emansipatoris). Revisionisme gelombang kedua ajaran Marxisme ortodoks, disinilah ditempatkan posisi Teori Kritis Mazhab

Frankfurt sebagai pembaharu pemikiran Marxisme.

Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt lahir dari teori emansipatoris sering kali dinobatkan sebagai epistemologi kiri atau Neo-Marxisme. Kendati, menggunakan teori emansipatoris Marxisme, paradigma Mazhab Frankfurt tidak menjadi budak Marxisme melainkan melampaui Marxisme dengan menggunakan paradigmanya sendiri. Menurut Mazhab Frankfurt cara pandang Marxisme tidak relevan lagi dalam mengkaji masyarakat dewasa ini, sebab dalam mencita-citakan paradigma pembebasan tidak se-gampang yang dikatakan Marx pada mulanya perkembangan kapitalisme awal, melainkan menurut Mazhab Frankfurt yang berhaluan Neo-Marxisme ini kajian tentang emansipasi masyarakat yang penuh dengan manipulatif ini mengalami kerumitan dan bahkan bersifat kabur. Artinya, manusia menganggap kehidupan yang penuh dengan keterpaksaan ini bersifat baik-baik saja sehingga masyarakat tidak sadar bahwa mereka telah dimanipulasi oleh keadaan yang ada. Olehnya itu, menurut paradigma Kritis Mazhab Frankfurt diperlukan kajian yang mendalam untuk masalah itu.

Sebagai aliran Neo-Marxisme kontemporer, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt meninggalkan beberapa ajaran Marxisme ortodoks dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Teori nilai pekerjaan ditinggalkan oleh Mazhab Frankfurt karena teori nilai pekerjaan Marx telah dianggap sudah kehilangan arti. Dalam masyarakat industri maju bukan nilai pekerjaan, melainkan ilmu pengetahuan dan teknologilah yang menjadi tenaga produktif utama.
2. Analisis kelas ditinggalkan karena dalam masyarakat kapitalisme lanjut, masyarakat atau antara kelas masyarakat sudah saling melebur. Dengan demikian teori tentang kelas proletar ditindas oleh kelas borjuis (kapitalis) juga ditinggalkan karena dalam masyarakat kapitalisme lanjut penindasan manusia tidak lagi penindasan kaum kapitalis terhadap pekerja (buruh), melainkan semuanya ditindas oleh sistem dimana proses produksi yang ditentukan oleh teknologi sudah tidak lagi terkontrol.
3. Teori tentang kaum proletar sebagai subjek revolusi ditinggalkan

karena kaum proletariat sudah terintegrasi ke dalam sistem, sehingga mereka tidak lagi memiliki semangat revolusioner. Sebagai penggantinya, Mazhab Frankfurt melalui para tokohnya seperti Adorno atau Horkheimer misalnya mengganti subjek revolusi Marx tersebut dari masyarakat proletar ke kaum intelektual. Sedangkan Habermas menempatkan semua pihak manusia, sehingga alat revolusi adalah rasio yang memihak.

4. Kritik ekonomi kapitalis ditinggalkan dan digantikan oleh kritik yang lebih menyeluruh, yaitu kritik terhadap rasio instrumental. Menurut Teori Kritis, rasio instrumental sudah menghasilkan budaya industri yang telah menghalangi perkembangan individu yang otonom dan independen. Teori Kritik bergerak lebih jauh yakni dengan mengkritik filsafat dan ilmu pengetahuan. Menurut Mazhab Frankfurt, filsafat atau ilmu pengetahuan tidak lagi bersifat kritis oleh karena filsafat dan ilmu pengetahuan tidak melihat adanya dehumanisasi atau alienasi dalam proses modernisasi yang berjalan, sehingga filsafat atau ilmu pengetahuan sekadar berfungsi untuk mempertahankan *status quo*. Dengan demikian, penindasan yang kini muncul, menurut Mazhab Frankfurt, sudah tidak lagi seperti yang digambarkan oleh Marx dahulu yakni bersifat fisik atau paksaan melainkan sudah berganti bersifat sangat halus, tersamar sehingga kaum tertindas menganggapnya sebagai sesuatu yang normal (Lubis, 2015).

Secara kelembagaan, Mazhab Frankfurt dikenal sebagai *Institut Fur Sozialforschung* (Institute Penelitian Sosial). Lembaga ini didirikan oleh sekelompok intelektual muda Frankfurt di awal tahun 1923. Dananya diperoleh dari seorang anggota bernama Felix Weil. Lembaga ini kemudian secara resmi menjadi salah satu departemen dalam Universitas Frankfurt (Supraja, 2017). Dibawah pimpinan Max Horkheimer, 1930-an, lembaga Penelitian Sosial Frankfurt mencapai puncak kematangannya. Beberapa tokoh ilmuwan yang *concern* pada lembaga tersebut, yakni, Friedrich Pollok (ahli ekonomi), Carl Grunberg (Direktur pertama Institut), Max Horkheimer (filsuf, sosiolog, psikolog, dan direktur sejak 1930-an), Karl Wittfogel (sejarawan), Theodor Wiesengrund Adorno (filsuf, sosiolog,

musikolog), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (Kritikus Sastra), Herbert Marcuse (filsuf), Franz Neumann (ahli hukum), Erich Fromm (psikolog sosial), Otto Kirchheimer (ahli politik), Henryk Grossmann (ahli ekonomi dan politik), dan Arkadij Gurland (ahli ekonomi dan sosiologi).

Teori Kritis Mazhab Frankfurt juga dikenal sebagai mode pemikiran (*mode of thought*) yang pengembangan gagasan-gagasan dalam suatu kerangka pemikiran teori kritik. Gagasan-gagasan teori kritik yang dikembangkan adalah bentuk penyerangan terhadap gagasan positivistik yang oleh Horkheimer namakan teori tradisional yang telah menjadi alat ideologi terhadap semua lini ilmu pengetahuan. Konsepsi sekolah Frankfurt terhadap teori tradisional yang tercermin dalam karya Horkheimer yang berjudul Teori Kritis dan Teori Tradisional, karya itu dicerminkan oleh Horkheimer sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap merebaknya paham empirisme dan pragmatisme yang bernaung di bawah payung filsafat positivisme yang kemudian mempengaruhi gagasan ilmu sosial dan sains kemanusiaan (*humaniora*). Dalam pandangan kedua aliran ini menerjemahkan teori sebagai jumlah keseluruhan dari proposisi-proposisi tentang suatu subjek. Proposisi-proposisi itu terjalin satu sama lain sehingga terbentuk semacam susunan dimana hanya beberapa saja menjadi proposisi dasar sedang proposisi lainnya adalah penurunan dari proposisi dasar tersebut. Makin sedikit proposisi-proposisi dasar, makin kokoh dan sempurna suatu teori (Sindhunata, 1982).

Merebaknya paham positivisme (teori tradisional) di segala lini ilmu pengetahuan inilah yang dikritik habis-habisan oleh kalangan Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Menurut Teori Kritis Mazhab Frankfurt, jika kita berkuat pada aliran filsafat positivisme, maka sikap emansipasi akan mudah dikarenakan realitas berada di luar diri penelitik atau dengan istilah pemberian jarak antara subjek (peneliti) dengan objek (telitik). Selain itu, teori tradisional (positivisme) sangat memisahkan teori dengan praksis manusia. Padahal teori tidak semestinya berada pada dirinya sendiri, melainkan teori harus mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dibongkar. Hal ini disebabkan teori tradisional bersifat netral terhadap objeknya. Kenetralan teori tradisional dapat digambarkan sebagai teori

tradisional tidak bermaksud mempengaruhi fakta yang hadir di hadapannya. Ia memandang fakta secara objektif, artinya fakta sebagai fakta lahiriah apa adanya. Nampaknya penelitian ini bermaksud tidak mencampurkan nilai-nilai, melainkan nilai itu harus dipisahkan dengan penelitian.

Kritisisme Mazhab Frankfurt sangat mengecam paradigma positivistik yang hanya mampu menjelaskan (*erklaren*) realitas faktual tanpa bermaksud mengubahnya ke arah yang lebih baik. Kemandulan ilmu sosial positivistik dalam hal praksis, disebabkan oleh epistemologinya yang bernuansa ilmu kealaman yang menganggap objek kajian dalam bentuk benda yang mati atau pasif. Sifat positivistik terhadap realitas sosial kemasyarakatan menekankan pada kepentingan teknis. Akibatnya, semua digeneralisasi seperti diibaratkan benda yang pasif. Hukum positivistik berakar dari prinsip identitas yang beranggapan bahwa “jika A benar, maka non A pasti salah”. Cara berpikir identitas adalah $a = a$ atau $a \neq \text{non-}a$. Pikiran hanya mencocokkan dirinya dengan fakta, dan dengan demikian fakta tetap teguh dan tidak berubah. Sebaliknya, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt memakai pemikiran dialektis. Bagi paradigma Kritis kontradiksi a bukanlah non- a , melainkan b , c , d , dan seterusnya. Dengan cara ini fakta dicurigai dan tidak dibiarkan. Teori ini bermaksud untuk merubah fakta, maka suatu identitas antara subjek dan objek tidak tercipta di masa kini melainkan di masa depan (Hardiman, 2009).

Teori Kritis Mazhab Frankfurt menolak ilmu pengetahuan yang bersifat transendental dan empirisme yang bernaung di bawah payung filsafat positivisme yang telah merebak menjadi sebuah ideologi ilmu pengetahuan tanpa terkecuali ilmu sosial. Artinya, Teori kritis tidak ingin terjebak dalam satu pandangan atau pendekatan ilmu sebagai alat ideologi ilmu pengetahuan semata, melainkan menciptakan sebuah teori yang bebas dari segala dominasi, baik ideologi maupun kehidupan praksis masyarakat. Karena itu, pendekatan yang digunakan oleh Teori Kritis adalah pendekatan “hermeneutika-dalam” yang oleh Habermas sebut sebagai sebuah pendekatan “refleksi-diri” (Supraja, 2017; Hardiman, 2009). Menurut Habermas, hanya dengan cara ini sebuah teori tidak akan terjebak dalam

kungkungan ideologi dalam ilmu pengetahuan, karena jika teori jatuh pada antara, transendental maupun empirisme (Kritik Ideologi), maka disinilah “refleksi-diri” hadir menciptakan sebuah evaluasi terus-menerus. Menurut Hardiman (2014) pendekatan refleksi diri yang tergolong kedalam hermeneutika dalam adalah sebuah perdebatan komunikatif yang merujuk pada ketidaksepahaman sehingga mencapai sebuah evaluasi terus-menerus untuk keluar dari tradisi. Singkatnya, tidak ada prasangka yang *legitimate*, sehingga seseorang memungkinkan untuk keluar dari itu. Inilah yang dikatakan sebagai refleksi diri dengan tujuan memutuskan hubungan dengan tradisi. Menurut Habermas, momentum memutuskan hubungan atau keluar itulah yang dikatakan sebagai pencapaian pencerahan.

Paradigma Kritis dalam epistemologinya tidak menafikan realitas empiris, melainkan berusaha untuk mensintesis. Karena itu, pendekatan yang paling sentral dalam paradigma Kritis Mazhab Frankfurt adalah dialektika. Kontradiksi antara yang transendental dengan yang empirisme tanpa menafikan yang transendental pula, maka paradigma Kritis berada dalam ketegangan antara yang tampak dan yang tidak tampak sama sekali, sehingga lebih tepatnya dinamakan kritik ideologi Marxisme dan psikoanalisa Freud. Kritik ideologi berada pada lapangan kajian empirisme, sedangkan psikoanalisa Freud berada pada lapangan kajian transendental. Akhirnya, pencapaian itu dinamakan sebagai refleksi-diri.

Proses refleksi-diri dalam paradigma Kritis Mazhab Frankfurt adalah berusaha menyadarkan subjek bahwa dia berada dalam situasi diagnosis atau berada dalam keadaan lupa ingatan, sehingga membutuhkan penyadaran kembali dari puing-puing lupa ingatan itu, dan berusaha keluar dari kondisi yang rusak itu. Seperti ibaratnya sakit jiwa, begitupula masyarakat dewasa ini yang dikategorikan sebagai bentuk patologi sosial. Maka dari itu, dengan paradigma Kritis Mazhab Frankfurt selain berusaha untuk menyadarkan subjek, paradigma ini juga mau membebaskan subjek dari kondisi yang tidak memungkinkan bagi dirinya dan orang lain. Tujuannya adalah mencapai hasil penelitian yang benar-benar objektif. Dengan demikian ciri dan sifat teori tradisional. Ia netral terhadap fakta di luar dirinya. Memisahkan teori dengan fakta karena memandang fakta

hanya secara lahiriah.

Berdasarkan hal tersebut Horkheimer menuding teori tradisional sebagai teori yang bersifat ideologis. Menurut Sindhunata (1982), ada beberapa ciri teori tradisional dikatakan sebagai ideologis. Pertama, kenetralannya menjadi kedok pelestarian keadaan yang ada. Dengan hanya menganalisa dan mengatur fakta secara teknis, teori tradisional tidak bertanya mengapa realitas sampai terjadi. Dengan kata lain, ia membenarkan dan menerima realitas begitu saja. Ia mendukung realitas yang ada justru dalam kenetralannya. Kenetralannya menjadi kedok yang aman untuk menutupi “kelemahan” dirinya yang memang tidak mau mengubah realitas. Kedua, teori tradisional berpikira secara ahistoris. Teori tradisional memutlakkan ilmu pengetahuan (sains) sebagai satu-satunya unsur yang dapat memajukan dan “menyelamatkan” masyarakat. Ketiga, teori tradisional memisahkan teori dan praksis. Dengan hanya memandang, atau lebih tepat membiarkan fakta secara lahiriah, berarti teori tradisional tidak memikirkan peran dan aplikasi praktis dari sistem konseptual atau teoritisnya. Beberapa ciri teori tradisional itu dikatakan sebagai ideologi yang merebak di tengah perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian secara refleksi historis, Teori Kritis Mazhab Frankfurt lahir disebabkan antara lain: Pertama, sebagai bentuk gelombang kedua dari Neo-marxisme yang kehilangan arah dan tujuannya, dikarenakan masih merebaknya ancaman dari Marxisme ortodoks, seperti yang dialami oleh Korsch dan Lukacs. Kedua, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap teori tradisional sebagai kedok ideologi semua lini ilmu pengetahuan. Ketiga, sebagai usaha menyegarkan kembali maksud filsafat praksis Marx. Dengan tidak memisahkan teori dan praksis manusia, sehingga ada upaya pembebasan (emansipasi). Keempat, dengan sikap emansipasi, maka Teori Kritik lahir dengan kritik terhadap masyarakat modern.

C. Refleksi Filosofis Teori Kritis Mazhab Frankfurt

Teori Kritis Mazhab Frankfurt atau kerap juga disebut sebagai Teori Kritik masyarakat memberikan peluang keluasan cakrawala ilmu penge-

tahuan sosial yang koheren dalam bidang transformasi sosial (*society transformation*). Selain itu, Teori Kritis Mazhab Frankfurt sering dicap sebagai teori yang bersifat emansipatoris. Karena sifatnya emansipatoris, maka Teori Kritis tidak kebal akan adanya perubahan sosial (transformasi sosial). Singkatnya, Teori Kritis sangat mencita-citakan masyarakat agar mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Teori Kritis di satu sisi memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengadakan perubahan, sehingga teori ini kerap disebut sebagai teori yang bersifat praktis. Ciri Teori Kritis tidak lepas dari sejarah pembentukannya dimana diktum emansipatorisnya ditiru dari diktum Marxisme, yakni teori diciptakan bukan hanya sekadar menjelaskan (*erklaren*) realitas, melainkan teori harus mengubah realitas atau dalam bahasa Marx kesibukkan dalam filsafat bukan hanya berada dalam pikiran semata, melainkan yang paling penting adalah bagaimana filsafat mau mengubah keadaan. Di sisi lain, Teori Kritis merupakan sebuah mode pemikiran (*mode of thought*) yang tidak menghilangkan sifat keilmiahannya teori dan bahkan Teori Kritis sangat menganjurkan lapangan penelitian empiris.

Selain itu, Teori Kritis lahir dari refleksi filsafat positivisme yang berkembang dan menjadi ideologis di segala bidang ilmu pengetahuan, tanpa terkecuali ilmu pengetahuan sosial. Dengan kata lain, Teori Kritis lahir dari bentuk kritik terhadap segala bentuk ilmu pengetahuan yang bersifat universalisme sebagai mana positivisme. Filsafat positivisme menurut Teori Kritis telah menjadi ideologis di kalangan ilmu pengetahuan, positivisme lemah dalam sifat praksisnya. Akibatnya, Teori Kritis sangat mengecam metode yang dipakai oleh filsafat positivisme. Dengan demikian, Teori Kritis memiliki cara pandang yang berbeda dalam masalah metodologi ilmiah. Teori Kritis mau menciptakan metodologi yang mampu membebaskan. Singkatnya, Teori Kritis memiliki paradigma tersendiri yang berbeda dengan paradigma positivisme.

Exemplar dari paradigma Kritis Mazhab Frankfurt mengikuti beberapa segepok generasinya yang tengah mengembangkan Teori Kritis, sebut saja Adorno, Horkheimer, dan Marcuse (selaku generasi pertama) dan Jurgen Habermas (selaku generasi kedua). Dimana, pada generasi

pertama, mengembangkan sebuah epistemologi Kritis yang berangkat dari kebangunan kembali idealisme Jerman (Hardiman, 2009). Apa yang dimaksud dengan kebangunan kembali idealisme Jerman adalah pengembalian otoritas subjek sebagai pencipta sejarahnya sendiri. sebagaimana konsep ini, ditemukan oleh Immanuel Kant ketika mengkritik dogmatisme gereja di awal masa *Renaissance*. Menurut Kant, manusia tidak akil baliq, manusia merasa bersalah, kesalahan manusia karena tidak menggunakan akalanya (rasio).

Penemuan otoritas subjek (rasio), menurut Teori Kritis telah mengembalikan akal (subjek) sebagai pencipta sejarah atau pencipta realitas bukan seperti yang diyakini oleh paradigma positivisme, dimana realitaslah yang membentuk kesadaran (materialisme). Lebih lanjut, Teori Kritis tidak cukup puas dengan idealisme Kant hanya berkuat pada kesempurnaan subjek (rasio). Dengan kata lain, Kant berpendapat bahwa rasio atau otoritas subjek, telah sempurnah pada dirinya sendiri dalam hal ini Kant menafikan historisme subjek dan epistemolgi seperti ini, dikritisi oleh Mazhab Frankfurt. Menurut Mazhab Frankfurt, untuk menciptakan Teori bersifat praksis harus menggunakan historisme subjek, karena seseorang tidak mungkin mengadakan bentuk perbaikan diri dan orang lain tanpa adanya sejarah yang membentuknya. Disinilah, Mazhab Frankfurt menempatkan idealisme Hegelian sebagai epistemologi paradigmanya. Dimana, Hegel mengkritik Kant dengan otoritas subjeknya dengan mengatakan bahwa subjek (rasio) tidaklah sempurna dalam dirinya, melainkan ada sejarah yang membentuknya sehingga Hegel mengembalikan historisitas subjek dengan mengistilahkan sebagai hukum dialektika.

Sampai di sini, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt telah menemukan epistemologi Kritis yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut tadi. Tetapi, Teori kritis Mazhab Frankfurt belum puas dengan hal itu, sebab kedua filsuf tersebut masih mengambang dalam pemikiran (idea) belum mampu keluar dari kehidupan konkret-realistis, sedangkan paradigma Kritis Mazhab Frankfurt menginginkan paradigmanya bersifat emansipatoris. Disinilah, Mazhab Frankfurt menempatkan teori kritis Marxisme yang mengalamatkan teori kritis emansipatorisnya berada pada

kehidupan sosial yang konkret-realistis. Mazhab Frankfurt menempatkan dialektika Marx dalam Teori Kritis emansipatorisnya. sehingga paradigma Kritis tidak memisahkan teori dengan praksis.

Selanjutnya, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt memasukkan tokoh yang dianggap kritis walaupun bukan dari kalangan filsuf tulen, yaitu Freudian. Dengan konsep psikoanalisis Freudian, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt berada dalam kategori Teori Kritis yang mengalami kesempurnaan. Menurutnya, memasukkan psikoanalisis Freud kedalam Teori Kritis adalah jalan yang harus dilakukan, sebab manusia dalam melakukan tindakan praksisnya, ada hasrat atau kepentingan yang terselubung di dalamnya. Konsep ini, dikembangkan oleh generasi kedua Teori Kritis, yakni Jurgen Habermas yang berusaha menggabungkan kritik ideologi Marx dengan psikoanalisis Freudian. Alhasil, sebuah paradigma baru dalam Teori Kritis, yakni paradigma komunikatif dengan pendekatan “Hermeneutika-dalam”. Untuk memudahkan memahami paradigma Kritis Mazhab Frankfurt, berikut ini disajikan dasar kritik ideologi dari keempat tokoh utama sebagai berikut.

Tabel 4.1. Akar Filsafat dan Psikologi Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt

Nama Tokoh Kritis	Temuan	Teori
Kantian	Otoritas-Subjek (rasio)	Kesempurnaan Rasio
Hegelian	Historisitas-Subjek	Dialektika
Marxian	Praksis-Subjek	Materialisme-Historis
Freudian	Kepentingan atau Hasrat-Subjek	Psikoanalisis

Kendati, Mazhab Frankfurt meniru keempat tokoh di atas dalam menciptakan proyek paradigma kritisnya, namun paradigma Kritis Mazhab Frankfurt sangat jauh melampaui keempat tokoh itu. Selain itu, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt hanya menggunakan keempat Tokoh tersebut dalam menciptakan paradigma Kritis yang bersifat emansipatoris. Teori Kritis tidak menerima begitu saja pandangan para tokoh tersebut, melainkan memerlukan penyaringan.

Asumsi dasar dari Teori Kritik terhadap kondisi masyarakat modern dengan gaya pasca-industrialisasi yakni masyarakat modern dianggap sebagai masyarakat yang penuh dengan sikap manipulasi (*manipulation*), baik dalam bidang sosial, politik, dan budaya, sehingga berujung pada bentuk ketidakrasionalan (irasional) masyarakat modern. Dengan kata lain, Teori Kritik melihat masyarakat modern berada pada ketidaksadaran mereka terhadap kondisinya sendiri. Mazhab Frankfurt bermaksud memperjelas secara rasional struktur yang dimiliki masyarakat industri sekarang ini dan melihat akibat-akibat struktur tersebut dalam kehidupan manusia dan dalam kebudayaan. Lebih lanjut, mazhab Frankfurt menjeskan semua itu dengan bertolak pada pemahaman tentang rasio dewasa ini, yaitu rasio teknik instrumental. Mereka ingin membangun teori yang mengkritik struktur dan konfigurasi masyarakat aktual sebagai akibat dari suatu pemahaman yang keliru tentang rasio (Arviani, 2013).

Asumsi dasar tersebut beranjak pada historisme konsep pencerahan itu sendiri. Menurut kelompok intelektual Mazhab Frankfurt, beranggapan bahwa masyarakat modern telah terkontaminasi oleh gerakan pencerahan pada abad ke-18 dengan konsep penggunaan rasionya. Berbasis pada rasio inilah, Horkheimer dan kawan-kawan mulai menganalisis keadaan masyarakat modern pasca-industri dengan mengkritiknya karena tidak sesuai dengan konsep rasionalitas pencerahan itu sendiri (Arviani, 2013). Pendasaran ini dapat kita jumpai dalam karya Horkheimer dan Adorno, yakni dialektika pencerahan, dimana menurutnya masyarakat modern yang dimotori oleh cara berpikir positivisme kembali pada kondisi mitologi atau masyarakat modern adalah mitos. Kondisi seperti itulah yang dikritik oleh Mazhab Frankfurt yang dialamatkan pada kondisi masyarakat modern atau pasca-modern. Menurut Mazhab Frankfurt dengan daya cara berpikir kiritis, akan memungkinkan seseorang tidak akan terjebak dalam kungkungan ideologi dan sagala bentuk manipulasi yang dihasilkan oleh masyarakat modern dewasa ini. Teori Kritik memungkinkan mencapai pada kondisi yang ideal yakni kondisi masyarakat penuh dengan pencerahan.

Dari penjelasan panjang lebar di atas, dapat kita tarik sebuah dis-

kursus yang penting tentang cari khas Teori Kritik Mazhab Frankfurt, sebagai berikut: (1) kritis terhadap masyarakat, (2) berpikir secara historis dengan berpijak pada proses masyarakat yang historis, (3) menyadari risiko setiap teori untuk jatuh dalam suatu bentuk ideologis yang dimiliki oleh struktur dasar masyarakat, dan (4) tidak memisahkan teori dari praksis, pengetahuan dari tindakan, rasio teoritis dari rasio praksis. Dengan demikian, Teori Kritik masyarakat menjadi sebuah teori yang bersifat emansipatoris, jika tidak menghilangkan beberapa ciri khas teori kritik tersebut. Dengan kata lain, cita-cita pencerahan (emansipasi) menjadi sebuah cita-cita yang utopis jika berada pada kondisi yang tidak kritis lagi. Karena itu mendorong terjadinya evaluasi secara terus-menerus di kalangan akademisi dan praktisi di kalangan masyarakat umum. Singkatnya, teori kritik dengan daya kritisnya harus mampu digunakan sebagai cara berpikir di kalangan masyarakat dewasa ini yang ingin bebas dari kondisi yang tidak ideal (Sunarto dalam Heidy, 2013). Untuk memahami dengan mudah paradigma Teori Kritis Mazhab Frankfurt, maka dalam bagian ini diuraikan dimensi filosofisnya, meliputi *ontology*, *epistemology*, dan *axiology*.

1. Ontology

Mengkaji disiplin ilmu dalam perspektif ilmu filsafat, maka pertanyaan pertama yang harus diajukan sebagai dasar analisis adalah seputar ontologi. Kajian filsafat mengenai ontologi sangat diperlukan sebab disana ada segala sesuatu yang ingin dikaji atau dipertanyakan. Segala sesuatu dalam kajian filsafat tidak dibatasi, melainkan kajiannya sangat luas yang sering dikatakan sebagai hakikat. Lalu, apakah hakikat itu? Hakikat secara umum dapat diartikan sebagai objek kajian filsafat. Sampai di sini, dapat terbuka pemahaman kita mengenai ontologi. Pertanyaannya adalah apakah ontologi itu? Ontologi secara umum mengenai hakikat apa yang dikaji dalam sebuah ilmu, baik filsafat, sains, mistis, agama, dll. Sepanjang berbicara mengenai ilmu, maka disitu ada ontologi. Singkatnya setiap ilmu pasti memiliki hakikat apa (ontologi) yang ingin dikaji dalam ilmu tertentu.

Menurut Haidir Bagir (2017), ontologi adalah ilmu (*logos*) tentang

hakikat ada (*ontos* wujud dan maujud). Selanjutnya, segala sesuatu yang ada di alam ini disebut sebagai maujud. Maujud tersusun oleh wujud dan mahiyah. Wujud (*being*) atau eksistensi menunjuk pada adanya sesuatu, sebagai jawaban terhadap pertanyaan adakah (sesuatu) itu? Berlawanan dengan esensi (dalam makna kuiditas) yang menekankan adanya sesuatu itu (apakah sejatinya), sebagai jawaban terhadap pertanyaan “apakah itu”? Menurut penganut prinsipialitas eksistensi (eksistensialisme) yang sesungguhnya ada secara real (hakiki) hanyalah eksistensi. Esensi dalam makna kuiditas hanya bersifat artifisial, semu/tidak real. Dengan kata lain, tidak seperti eksistensi, esensi tidak memiliki realitas atau tidak real. Karena itu yang eksistensial adalah yang berhubungan dengan hakikat ada (*real*), dan bukan sekadar dengan atribut-atribut (esensi, dalam makna kuiditas) yang sesungguhnya hanya merupakan bayangan tidak real.

Sejalan dengan itu, Ahmad Tafsir (2016) menjelaskan ontologi sebagai pembicaraan tentang hakikat dan struktur. Hakikat menjawab pertanyaan apakah sesuatu itu sebenarnya. Struktur seharusnya menjelaskan cabang-cabang dalam ilmu tertentu. Namun cabang-cabang itu hanya terdapat dalam ruang ilmu tertentu. Dari sini dapat diartikan bahwa struktur itu mencerminkan adanya perbedaan dalam kajian masing-masing ilmu. Dengan demikian, ontologi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang dikaji oleh ilmu tertentu. Oleh karena itu, pertanyaan yang mendasar dalam kajian ontologi adalah apakah sesuatu itu? Atau apakah ada itu? Atau adakah sesuatu itu? Pertanyaan ini sangat bermakna filosofis, sehingga kajiannya cukup luas lagi mendalam. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah tidak menjelaskan substansi ontologi dalam ruang filsafat melainkan hanya menggunakan kalimat atau konsep ontologi dalam mengkaji ilmu tertentu. Dengan kata lain, tulisan tentang paradigma Kritis Mazhab Frankfurt ini, mempertanyakan apa hakikat yang dikaji dalam paradigma tersebut bukan menguraikan hakikat dari ontologi itu sendiri.

Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan tidak kebal terhadap substansi apa yang dikaji didalamnya atau disebut sebagai ontologinya. Diawal tadi telah diuraikan bahwa

sebagai cabang ilmu pengetahuan tentunya tidak terlepas dari hakikat apa yang dikaji (ontologi) pada ilmu tertentu tanpa terkecuali paradigma Kritis Mazhab Frankfurt itu sendiri. Untuk mempermudah kita dalam memahami hakikat apa yang dikaji dalam paradigma Kritis Mazhab Frankfurt, alangkah baiknya menengok kebelakang tentang ciri dan latar belakang refleksi filosofis yang mendahuluinya.

Secara historis, Mazhab Frankfurt lahir dari refleksi filsafat positivisme. Dimana, paradigma ini mengkritik habis-habisan paradigma positivisme dengan mengatakan positivisme diam-diam melanggengkan *status quo* tanpa mau keluar dari kemapanan keadaan yang rusak. Menurut paradigma Kritis Mazhab Frankfurt, sifat diamnnya paradigma positivisme disebabkan oleh adanya kenetralan dalam dirinya sendiri. Sehingga cukup kental terasa sebuah kajian epistemologi yang kering akan adanya praksis itu sendiri. Akibatnya, teori yang dihasilkan sebagai representasi dari realitas atau teori cerminan dari realitas. Penyuaran kelanggengkan *status quo* cukup kental terasa dalam kajian paradigma positivisme sehingga tidak mampu keluar dari permasalahan yang ada melainkan melanggengkannya. Inilah yang dikritik oleh paradigma Kritis Mazhab Frankfurt, kritikan itu dialamatkan bagi paradigma yang telah mapan dan menjadi ideologi di segala lini ilmu pengetahuan. Padahal Mazhab Frankfurt sangat mengecam sistem berpikir ideologi sebab disana ada sifat distorsi dalam dirinya sendiri. sebagaimana yang dilakukan oleh Habermasian pada saat mengkritik ideologi Marxisme yang telah mapan di kala itu.

Kemudian, kajian paradigma Kritis Mazhab Frankfurt tidak sebatas mengkaji mode pemikiran yang telah mapan sebagaimana pada saat mengkritik positivisme sebagai salah satu mode pemikiran (*mode of thought*) yang telah mapan, melainkan paradigma Kritis Frankfurt sangat jeli mengkaji realitas faktual (empirisme). Di sinilah kami posisikan Mazhab Frankfurt sebagai salah satu cabang metodologi Kritis yang ilmiah karena kemampuannya mengkaji realitas faktual. Jika pernyataan ini direduksi ke dalam metodologi ilmiah Kritis, maka Mazhab Frankfurt menempatkan fokus kajiannya dalam bidang kehidupan masyarakat. Akan tetapi, jika membaca sifat dan karakteristik paradigma Kritis Mazhab Frankfurt yang

tercermin dalam diktumnya yang tegas, yakni pembebasan manusia dan masyarakat yang tertindas (Lubis 2015).

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah dimensi ontologis sebagai hakikat yang dikaji dalam paradigma Kritis Mazhab Frankfurt ke dalam dua hal. Pertama, kritik terhadap mode pemikiran (*mode of thought*) sebagaimana yang tertuang dalam gagasan-gagasan programer Teori Kritis. paradigma Kritis Mazhab Frankfurt menempatkan fokus dan lokus kajiannya terhadap metodologi yang telah mapan. Sehubungan dengan itu, Mazhab Frankfurt mengkritisi mode pemikiran yang berkembang dan menjadi alat ideologi dari semua lini ilmu pengetahuan. Dalam artian bahwa, Mazhab Frankfurt tidak menyukai metodologi penelitian yang bernuansa alat ideologi, melainkan Mazhab Frankfurt harus mengevaluasi secara terus menerus metodologi yang memungkinkan terjebak kedepannya.

Kedua, kritik terhadap masyarakat yang terdistorsi, sebagaimana yang tertuang dalam institusi yang terjelma ke dalam (*Institute of Social Reaserch*). Disini paradigma Kritis Mazhab Frankfurt menempatkan fokus kajiannya pada masyarakat faktual yang mengalami paksaan (terdistorsi). Sehubungan dengan itu, Mazhab Frankfurt menginginkan masyarakat yang bebas dan merdeka sehingga paradigmanya sering dinobatkan sebagai salah satu paradigma emansipatoris. Inilah kedua ontologi dalam kajian paradigma Kritis Mazhab Frankfurt. Dalam pandangan yang pertama, sebagaimana Mazhab Frankfurt menyuarakan ontologis pada proyek pemikiran kritis. Menurut mereka dengan adanya mode pemikiran kritis, kemungkinan metodologi ilmiah kontemporer tidak melulu berada pada pembahasan *erklaren* melainkan melampaui hal tersebut. Sehingga jiwa pembebasan dalam teori tertuang dalam metodologi. Hal ini sangat erat kaitanya ciri Teori Kritis, yakni tidak memisahkan Teori dengan praksis. Sedangkan dalam pandangan yang kedua, Mazhab Frankfurt mau menelanjangi kedok dari irrasionalitas dari masyarakat modern yang tertuang dalam cita-cita emasipatoris.

2. Epistemology

Kajian bidang kefilosofan yang kedua adalah epistemologi. Cabang ini berurusan pada ruang lingkup cakupan tentang hakikat-hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawabannya atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan (*knowledge*), *logos* berarti teori. Dengan demikian epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan (Rizal dalam Suaedi, 2016). Secara harfiah, berarti epistemologi membicarakan tentang teori dalam ilmu pengetahuan. Jika demikian adanya, maka epistemologi mengkaji tentang cara-cara, sumber-sumber dan metode dalam memperoleh teori pengetahuan. Berangkat dari sinilah, epistemologi menjadi sebuah sentralitas dalam pengkajian bidang kefilosofan dan ilmu empirik. Karena dengan epistemologi, seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Brameld bahwa epistemologi sebagai *it is epistemology that gives the teacher the assurance that he is conveying the truth to his student* (Suaedi, 2016). Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai epistemologi memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Berangkat dari arti epistemologi tersebut, memberikan penjelasan yang sentral terhadap pemberian keyakinan kepada khalayak atas apa yang ingin diperolehnya. Singkatnya, epistemologi adalah cara atau metode yang logik untuk meyakinkan kepada orang lain sebagai pencapaian hakikat (ontologi) yang dikaji.

Epistemologi membahas tentang terjadinya dan kesahihan atau kebenaran ilmu (Suaedi, 2016). Tuntutan fitrah manusia dan rasa ingin tahunya yang mendalam niscaya mencari jawaban dan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dan hal-hal yang akan dihadapinya. Pada dasarnya, manusia ingin menggapai sesuatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa: hakikat itu dan nyata dan hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. Keraguan tentang hakikat pikiran, persepsi-persepsi pikiran, nilai dan keabsahan pikiran, kualitas pencerapan pikiran

terhadap objek dan realitas eksternal, tolak ukur kebenaran atas hasil pikiran, dan sejauh mana kemampuan akal pikiran dan indra mencapai hakikat (ontologi), masih merupakan permasalahan-permasalahan aktual dan kontemporer manusia.

Terkadang kita mempersoalkan ilmu dan makrifat tentang benda-benda hakiki dan kenyataan eksternal, serta terkadang kita membahas tentang ilmu dan makrifat yang diperoleh oleh akal pikiran dan indra. Semua persoalan ini dibahas dalam bidang epistemologi. Epistemologi adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, dasar dan fondasi, alat, tolok ukur, keabsahan, validitas, dan kebenaran ilmu, makrifat dan pengetahuan manusia. Pokok bahasan epistemologi, jika berangkat dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tema dan pokok pengkajian epistemologi ialah ilmu, makrifat, dan pengetahuan.

Akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya dan jalan menuju ilmu serta pengetahuan tidak tertutup bagi manusia. Apabila manusia melontarkan suatu pertanyaan yang baru, misal: bagaimana kita bisa memahami dan menyakini bahwa hakikat itu benar-benar ada? Mungkin hakikat itu memang tiada dan semuanya hanyalah bersumber dari khayalan kita belaka? Kalau pun hakikat itu ada, lantas bagaimana kita bisa menyakini bahwa apa yang kita ketahui tentang hakikat itu bersesuaian dengan hakikat eksternal itu sebagaimana adanya? Apakah kita yakin bisa menggapai hakikat dan realitas eksternal itu? Sangat mungkin pikiran kita tidak memiliki kemampuan memadai untuk mencapai hakikat sebagaimana adanya, keraguan ini akan menguat khususnya apabila kita mengamati kesalahan-kesalahan yang terjadi pada indra lahir kontradiksi yang ada diantara para pemikir di sepanjang sejarah manusia. Persoalan-persoalan terakhir ini berbeda dengan berbagai persoalan sebelumnya, yakni persoalan-persoalan sebelumnya berpijak pada suatu asumsi bahwa hakikat itu ada, tetapi pada persoalan-persoalan terakhir ini keberadaan hakikat itu justru menjadi masalah yang diperdebatkan.

Jika pada ontologi mempertanyakan tentang apa hakikat itu sebenarnya, maka dalam epistemologi menguraikan pertanyaan yang ber-

beda yakni bagaimana memperoleh hakikat yang ada itu? Pertanyaan epistemologi memberikan jawaban tentang sebuah asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model pengetahuan. Sampai disini, kita masih bisa mencapai pengertian epistemologi adalah cara atau metode. Pertanyaan itu, masih sangat bersifat filosofis belum sampai pada faktualitas dari metodologi ilmiah yang kita kenal sebagaimana mestinya. Jadi, jika direduksi kedalam bekrone paradigma belum sampai pada pernyataan metodologi paradigma tertentu yang ingin dikembangkan tanpa terkecuali paradigma Kritis Mazhab Frankfurt tersebut.

Tanpa menghilangkan rasa konseptual episteme, maka setiap paradigma mempunyai atau memiliki epistemologi tersendiri. Inilah yang dikatakan sebagai cabang dari paradigma ilmu pengetahuan. Exemplar paradigma Kritis Mazhab Frankfurt tercermin dalam epistemologinya atau cara dia memperoleh ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Untuk mempermudah membaca tentang epistemologi Kritis Mazhab Frankfurt, alangkah baiknya kita menengok kembali hakikat (ontologi) kajian dari paradigma Kritis Mazhab Frankfurt. Secara harfiah epistemologi dalam paradigma Kritis Mazhab Frankfurt adalah epistemologi-kritisisme. Epistemologi ini, bentuk refleksi dari epistemologi yang menganggap dirinya telah mapan dan menjadi alat ideologi yang paling ampuh di segala lini ilmu pengetahuan. Sebagaimana epistemologi yang dikembangkan oleh paradigma positivisme yang mengagungkan universalisme-objektif.

Epistemologi-kritisisme pertama kali dicanangkan oleh Imanuel Kant. Kant berusaha untuk mensintesakan antara rasionalisme dan empirisme. Penganut ini, mengatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan empiris yang meliputi indra dan pengalaman, kemudian akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan sedangkan akal merupakan pembentukannya (Suaedi, 2016). Kemudian epistemologi Kant dikembangkan oleh Hegel. Jika Kant menempatkan akal sebagai kesempurnaan dalam dirinya sendiri, maka Hegel

menyangkal itu, dengan beranggapan bahwa akal tidak sempurna dalam dirinya sendiri melainkan ada sejarahnya yang membentuk dia, sehingga inilah yang dikatakan Hegel dengan hukum dialektika. Epistemologi ini, sangat kritis terhadap dirinya sendiri dan diluar dirinya, karena tidak menginginkan sebuah epistemologi yang terjebak entah itu transendental (dogmatis-teologis) dan entah itu empirisme (dogmatis-empirism).

Sejauh ini, perkembangan epistemologi di kalangan para ilmuwan tanpa terkecuali Mazhab Frankfurt sendiri mencita-citakan epistemologi pembebasan (epistem-emansipasi), maka secara paradigmatis Teori Kritis tetap menjalankan epistemologi “Kritisisme”, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulunya, yakni sekaliber Kant dan Hegel. Kendati, melanjutkan paradigma Kritisisme yang dicanangkan oleh para pendahulunya (idealisme Jerman), paradigma Teori Kritis jauh melampauinya. Perombakan cara kerja epistemologi Kritisisme yang dilakukan oleh Mazhab Frankfurt, terasa ketika mencangkan sebuah Teori Kritis emansipatoris atau teori pembebasan. Dengan kata lain, Mazhab Frankfurt tidak menginginkan sebuah teori semata, melainkan bagaimana sebuah teori itu mampu mengadakan perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga paradigma Mazhab Frankfurt menggunakan epistemologi Karl Marx, yakni teori harus praksis. Akan tetapi, kendati mengikuti Marx, Mazhab Frankfurt melampaui epistemologi Marxisme dengan memasukkan epistemologi Freudian dengan konsep psikoanalisis Freud.

Dengan menciptakan proyek paradigma pembebasan, Mazhab Frankfurt memiliki perbedaan dalam kajian epistemologi sebagaimana umumnya. Epistemologi itu, tidak pernah keluar dari cita-cita Teori kritis Mazhab Frankfurt yang ingin membebaskan manusia dari ketertindasan atau segala dominasi teknokrasi yang ada. Hanya dengan cara ber-dialektika, seseorang akan mencapai kesadarannya. Sebab disana ada bentuk refleksi-diri untuk menemukan akar permasalahan dalam diri dan orang lain. Oleh karena itu, Mazhab Frankfurt kerap juga disebut sebagai pendekatan dialektika pencerahan yang sepadan dengan Hegelian, yakni dialektika kesadaran.

Apa yang diinginkan oleh Mazhab Frankfurt adalah bagaimana

paradigma yang dibangun bersifat emansipatoris. Singkatnya, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt membangun sebuah teori yang bersifat praksis, karena dengan cara itu paradigma Kritis Mazhab Frankfurt bisa membebaskan manusia yang tertindas (emansipatoris). Epistemologi Kritisisme yang dibangunnya menempatkan subjek yang sadar untuk melakukan perubahan. Untuk mencapai kesadaran subjek, maka diperlukan sebuah penyadaran. Penyadaran yang dilakukan oleh subjek adalah dengan cara refleksi-diri. Refleksi adalah gambaran umum dari dialektika, karena dengan cara seseorang berdialektika akan menghasilkan apa yang ingin dicapainya. Dalam konsep dialektika oleh Hegel, berupaya mengkonstruksi pemikiran manusia dari sejarahnya. Karena itu, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt tidak menghilangkan sifat historisitas-subjek. Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt berangkat dari konsep refleksi-diri, sehingga epistemologinya adalah hermeneutis-dialektis atau hermeneutika-dalam.

Hermeneutis-dialektis, berbeda dengan hermeneutika pada umumnya. Jika hermeneutika pada umumnya berangkat dari konsep tokoh hermeneutis kontemporer, yakni Gadamer. Gadamer berasumsi bahwa dalam seni memahami (yang dimaksud adalah hermeneutis) berarti sepaham. Dengan kata lain, seni memahami realitas atau membaca realitas, berarti kita sepaham dengan realitas itu. Konsep hermeneutika Gadamer berangkat dari konsep hermeneutika Yunani Kuno, sehingga dari sinilah Gadamer mengembangkan hermeneutika kontemporer tanpa menghilangkan tradisi Yunani Kuno. Menurut Hardiman (2014) ketika membawakan kuliah umum di komunitas Salihara, mengatakan bahwa Gadamer sembunyi-sembunyi mengikuti pandangan Plato, yakni konsep “*mimesis*” yang artinya meniru, sehingga dari konsep ini, Gadamer tidak bisa keluar dari tradisi atau realitas yang telah ada. Sedangkan hermeneutika-dialektis atau hermeneutika-dalam Frankfurt adalah hermeneutika-kritis yakni kritik terhadap realitas, sehingga konsepnya berbalik arah dengan hermeneutika pada umumnya. Dengan mengatakan bahwa seni memahami berarti semestinya sepaham, melainkan memahami tidak semestinya sepaham atau memahami tradisi atau realitas berarti tidak semestinya harus sepaham dengan realitas itu. Konsep ini berangkat dari konseptual emansipatoris.

Jika Gadamer mengatakan seni memahami berarti sepaham, maka hal ini dikritisi oleh Mazhab Frankfurt dengan mengatakan bahwa pemahaman seperti itu akan mendorong pelanggaran *status quo*.

Dalam tradisi epistemologi hermeneutika pada umumnya, mengatakan bahwa tradisi kemungkinan akan terjebak dalam tradisi yang lain atau tidak terlepas dari tradisi yang lain. Epistemologi hermeneutika mengabaikan sikap refleksi sehingga memungkinkan para ilmuwan akan terjebak dalam tradisi yang lain. Berbeda dengan hermeneutika pada umumnya, hermeneutika-dialektis/kritis justru mengembalikan sikap atau tradisi refleksi dalam kajian epistem, sebab disana ada keinginan untuk mengadakan perubahan atau pembebasan (emansipasi).

Dengan demikian, benang merah yang ditemukan dalam epistemologi paradigma Kritis Mazhab Frankfurt adalah pengembalian kajian refleksi dalam ruang filsafat epistemologi. Sebagaimana yang dilakukan oleh generasi kedua Mazhab Frankfurt, yakni Habermas yang mengembalikan kajian refleksi dalam lapangan metodologi kritis Mazhab Frankfurt. Dalam konteks Teori Kritis, satu-satunya jalan arah menuju emansipatoris dan pencerahan tidak lain dan tidak bukan melalui refleksi-diri (*self-reflection*). Menurut Habermas (generasi kedua) setidaknya-tidaknyanya ada tiga pengertian tentang refleksi-diri (Supraja, 2017):

1. Refleksi-diri “melarutkan” a). Objektivitas diri yang digeneralisasi dan b). Ilusi-ilusi objektif.
2. Refleksi-diri menyebabkan subjek sadar atas asal-usulnya.
3. Refleksi-diri bekerja melalui kesadaran atas tindakan-tindakan yang menentukan ketidaksadaran, atau kesadaran.

Berangkat dari sinilah, epistemologi paradigma Kritis Mazhab Frankfurt melampaui epistemologi Marxisme. Walaupun sama-sama mencerminkan epistemologi pembebasan. Yang perlu digaris bawahi adalah jika dalam epistemologi paradigma Marxisme yang bernuansa emansipasi itu, dalam melihat praksis manusia adalah kerja (*arbeit*). Sedangkan dalam epistemologi Kritis Mazhab Frankfurt (sebagaimana generasi kedua) dalam melihat praksis manusia adalah tindakan komunikatif. Inilah dua paradigma yang bernuansa epistemologi-emansipatoris

dengan kedua jalan yang berbeda. Refleksi-diri, tidak lengkap jika tidak dibarengi oleh tindakan komunikatif disana ada kompetensi komunikatif yang memungkinkan seseorang sadar akan kebebasannya. Walaupun pengembangan hermeneutika-kritis dalam kajian epistemologi paradigma Kritis Mazhab Frankfurt dikembangkan oleh salah satu dari beberapa generasi, yakni Jurgen Habermas, tetapi epistemologi paradigma Kritis Mazhab Frankfurt secara umum menggambarkan epistemologi dialektis sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya (Kant dan Hegel). Karena epistemologi ini menggambarkan epistemologi kesadaran dan itu yang dilakukannya.

3. Axiology

Dalam kajian bidang-bidang atau teori pengetahuan kefilosofan yang terakhir adalah masalah *axiology*. Persoalan *axiology*, kerap kali menjadi perdebatan masing-masing paradigma dalam kancan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh karena *axiology* merupakan jantung dari kemanfaatan dari ilmu yang dikembangkan. Sebuah kemustahilan Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berutang pada ilmu dan teknologi. Keduanya membawa keindahan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya itu, kini manusia tidak perlu memerlukan waktu yang panjang untuk mencapainya. Namun di sisi lain, apakah ilmu dan teknologi itu selalu membawa nilai positif bagi manusia atau sebaliknya justru mendatangkan malapetaka dan kehancuran manusia itu sendiri? Sekelumit pertanyaan tersebut terjawab dalam domain *axiology* yang mengkaji dimensi nilai suatu ilmu. Sebagai ilmuwan sudah seharusnya mengetahui bagaimana sikap yang dibangun ketika mengamalkan sebuah ilmu, sehingga ilmu yang dibuat dengan hakikat kebenaran tidak akan mengalami pembiasaan tujuan bahkan membentuk tujuannya sendiri.

Ketimpangan akan terjadi apabila pemahaman ilmuwan terhadap sains dan teknologinya hanya sebatas pada pemahaman konten, tanpa berusaha memahami sisi manusia pembuat ilmu. Pemahaman terbatas pada sisi sains saja, akan berefek dan memengaruhi pada kurangnya perhatian pada moralitas pengguna ilmu, padahal ilmu bukanlah sesuatu yang bebas

nilai melainkan memiliki kepentingan. Salah satu implikasi etis yang ditimbulkan dalam pengembangan dan penemuan di bidang ilmu dan teknologi modern adalah ruang lingkup pengertian, kebebasan, dan tanggung jawab moral manusia dalam tindakannya (Sumantri dalam Suaedi, 2016). Sebuah ilmu ditemukan dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi manusia.

Dengan ilmu diharapkan semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara cepat dan lebih mudah. Peradaban manusia akan sangat bergantung pada sejauh mana ilmu dimanfaatkan. Beberapa kemajuan yang diharapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan antara lain memudahkan transportasi, komunikasi, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Ilustrasi tersebut merupakan bagian kecil dari persoalan *axiology* dari suatu ilmu pengetahuan. Pertanyaan mendasar terkait *axiology* ilmu adalah sejauh manakah ilmu bermanfaat dalam kehidupan manusia? Apakah dengan ilmu pengetahuan, dapat memajukan peradaban manusia? Pertanyaan itu melahirkan masalah etis. Karena itu, persoalan *axiology* dalam ilmu tertentu adalah persoalan nilai. Berangkat dari definisi tersebut, maka pertanyaan selanjutnya yang timbul dalam *axiology* adalah apakah ilmu tertentu bermuatan nilai (*value laden*) ataukah sebaliknya bebas nilai (*value free*)? Inilah yang sering terjadi dalam masing-masing kelompok ilmu pengetahuan, karena pengembangan ilmu jika kering akan nilai kemungkinan akan terjadi sifat kebinatangan buas dari ilmu tertentu. Artinya, kemungkinan ilmu yang kering akan nilai, terjadi demoralitas dari kalangan ilmu itu sendiri. Jadi, kebaikan dan nilai ilmu tergantung siapa yang mengembangkan ilmu itu.

Dalam kajian *axiology* (*value*) memberikan ruang kepada ilmu tertentu apakah ilmu harus mengandung nilai atau bebas nilai. Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt sebagai salah satu kajian bidang ilmu tertentu memberikan ruang dalam kajian *axiology*-nya. Dengan kata lain, apakah paradigma Mazhab Frankfurt bermuatan nilai atau bebas nilai? Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa paradigma Kritis Mazhab Frankfurt merupakan kritik ideologi dan kritik sosial masyarakat, dan oleh karena itulah paradigma Kritis Mazhab Frankfurt melahirkan pendekatan

intersubjektif yang bersifat dialogal. Dengan demikian, teori yang dibangun pun bermuatan nilai (*value laden*). Melalui pendekatan intersubjektif, setiap subjek saling berinteraksi tanpa ada paksaan dan memungkinkan terjadi kesalingpahaman antar sesama yang pada gilirannya akan memunculkan nilai-nilai yang dibangun dalam kesepakatan atau konsensus antar subjek.

Sepanjang berbicara ilmu sosial, maka paradigma Kritis Mazhab Frankfurt tidak memisahkan teori dengan praksis manusia sehingga bentuk teori yang dibangunnya bernuansa politik afiliasi. Karena dengan itu, akan melahirkan sebuah kepentingan untuk membebaskan diri dan orang lain. Singkatnya, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt tidak menginginkan sebuah pendekatannya berada pada zona nyaman, melainkan akan terus melahirkan pendekatan secara *continue* yang digambarkan secara evaluatif. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait dimensi filosofis Teori Kritis dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.2. Filosofi Paradigma Teori Kritis

Ontology	Epistemology	Axiology
Realitas historis – realitas maya yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, etnik dan gender mengkristal seiring perjalanan waktu	Transaksional/subjektivistis, temuan-temuan yang diperantarai oleh nilai (dialogis/dialektis)	Kritik dan transformatif; pemulihan dan emansipasi sebagai dasar dorongan nilai (<i>value laden</i>)

Sumber: Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. (1994).

Bab 5

Lintas Generasi Teori Kritik Mazhab Frankfurt

A. Pengantar

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perkembangan Teori Kritik tidak terlepas dari pengaruh beberapa tokoh yang *concern* mengembangkan Mazhab Frankfurt. Pada bab ini akan diuraikan pemikiran para generasi Teori Kritik Mazhab Frankfurt. Sebelumnya perlu digarisbawahi perbedaan antara teori kritis dengan Teori Kritik. Jika istilah pertama yang berawal dengan huruf kecil disebutkan teori kritis, maka dialamatkan kepada semua pemikir-pemikir yang berbau kritik terhadap ilmu pengetahuan (positivisme) dan budaya. Sedangkan Teori Kritik, jika huruf pertama yang berawalan dengan huruf kapital, maka dapat dialamatkan kepada sekelompok ilmuwan sosial yang *concern* dalam bidang penelitian sosial di Universitas Frankfurt di Jerman, diantaranya Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jurgen Habermas, dan beberapa nama lainnya. Beberapa tokoh dalam Teori Kritis dikelompokkan dalam tiga generasi. Generasi pertama dinobatkan kepada Adorno, Horkheimer, dan Herbert Marcuse, selanjutnya gearasi kedua adalah Jurgen Habermas beserta kawan-kawannya, dan generasi ketiga adalah Axel Honneth. Ketiga generasi pemikir Teori Kritik Mazhab Frankfurt diuraikan sebagai berikut.

B. Generasi Pertama

1. Theodor W. Adorno

Biografi dan Karyanya

Nama asli Adorno adalah Theodor Wiesengrund Adorno. Adorno nama gadis istrinya yang ia adopsi pada tahun 1930-an untuk perlindungan diri karena ia punya darah Yahudi (Edkins, 2013). Adorno terlahir di Frankfurt pada tahun 1903. Pada tahun 1920-an, Theodor W. Adorno telah

memantapkan dirinya sebagai pemikir yang berbakat dan berharga. Di bawah pengaruh mentor sosiolog dan kritikus budaya Jerman, yakni Siegfried Kracauer, Adorno muda sudah fasih atas filsafat Barat, yakni sekelas Hegel, Marx, dan khususnya Kant, serta fasih atas karya teoritis kontemporer semacam Georg Lukacs, Ernst Bloch, dan Max Weber (Edkins & Williams, 2013). Maka dari itu, tidak heranlah jika Adorno terkenal dalam pemikiran idealisme Jerman dan sekaligus dalam perdebatan kontemporer atas teori Marxis, yang kala itu dicontohkan dalam karya pemikir sekelas Lukacs dan Bloch. Ke dalam intelektual ini mewarnai semua karya Adorno yang kaya dalam acuan untuk filsafat klasik maupun filsafat modern, dan tulisan-tulisannya sering menunjukkan pengetahuan mendalam atas keduanya.

Adorno paling banyak dikenal sebagai seorang mentor filsafat, psikolog, dan musikolog (Hardiman, 2009, Sindhunata, 1983). Sebagai seorang musikolog, Adorno pernah berkomentar tentang musik Jazz padahal Adorno tidak pernah secara langsung berkaitan dengan seorang filsuf itu. Justru perhatiannya yang pertama dan selamanya adalah kritiknya terhadap musik dan musikolog (Edkins & Williams, 2013). Nanti paruh pertama sejak, pada tahun 1930-an, baru ia mulai kontak dengan sekelompok pemikir yang kini secara kolektif dikenal dengan istilah Mazhab Frankfurt. Sejak keterlibatannya itu, Adorno lebih dikenal dengan sebutan filsuf dan perdebatan dalam teori sosial. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang paling kritik (bersama Horkheimer) terhadap kehidupan sosial masyarakat tanpa terkecuali masyarakat modern.

Karena keterlibatannya dengan sekelompok ilmuwan sosial di Jerman, yang lebih akrab dikenal dengan istilah Teori Kritis Mazhab Frankfurt, Adorno dianggap sebagai salah satu Tokoh yang ikut mengambil andil dalam perkembangan Teori Kritik Mazhab Frankfurt (selaku generasi pertama). Karya-karya Adorno meninggalkan warisan yang cukup luas tentang topik sangat beragam, dari anti-semitisme, psikoanalisa, dan hingga musik jazz, dan kosa kata sekaligus konsep yang tidak kalah luas dan canggihnya misalnya: *instrumental reason* atau penalaran intrumental; *negative dialectic* atau dialektika negatif; dan *damaged life*

atau kehidupan yang rusak, hingga berbagai refleksi mengharukan sekaligus provokatif, misalnya: “Hidup telah menjadi ideologi bagi ketidakhadirannya sendiri” dan pencerahan adalah totalitarian (Edkins & Williams, 2013).

Berbagai karyanya ini, menunjukkan Adorno sebagai teoritis kritis di kalangan Mazhab Frankfurt. Dalam berbagai karya itu yang paling terkenal di kalangan Mazhab Frankfurt adalah pemikirannya tentang *Dialectic of Enlightenment* atau dialektika pencerahan. Bersama dengan Horkheimer, karya itu dikembangkan dan populer dikalangan Teori Kritik Mazhab Frankfurt. Mengingat, salah satu karya inilah yang akan menjadi pendasaran di kalangan generasi kedua dalam mengembangkan proyek pemikiran emansipatoris. Apa yang menjadi penjelasan dalam dialektika pencerahan adalah sebuah penjelasan mengenai akar permasalahan di kalangan masyarakat pasca-industri yakni masyarakat dewasa ini yang bagi mereka pencerahan pada abad ke-18 menunjukkan sebuah semangat emansipasi terhadap dominasi, dogmatisme gereja yang pada akhirnya mencapai peradaban baru, yakni saintisme dan teknologi. Akan tetapi, saintisme dan teknologi kembali menjadi dominasi dan bahkan lebih para dari pada pencerahan abad ke-18 lalu. Inilah yang, bagi Adorno dan Horkheimer katakan sebagai masyarakat modern kembali kepada mitos (Sindhunata, 1983, Hardiman, 2009, Agger, 2003).

Masyarakat Modern adalah Mitos

Dalam sejarah perkembangan Teori Kritik Mazhab Frankfurt, masih dibumbui kondisi peperangan dan fasisme Jerman yang kala itu Hitler sebagai biang keladinya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan (gerakan mereka akan tercium oleh pemerintah Nazi), maka tokoh Teori Kritik Mazhab Frankfurt mempersiapkan beberapa cabang Institute di luar Jerman, yaitu Jenewa, London, dan Paris. Begitu Institusi ditutup oleh Nazi, Adorno dan Horkheimer pindah ke Paris, namun pada gilirannya Paris juga terancam Fasisme, pada tahun 1934 ia bermigrasi ke Amerika Serikat dan pada tahun 1938 Adorno menyusulnya (Hardiman, 2009). Atas kebaikan Universitas Colombia di Kota New York mereka bekerja di sana, sehingga Adorno dan Horkheimer menghasilkan karya yang cukup

penting bagi perkembangan Teori Kritik pasca peperangan.

Berbicara tentang dialektika pencerahan, maka didapati sebuah kritik yang pedas dialamatkan kepada budaya modernitas yang bagi mereka telah merasuk ke dalam jiwa-jiwa masyarakat modern. Dalam hal ini, kita tidak mengatakan bahwa masyarakat modern itu adalah suatu kondisi masyarakat yang tidak maju, apalagi mengatakan sebagai kondisi masyarakat yang harus diubah sistemnya, yakni menghilangkan segala bentuk dominasi teknokrasi modern, seperti saintisme dan teknologi. Melainkan di sini penjelasan yang halus akan dampak sebuah cara berpikir modern yang mengakibatkan kondisi dimana masyarakat tidak rasional lagi (irrasional). Irrasionalitas masyarakat modern adalah lawan dari kata rasionalitas. Irasionalitas masyarakat modern diartikan sebagai perlecutan dari saintisme dan teknologi yang dimotori cara berpikir positivisme. Hal inilah yang dikritisi oleh mereka yang beraliran Mazhab Frankfurt, tanpa terkecuali Adorno sendiri. Karya tentang dialektika pencerahan yang dituangkan oleh Adorno adalah sebuah bentuk baku tentang kritik terhadap kondisi masyarakat dewasa ini. Menurut Adorno dan Horkheimer masyarakat modern yang diwarnai dengan syarat budaya pop, sekularisasi, konsumerisme, media massa, dan lain sebagainya semua itu disebabkan karena adanya cara berpikir saintisme dan dominasi teknologi. Bagi Adorno dan Horkheimer, saintisme dan teknologi adalah bentuk dialektika pencerahan yang kembali memanipulasi kondisi masyarakat kontemporer saat ini. Padahal saintisme dan teknologi adalah upaya membebaskan manusia dari kungkungan ideologi mitos yang dipercaya oleh para manusia dahulu.

Adorno dan Horkheimer dalam kritiknya terhadap kondisi masyarakat modern mencoba menelusuri kembali akar-akar (dasar) pemikiran dan semangat era pencerahan yang dominan dalam membentuk pemikiran masyarakat modern. Dalam pandangan Adorno dan Horkheimer, gagasan yang paling utama dalam masyarakat modern adalah gagasan tentang kemajuan (progresivitas) (Lubis, 2015). Adapun kemajuan di era modern, bagi mereka (pencerahan) itu diartikan sebagai penghancuran terhadap mitos. Melalui penghancuran itu, pencerahan, lewat pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, misalnya dianggap telah berhasil membebaskan manusia dari kekuatan atau ketergantungan pada alam, sehingga yang tercapai kemudian adalah penguasaan yang terorganisir terhadap alam. Namun, seperti yang terlihat sekarang ini, alih-alih membebaskan manusia dengan menguasai alam, menurut Adorno dan Horkheimer justru manusia (subjek) sebaliknya menjadi objek yang dikuasai alam.

Melalui proses pencerahan menggambarkan bahwa manusia sebagai subjek yang menguasai kemudian berbalik arah malah dikuasai oleh objek buatan atau ciptaannya sendiri. Di samping itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bekerja atas dasar rasionalitas instrumental yang awalnya diperuntukkan untuk pembebasan manusia dari cengkaman cangkang mitos, akan tetapi karena adanya rasionalitas instrumental tersebut, justru menurut Adorno dan Horkheimer kemudian beralih menjadi mitos baru (Lubis, 2015). Singkatnya, dalam *dialectic of Enlightenment*, Adorno dan Horkheimer berupaya dengan jelas menguraikan akal busuk dari proses pencerahan yang awalnya bergerak dan berusaha membebaskan manusia dari cangkaman mitos dan kemudian ternyata masuk kecangkang mitos baru yang disebutnya barbarisme baru. Dengan demikian, bukanlah yang terjadi proses peralihan dari pendulum mitos menuju pendulum pencerahan, melainkan dari pendulum mitos ke pendulum mitos baru yang lain.

Potret masyarakat modern sebagai “mitos baru” diilustrasikan dalam salah satu contoh sebagai berikut: perkembangan teknologi informasi di era milenial ini banyak para ilmuwan teknologi yang selalu saja mengembangkan teknologi informasi misalnya handphone. Para pakar teknologi telah mendesain sedemikian rupa alat teknologi informasi yang dapat digenggam oleh manusia. Menyoal hal itu, Handphone sebagai alat komunikasi jarak jauh diciptakan oleh para pakar untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga, kerabat, dan teman sebaya tanpa harus melihat secara langsung atau bertatap muka secara langsung. Selain itu, fungsi lain Handphone adalah mampu memberikan informasi kepada manusia tentang aktivitas kehidupannya. Tentunya hal ini tidak disangka oleh kebanyakan manusia, begitu canggihnya hasil ciptaannya sendiri sehingga menempatkan manusia berada dalam ke-

majuan di bidang teknologi informasi. Melalui hasil karya dan ciptaannya itu, manusia modern menganggap bahwa dengan inilah kita berada dalam jenjang kemajuan atau dengan kata lain, manusia modern menganggap kemajuan teknologi informasi tersebut dapat memanusiaikan manusia karena mampu menciptakan teknologi yang begitu canggih. Namun, seiring perkembangannya telah berbalik arah mempengaruhi sang aktor penciptanya sendiri. Sikap ketergantungan terhadap handphone nampak mencuat di permukaan masyarakat modern. Manusia begitu tergantung pada handphone, dimana semua aktivitas manusia modern terasa tidak akan sempurna tanpa adanya handphone.

Ilustrasi contoh di atas, menunjukkan bagaimana kondisi masyarakat modern kembali kepada kondisi mitos yang baru. Menurut Adorno dan Horkheimer, masyarakat modern berada pada kondisi masyarakat mitos itu karena hilangnya jiwa kritis yang ada dalam diri masyarakat modern. Dengan demikian mereka menawarkan sebuah solusi agar manusia modern tidak terjebak ke dalam segala kungkungan dominasi, yakni mengembalikan jiwa-jiwa kritis di kalangan masyarakat modern agar tercapainya sebuah pencerahan dan inilah cita-cita mereka yang tergabung kedalam Mazhab Frankfurt, yakni ingin membebaskan manusia dari segala kungkungan dominasi sehingga teorinya bersifat emansipatoris. Sebagaimana Horkheimer mengatakan masa depan kemanusiaan tergantung pada adanya sikap kritis dewasa ini (Hardiman, 2009).

Secara reflektif, karya Adorno menggambarkan sebuah ilustrasi usaha manusia rasional. Artinya, sebagai salah tokoh yang bernaung dalam Teori Kritik, Adorno menawarkan sebuah proyek pemikiran dengan jalan kritis terhadap realitas masyarakat. Arti kritis di sini, Adorno tidak bisa lepas dari metodologi ilmiah untuk memecahkan permasalahan sosial masyarakat yang tengah-tengah merebak di kalangan masyarakat modern yang telah dimanipulasi. Olehnya itu, karya Adorno meninggalkan bekas pada metode ilmiah dalam menyingkapi permasalahan sosial masyarakat. Terkait metode yang dimaksud diuraikan oleh Lubis (2015) sebagai berikut.

1) Metode dialektika dapat memberikan wawasan tertentu mengenai to-

talitas masyarakat dan mencegah isolasi fakta artifisial dan berbagai masalah. Terlepas dari persoalan yang diteliti, metode ini akan menarik perhatian pada lawannya (antitesa) serta konteks sosialnya; dan di samping objek, metode dan sikap subjek dalam masyarakat juga diuji (dipertimbangkan). Jadi, konteks sosial-historis fenomena yang diamati termasuk bagaimana perkembangannya dimasa depan menjadi perhatian. Objek metode dialektis tidak terbatas. Dalam hal ini, Adorno melihat masyarakat sebagai sesuatu yang dialektis.

- 2) Metode historis berfokus pada masalah hubungan antara yang umum dengan yang individual dalam penempatan historisnya. Peristiwa terkait dengan masa lalu dengan masa depan. Bagi Adorno, masa depan tidak terbuka, akan tetapi ditentukan oleh tujuan tertentu yang mengatur manusia, masyarakat, dan sejarah. Setiap hal mempunyai tujuan tertentu (teleologis). Ilmu pengetahuan harus menyingkap kebenaran atau kepalsuan fenomena yang diteliti atau yang ingin diteliti. Dengan demikian, ilmu harus kritis dalam arti dikaitkan dengan tujuan dan politik tertentu.
- 3) Aspek teleologis mengandalkan perbedaan antara kebenaran yang tampak dengan kebenaran esensial. Adorno memberikan identitas ganda antara keinginan tinggi dengan keinginan yang rendah (baca: kesadaran palsu).
- 4) Adorno menolak pembedaan/pemisahan antara teori dengan praktik (praxis), antara bahasa dengan objek metabahasa, antara fakta yang diamati dengan nilai-nilai yang diberikan. Ia menyatakan bahwa subjek mesti sadar dengan posisinya di dalam masyarakat. Keempat ilustrasi pemikiran Adorno inilah yang menjadi pendasaran bagi kalangan Teori Kritik Mazhab Frankfurt walaupun nantinya generasi berikut tidak mengikuti sepenuhnya pemikiran Adorno, akan tetapi Adorno dan Horkheimer menjadi tonggak penggerak perkembangan Teori Kritik Mazhab Frankfurt.

2. Max Horkheimer

Biografi dan Karyanya

Max Horkheimer lahir di Zuffenhausen dekat Stuttgart Jerman pada tanggal 14 Februari tahun 1895. Ayahnya, Moriz (Moses) Horkheimer seorang Yahudi tulen. Ia mendidik Horkheimer dengan keras dan otoriter, dan mengharuskan anaknya mengelola perusahaannya, Pabrik Tenun Moriz Horkheimer. Selepas dari gymnasium dengan terpaksa Horkheimer menuruti kemauan ayahnya, ia menjadi direktur muda di perusahaan ayahnya. Namun jabatan ini tidak menyenangkan hatinya. Ia selalu ingin lepas dari belenggu jabatan itu (Sindhunata, 1983). Horkheimer sangat dekat dengan Friedrich Pollock dan berkat Pollock, Horkheimer menjalani hari-harinya dengan bergaul dunia seni, bidang baru yang amat menarik hatinya. Perkenalan Horkheimer pertama kali dengan filsafat adalah melalui karya filsuf pesimistis Schopenhauer yang berjudul *Aphorisms on the Wisdom of Life* yang dihadiahkan oleh sahabat karibnya Pollock kepadanya ketika mereka bersama belajar bahasa Perancis di Brussel. Ia jatuh simpatik dengan filsuf pesimistis tersebut yang menantang kesombongan rasionalisme dengan ajarannya tentang kehendak buta serta tragedi yang diakibatkannya.

Pada tahun 1923, Horkheimer mendapatkan predikat lulusan terbaik dengan summa cum laude dalam mempertahankan disertasinya tentang Kant, di bawah bimbingan Profesor Hans Cornelius, seorang filsuf Neo-Kantian. Tiga tahun kemudian ia dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Frankfurt. Pidato pengukuhannya juga tentang Kant, berjudul *Kant's Critique of Judgment*. Horkheimer bergabung di sekolah Frankfurt atas ajakan Pollock. Pada saat itu, sekolah Frankfurt dibumbui ajaran Marxisme. Menurut Horkheimer ajaran Marxisme dirasakan dapat memuaskan kerinduan di masa mudanya terkait dengan revolusi November 1918. Dengan semangat revolusi itu, Horkheimer selalu mendambakan akan terjungkirbaliknya sistem masyarakat yang kala itu merebak di kalangan masyarakat modern dan dianggap mencekam kebebasan individu.

Bulan Januari 1931, Horkheimer diangkat sebagai direktur baru

sekolah Frankfur. Di bawah kepemimpinannya sekolah Frankfurt mengalami jaman keemasannya (Sindhunata, 1983). Karya-karya Horkheimer ketika itu dianggap sebagai Teori Kritik masyarakat, diantaranya *Dialectic of Enlightenment* yang ditulis bersama Adorno. Begitu banyak karya Horkheimer, namun yang sangat populer di kalangan Teori Kritik Mazhab Frankfurt adalah tentang dialektika pencerahan dan perbandingan antara Teori Tradisional dengan Teori Kritis.

Teori Tradisional dan Teori Kritis

Teori Kritis Horkheimer merupakan sebuah kritik pedas yang di-alamatkan kepada teori tradisional (positivisme). Aliran positivisme telah merasuk ke dalam jantung para pemikir-pemikir awal yang telah sukses gemilang membawa dan merasuki ilmu pengetahuan sosial. Padahal bagi mereka yang beraliran Mazhab Frankfurt sangat mengecam aliran positivisme. Menurutnya, positivisme tidak relevan dalam kajian ilmu pengetahuan sosial karena akibat adanya positivisme yang dimotori oleh rasio instrumental, mengakibatkan manusia berada pada ketidaksadaran kritisnya sehingga merujuk pada bentuk penindasan.

Kata kritik oleh Horkheimer dimaksudkan sebagai kritis terhadap ajaran-ajaran di bidang sosial yang ada pada saat itu dan juga kritis terhadap masyarakat pada saat itu yang sangat memerlukan perubahan radikal. Bertens (2002) menegaskan bahwa kata kritik di sini harus di-mengerti dalam arti kritis terhadap ajaran-ajaran di bidang sosial yang terdapat saat itu (termasuk Marxisme Ortodoks) dan serentak juga dalam artian kritis terhadap keadaan masyarakat pada saat itu yang memerlukan perubahan radikal. Teori Kritik yang dimaksudkan oleh Horkheimer di sini adalah kritik terhadap Teori Tradisional (Agger, 2003). Horkheimer menjelaskan bahwa Teori Tradisional yang merebak di tengah-tengah perkembangan kehidupan masyarakat modern telah menjadi alat ideologis dan menindas masyarakat. Karena Teori Tradisional tidak mampu membawa masyarakat dalam kungkungan ideologis yang bersifat halus yang mendominasi kehidupan manusia. Di sini Horkheimer menawarkan proyek pemikiran (Teori Kritik) sebagai salah satu teori yang bersifat emansipatoris (Hardiman, 2009).

Teori Tradisional menurut Horkheimer sangat erat kaitannya dengan tradisi positivisme yang diwarnai oleh metode empirisme yang merebak di kalangan ilmuwan alam dan sosial. Cara kerjanya, yakni berhadapan dengan fakta di luar dirinya, prinsip atau proposisi-proposisi umum dari berbagai aliran dalam Teori Tradisional ini menunjukkan sikap yang sama, yakni kenetralan (Sindhunata, 1983). Akibat kenetralan itu, menurut Horkheimer ilmu pengetahuan kehilangan sifat praktisnya yang awalnya untuk membuat manusia menjadi rasional, namun pada akhirnya berujung pada irasionalitas. Untuk mengetahui perbedaan antara Teori Tradisional dan Teori Kritis, berikut diulas ciri-ciri keduanya.

1. Teori Tradisional

Teori ini dimengerti sebagai perumusan prinsip-prinsip umum dan akhir yang melukiskan dan menafsirkan kenyataan. Dalam arti ini, teori adalah keseluruhan proposisi tentang sesuatu. Proposisi-proposisi itu terpadu. Beberapa diantaranya adalah proposisi dasar, sedangkan yang lainnya adalah proposisi turunan. Semakin sedikit proposisi dasar tersebut, semakin kokoh pula teori yang dihasilkan (Sindhunata, 1983). Lahirnya Teori Tradisional langsung erat kaitannya dengan Descartes yang berusaha merumuskan proposisi-proposisi umum dengan cara kerja deduktif berdasarkan metode ilmu pasti. Cara kerja ilmu pasti langsung dapat diterapkan pada semua lini ilmu pengetahuan lainnya. Dalam hal ini, Teori Tradisional langsung memisahkan fakta dengan nilai dan hanya dengan menganalisa fakta dengan hukum-hukum dan metode-metodenya. Akhirnya, Teori Tradisional bersifat ideologis dan netral terhadap fakta di luar dirinya.

Ada beberapa ciri atau point penting tentang Teori Tradisional sebagaimana menurut Sunarto (2003), yakni sebagai berikut: (1) Sikap netral melestarikan keadaan yang ada, kenetralan itu tidak mempertanyakan keadaan, melainkan hanya menerima dan membenarkannya; maka prinsip umum sama dengan ideologis; (2) Teori Tradisional bersifat a historis. Dengan memutlakan ilmu pengetahuan yang universal. Teori tradisional melupakan masyarakat dalam proses historisnya; ilmu pengetahuan hanya menjadi salah satu kegiatan dalam masyarakat. Atau dengan istilah, ilmu

hanya untuk ilmu; (3) Teori Tradisional memisahkan teori dengan praksis; tidak berkecimpung dalam penerapan praksis sistem teoritis konseptualnya; tidak memikirkan implikasi sosial teori. Menurut Bertens (2001), cita-cita teori tradisional adalah menciptakan suatu sistem ilmiah menyeluruh yang meliputi semua bidang keahlian, sekalipun para penganutnya mengakui bahwa cita-cita ini sekarang masih jauh dalam perwujudannya.

2. Teori Kritis

Berbeda dengan Teori Tradisional, Teori Kritis sangat erat kaitannya dengan proses pembebasan manusia dari segala dominasi. Jika pada Teori Tradisional melanggengkan atau memapankan keadaan (*status quo*) sementara Teori Kritis malah sebaliknya, yaitu mengkritik keamanan keadaan yang ada. Hal ini terungkap dalam kutipan Max Horkheimer, yakni masa depan kemanusiaan tergantung adanya sikap kritis dewasa ini (Hardiman, 2009). Ungkapan Horkheimer tersebut mengajarkan bahwa akan pentingnya sebuah kesadaran kritis di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Agar tidak terjebak dalam satu kelanggengan keadaan yang mereka istilahkan ideologis. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak menerima ideologi, melainkan ideologi mereka katakan ada pada masing-masing manusia. Ideologi yang dimaksud di sini adalah ketika kita terjebak dalam satu perspektif saja, sehingga manusia tidak mampu melepaskan diri dari hal itu. Di sinilah pentingnya sikap kritis yang dimiliki manusia. Teori tidak semestinya berurusan dengan prinsip-prinsip umum, tidak membentuk sistem ide, melainkan memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari bentuk irasionalisme manusia modern. Hal inilah yang dicita-citakan oleh Teori Kritis yang bagi Horkheimer dan kawan-kawan dengan cara itulah, manusia akan bersifat manusiawi.

Adapun beberapa ciri Teori Kritis yang dimaksudkan oleh Horkheimer, yaitu: (1) Kritis terhadap masyarakat. Marx menjalankan kritik terhadap ekonomi dan politik pada zamannya. Mazhab Frankfurt juga mempertanyakan sebab-sebab yang mengakibatkan penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat. Struktur masyarakat rapuh dan tidak baik, karena itu struktur tersebut harus diubah; (2) Teori Kritis berpikir secara historis dengan berpijak pada proses masyarakat yang historis.

Teori Kritis meneruskan posisi dasar Hegel dan Marx. Dengan demikian, teori tersebut selalu berakar pada suatu situasi pemikiran dan situasi sosial yang tertentu, misalnya material-ekonomis; (3) Teori Kritis menyadari risiko setiap teori untuk jatuh dalam suatu bentuk ideologis yang dimiliki oleh struktur dasar masyarakat. Itulah yang terjadi dengan pemikiran filsafat modern. Menurut Mazhab Frankfurt, pemikiran tersebut telah berubah menjadi ideologi kaum kapitalis. Teori harus memiliki kekuatan, nilai dan kebebasan untuk mengkritik dirinya sendiri dan menghindari kemungkinan untuk menjadi ideology; (4) Teori Kritis tidak memisahkan teori dari paraktik, pengetahuan dan tindakan, rasio teoritis dari rasio praksis. Perlu dicatat bahwa rasio praktis tidak boleh dicampuradukkan dengan rasio instrumental yang hanya memperhitungkan alat atau sarana saja. Frankfurt menunjukkan bahwa teori atau ilmu yang bebas-nilai adalah palsu. Teori Kritis selalu harus melayani transformasi praktis masyarakat.

3. Herbert Marcuse

Biografi dan Karyanya

Herbert Marcuse lahir di Berlin pada 19 Juli 1898, berasal dari keluarga menengah atas keturunan Yahudi. Ia belajar filsafat dan sastra di Universitas Berlin dan Universitas Freiburg. Ia sempat ambil bagian dalam kesatuan militer Jerman pada Perang Dunia I. Pasca perang ia menjadi anggota Partai Sosialis Demokrat dan kemudian ditinggalkannya pada tahun 1919. Pada tahun 1923, ia meraih gelar Doktor di Universitas Freiburg dengan disertasi mengenai sastra. Setelah beberapa lama berpertualang di bidang penjualan dan penerbitan buku. Pada tahun 1929, Marcuse kembali di Freiburg dan melanjutkan studi filsafat pada Edmund Husserl dan Martin Heidegger (Agus, 2013). Sepanjang hidupnya, ia menjalani hidup dengan penuh cobaan dan gejolak politik ketika itu, sesuai dengan kondisinya yang bergabung di Partai Sosialis Jerman. Pengalaman yang ia dapatkan selama menjalani wajib militer dan keterlibatan dalam partai politik mendorong Marcuse untuk menemukan dasar-dasar ilmiah untuk mengkritisi praktik kehidupan berpolitik di tengah masyarakat. Di sinilah Marcuse menemukan bahwa pengetahuan yang lahir dan ber-

kembang dari fenomena (realitas kehidupan) akan semakin diakui publik kalau memberi sumbangan bagi pembaruan hidup bersama.

Pada tahun 1933, Marcuse bergabung dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt (Frankfur Institute for Social Research). Institut ini sudah berdiri sejak tahun 1923 dan menjadi pusat pengembangan studi kritis terhadap berbagai persoalan aktual. Sebagai pemikir Neo-Marxisme, Marcuse tidak berbeda dengan kawan-kawan, seperti Adorno dan Horkheimer. Ia juga tentunya tidak terlepas dari pengaruh Kantian, Hegelian, dan Marx. Atas pengaruh pemikiran ketiga Tokoh Kritis tentunya Marcuse menjadi salah satu pioner di lembaga penelitian (Frankfurt school) untuk mengkritisi berbagai macam realitas sosial kemasyarakatan di saat itu. Belum genap setahun bergabung dengan Institut ini, ia menerbitkan ulasan kritis terhadap pemikiran Karl Marx yang diberi judul *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*. Melalui penerbitan tersebut, Marcuse mulai dikenal secara luas sebagai kolumnis dan pemikir yang sangat tajam dalam menganalisis persoalan-persoalan sosial.

Publikasi karya-karya ilmiah merupakan jalan yang ditempuh Marcuse untuk membangun wacana publik yang demokratis. Pada tahun 1940, ia mempublikasikan *Ration and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory*. Selain menerbitkan banyak essay dan artikel, Marcuse menerbitkan karya-karya berupa buku. Karya-karya tersebut adalah *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud* (1955), *Soviet Marxisme: A Critical Analysis* (1958), *One-Dimensional Man: Studies in Ideology of Advanced Industrial Society* (1964), *Negations: Essays in Critical Theory* (1968), *An Essay on Liberation* (1969), *Five Lectures* (1970), *Counterrevolution and Revolt* (1972), *Studies in Critical Philosophies* (1973) dan *The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetic* (1978) (Mulyatno, 2013). Karyanya yang paling banyak dikonsumsi oleh pemikir beraliran Mazhab Frankfurt adalah tentang masyarakat satu dimensi (*One-Dimensional Man*) yang terbit pada tahun 1964. Karya itu, Marcuse mengkritik sistem “barbarisme baru” yang merebak di kalangan masyarakat modern. Menurut Marcuse, masyarakat modern telah menjadi masyarakat yang satu dimensi, yakni kepentingan

teknologi (Faiz, 2017). Semua serba teknologi, sehingga manusia hilang sifat kemanusiaannya. Karya ini yang akan dibahas dalam salah satu karya Marcuse yang paling populer.

One Dimensional Man

Masyarakat Satu Dimensi (*One-Dimensional Man*) adalah karya monumental Marcuse yang paling populer di kalangan Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Melalui karya ini, Marcuse mengkritik realitas sosial kemasyarakatan yang tengah merebak di kalangan masyarakat modern. Menurut Marcuse (Darmaji, 2013), ada tiga ciri utama masyarakat industri atau teknologi modern, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi. Suatu prinsip yang semuanya tekanannya dikerahkan untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi. Kemajuan manusia disamakan dengan terciptanya perluasan teknologi. Kekuasaan teknologi sudah mencakup seluruh bidang kehidupan; tidak hanya melingkupi bidang ekonomi saja, melainkan juga bidang-bidang lain: politik, pendidikan, dan budaya;
2. Masyarakatnya menjadi irasional secara keseluruhan, sebab terjadinya kesatuan antara produktivitas dan destruktivitas. Kekuatan produksi tidak digunakan untuk perdamaian, melainkan untuk menciptakan potensi-potensi permusuhan dan kehancuran, misalnya, untuk persenjataan. Semua pihak setuju jika anggaran senjata dan pertahanan perlu ditingkatkan, padahal ini tidak masuk akal. Namun demi kelangsungan pertahanan, anggaran militer harus terus bertambah. Itulah sebabnya destruktivitas adalah hukum batin produktivitas, maka masyarakat industri modern menampilkan sifat rasional dalam detail, tetapi irasional keseluruhan;
3. Pada masyarakat berdimensi satu segala segi kehidupannya hanya diarahkan pada satu tujuan, yaitu meningkatkan dan melangsungkan satu sistem yang telah berjalan. Manusia tidak lagi memiliki dimensi-dimensi lain, bahkan dengan satu tujuan itu, dimensi-dimensi lain disingkirkan.

Sejarah telah mencatat bahwa manusia pada masyarakat industri

modern memiliki kemungkinan yang objektif agar dapat merealisasikan pemuasan akan kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi yang terjadi sesungguhnya, manusia tetap saja terhalang karena adanya suasana represif. Peran dan peluang ilmu dan teknologi memang sangat besar. Ukuran rasionalitas masyarakat modern adalah rasionalitas teknologis. Manusia dan masyarakat masuk ke dalam perangkat, penguasaan, dan manipulasi teknologis. Teknologi mampu menggantikan tenaga manusia bukan saja dalam bidang industri, namun juga seluruh mata rantai kehidupan. Asal manusia dan masyarakat dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi, atau ditangani, berarti manusia dan masyarakat sudah terjebak ke dalam sistem yang mutakhir ini, yakni teknologis.

Teknologi yang pada awalnya diciptakan sebagai alat emansipasi dari kekejaman alam, kini malah dipakai untuk menindas atau merepresi manusia. Karena itu, hal yang paling menonjol pada masyarakat industri modern adalah toleransi represif, yaitu suatu toleransi yang memberi kesan seakan menyajikan kebebasan yang luas padahal maksudnya tidak lain dari pada menindas. Bentuk penindasan dari sistem teknologi ini terhadap masyarakat modern adalah bersifat halus, sehingga masyarakat menganggap keadaan demikian tidak terjadi apa-apa, padahal mereka ditindas atau dengan istilah kesadaran palsu yang dianut oleh masyarakat modern dewasa ini. Dengan demikian, masyarakat modern menurut Marcuse dan kawan-kawan berada pada kondisi ketidakrasionalan lagi (irasional), karena keadaan yang begitu manipulatif tidak mampu mereka melihat dan membacanya. Singkatnya, masyarakat modern yang ditandai dengan satu tujuan, yakni teknologis, tidak mampu lagi menghindari hal demikian dan bahkan mereka tetap melestarikannya (mempertahankan *status quo*).

Kemanusiaan, kebebasan, otonomi, kehidupan sosial, tidak diberi kesempatan, semuanya sudah menjadi alat. Masyarakat demikian, menurut Marcuse lebih suka mempertahankan *status quo*, baik bagi penganut sistem kapitalisme maupun para penganut sistem sosialisme. Lebih lanjut, masyarakat modern juga tidak menunjukkan adanya penghapusan kelas. Bedanya, rakyat banyak (termasuk kaum buruh) mendukung kelangsungan sistem tersebut dan sekaligus ikut dalam sistem yang sudah begitu mapan

(Darmaji, 2013).

Melihat kritik Marcuse terhadap masyarakat modern itu, sangat tepat jikalau ia dikatakan sebagai pemikir Neo-Marxisme, sebab kritikan-nya dialamatkan pula kepada masyarakat sosialisme yang bagi ajaran Marxisme tanpa terkecuali Marxisme ortodoks mencita-citakan masyarakat demikian. Sebagai anggota Mazhab Frankfurt (Frankfurt School), Marcuse dalam kritiknya terhadap masyarakat modern dewasa ini mendeskripsikan betapa bejatnya sistem yang telah mapan dan mampu menghipnotis masyarakat modern, sehingga menjadikan manusia dan masyarakat modern kehilangan sikap kritisnya terhadap keadaan yang ada. Pernyataan demikian sama dengan cara pandang (kritikan) para generasi pertama Teori Kritis Mazhab Frankfurt, yakni Adorno dan Horkheimer. Meski Adorno, Horkheimer, dan Marcuse memiliki perbedaan cara pandang terhadap melihat masyarakat, namun mereka memiliki kesamaan dalam sikap kritisnya terhadap sistem yang telah mapan, dan menawarkan sebuah solusi untuk membebaskan (emansipasi) masyarakat modern dari segala manipulasi teknokrasi, yakni menumbuhkan kesadaran kritis.

Generasi Pertama Mengalami Jalan Buntu

Kritikan generasi pertama Teori Kritis Mazhab Frankfurt terhadap teknokrasi masyarakat modern yang penuh dengan manipulasi teknokrasi menjadi “pintu gerbang” perkembangan Teori Kritik di kalangan cendekiawan Eropa. Teori Kritis di tangan Adorno, Horkheimer, dan Marcuse mencerminkan sebuah cita-cita emansipasi, yakni membebaskan manusia dari segala belenggu dominasi. Mereka mencerminkan sebuah penjelasan mendalam tentang akar ketidakrasionalan (irasional) masyarakat modern. Irasionalitas masyarakat modern terjadi ketika zaman pencerahan, dimana masyarakat dengan semangat pencerahan, membebaskan manusia dari segala bentuk dominasi dan dogmatisme ideologi Gereja di kala itu, sehingga menghasilkan sebuah temuan baru, seperti saintisme dan teknologi yang dilatarbelakangi cara berpikir positivism. Iming-iming ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu-satunya yang dipercaya manusia dikala itu sebagai bentuk kebebasan manusia (memanusiakan manusia). Akan tetapi, menurut generasi pertama Teori Kritis, ilmu pengetahuan dan

teknologi kembali menindas manusia dan masyarakat selaku penciptanya sebagai bentuk mitos baru (barbarisme baru). Bentuk irasionalitas yang paling mencolok pada masyarakat modern adalah bentuk kesadaran naif, yaitu keadaan atau kondisi masyarakat yang sudah mengetahui bahwa mereka telah ditindas dan dimanipulasi oleh keadaan sistem yang ada, namun mereka hanya berdiam diri saja dan bahkan mereka terjerumus ke dalamnya dengan mempertahankan keadaan yang telah mapan itu.

Cita-cita emansipasi generasi pertama Mazhab Frankfurt atas masyarakat modern yang terbelenggu oleh kemapanan ilmu pengetahuan dan teknologi tampak mengalami jalan buntu. Walaupun mereka telah membeberkan bentuk irasionalitas masyarakat modern ataudengan istilah masyarakat modern adalah mitos, namun kritiknya hanya sebatas sampai di situ saja, dan cita-cita emansipasi yang diinginkan pun telah musnah ditelan pesimisme mereka sendiri. Sebagaimana Horkheimer selaku direktur Institute Social Reaserch mengatakan bahwa pembebasan tidak mungkin dijalankan dalam masyarakat modern ini. Pemikirannya yang dulu revolusioner kini menjadi lebih spekulatif dan refleksif. Ia meragukan bahwa suatu teori masih dapat mendorong lahirnya aksi untuk suatu perubahan. Filsafat lebih baik diam, merenung, daripada sebelum matang gagasannya sudah dimentahkan dan dikeringkan demi suatu tindakan (Sindhunata, 1983).

Pesimisme generasi pertama Teori Kritik Mazhab Frankfurt untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari segala dominasi itu cenderung berbau Marxisme. Atau dengan kata lain, generasi pertama Teori Kritis, walaupun telah meninggalkan ajaran Marxisme ortodoks akan tetapi masih ada sebagian kecil yang digunakannya dalam Teori Kritisnya, yakni tentang praksis. Generasi pertama mengkritik Marxisme dengan pengandaian kritik rasio instrumental dan kritik atas positivisme. Dalam hal ini, mereka menyelidiki kondisi “subjektif manusia” bagi praksis revolusioner, yakni rasio manusia. Rasio merupakan segi penting untuk menolak determinisme dari kaum Marxisme Ortodoks karena melalui rasio manusia menafsirkan lingkungannya terus-menerus, dan dengan demikian ia tidak ditentukan secara mutlak oleh kondisi objektif lingkungan eksternalnya.

Dengan menjadi kritis terhadap lingkungannya, dengan rasio, manusia dapat mengubah lingkungannya menjadi lebih manusiawi. Di sini tampak bahwa Teori Kritis menjanjikan banyak hal mengenai perubahan revolusioner yang akan terjadi berkat kesadaran manusiawi. Namun pertanyaannya adalah mengapa mereka mengalami jalan buntu?

Menyoal hal ini, Hardiman (2009) menggambarkan bahwa konsep rasionalitas mereka adalah konsep rasionalitas dalam perspektif pencerahan. Dalam perspektif itu, rasionalitas disamakan dengan penguasaan atas alam. Di sini, rasio kritis merupakan penguasaan atas kondisi objektif yang mendeterminasi manusia “seperti alam”. Dengan kata lain, rasio kritis itu sendiri merupakan penguasaan atas alam. Padahal penguasaan atas alam mengambil bentuk konkretnya dalam kerja. Rasio instrumental dan rasio teknologis mewujudkan dirinya dalam kerja sosial, yaitu sistem teknologis dan sistem ekonomis masyarakat modern, sebagaimana rasio kritis, mewujudkan dirinya dalam kerja sosial, yaitu mengubah sistem itu melalui praksis revolusioner.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rasio kritis yang diciptakan oleh generasi pertama Teori Kritis Mazhab Frankfurt masih dibelenggu oleh ajaran Marxisme yang menyamakan Praksis adalah kerja (*Arbeit*), sedangkan kerja bagi Marx adalah kegiatan indrawi manusia yang bersifat objektif. Karena itu, hubungan produksi di dalam masyarakat juga bersifat objektif, dalam arti bahwa hubungan itu independen dari kehendak manusiawi. Singkatnya, dengan menyamakan praksis dengan kerja, maka secara simplistis menentukan syarat pembebasan manusia melalui penghapusan pembagian kerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, Horkheimer dan kawan-kawan selaku generasi pertama pesimistis yang dialami dan ramalan bagi mereka, yakni kemungkinan akan terjadi tindak kekerasan di kalangan kaum revolusioner, dapat dibenarkan, karena Teori Kritis yang dicanangkan menyamakan teori dengan praksis adalah kerja. Tidak salah demikian, akan tetapi sikap itu akan mendorong terjadinya sebuah tindakan kekerasan untuk melakukan perubahan dan hal ini paling dikritisi oleh pemikiran aliran Mazhab Frankfurt.

C. Generasi Kedua

Di atas telah diuraikan bagaimana Teori Kritis generasi pertama mengalami jalan buntu teorinya. Adorno, Horkheimer, dan Marcuse dalam Teori Kritis-nya begitu concern menuangkan ide pemikirannya kepada masyarakat bagaimana cara keluar dari kungkungan manipulasi teknokrasi yang telah diciptakan dari cara berpikir positivisme, namun kemudian berjuang pada pesimisme. Menurutnya, tidak mungkin terjadi perubahan sosial tanpa adanya aksi (*action*). Aksi yang dimaksud di sini adalah kemungkinan teori yang dihasilkan akan menciptakan sebuah tindakan kekerasan untuk melakukan gerakan perubahan. Padahal tindakan kekerasan tersebut sangat dikecam oleh para pemikir generasi Mazhab Frankfurt, sebab kekerasan bukan jalan terbaik perubahan, melainkan kekerasan akan berujung pada “gerakan palsu”. Karena itu, Horkheimer selaku direktur lembaga hanya meratapi sebuah harapan-harapan dengan kerinduan semangat emansipasi, kerinduan akan datangnya kebenaran, dan semangat revolusioner pun berubah menjadi religius.

Kondisi demikian digambarkan oleh Sindhunata (1983) bahwa bagi Horkheimer kebenaran itu tidak mungkin tanpa menunjuk adanya Allah. Memang Horkheimer tidak pernah menuntut adanya Allah yang transenden. Baginya, teologi bukanlah pengetahuan tentang tuhan, melainkan ungkapan suatu kerinduan. Kebenaran itu harus transenden, mengatasi dunia ini. Ungkapan kepesimisannya nampak pandangannya bahwa kehidupan ini tidak lagi untuk mengetahui; kehidupan ini semata-mata hanya kerinduan terhadap kebenaran sejati. Sikap pesimisme di kalangan Teori Kritis generasi pertama ada pada teorinya sendiri. Mereka hanya mampu mengungkapkan kedok kebobrokan dari cara berpikir saintisme dan teknologi yang telah dimanipulasi oleh cara berpikir positivisme. Meski generasi pertama Teori Kritis Mazhab Frankfurt dipandang mengalami jalan buntu, namun setidaknya mereka telah membangun fondasi Teori Kritis ke arah emansipasi. Perkembangan pemikiran Teori Kritis selanjutnya memasuki generasi kedua di tangan Jurgen Habermas yang akan diuraikan berikut ini.

Jurgen Habermas

Biografi dan Karyanya

Jurgen Habermas lahir di Dusseldorf, Jerman pada tahun 1929. Seperti banyak orang Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an, keluarga Habermas Pro-Nazi (Edkins dan Williams, 2013). Ia belajar di Universitas Gottingen dan mempelajari sastra Jerman, filsafat serta mengikuti kuliah-kuliah psikologi dan ekonomi. Ia juga belajar filsafat di Universitas Bonn, dimana di sana ia meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1954 (Lubis, 2015). Pada tahun 1956, Habermas bergabung dengan Mazhab Frankfurt dan menjadi asisten Adorno. Pada tahun 1964, ia menjabat sebagai profesor filsafat di Universitas J.von Goethe, Frankfurt. Selama sepuluh tahun antara 1971 sampai 1981, Habermas menjabat sebagai direktur Institut Max Planck lalu menjadi profesor filsafat di Universitas J. Von. Goethe Frankfurt. Pada tahun 1982, Habermas kembali ke Frankfurt dan pada tahun 1994 ia pensiun dan tinggal di Strnberg.

Dilihat dari latar belakang Habermas, masih dibumbui pengaruh dari Perang Dunia II. Menjelang akhir perang dunia kedua, Habermas bergabung dengan organisasi muda Hitler. Namun demikian, setelah perang, Habermas menjadi lebih sepenuhnya sadar akan kebrutalan sifat Nazisme. Ia pun memulai minat mempelajari dan mempromosikan Demokrasi, benang merah yang menurut ia mengikat seluruh tema karyanya. Semenjak ia belajar di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt pada tahun 1956 di bawah bimbingan Adorno dan Horkheimer. Di sinilah Habermas mulai menggeluti dialog panjang dengan Kant, Hegel, Marx dan Weber, begitu juga dengan Adorno dan Horkheimer serta Teori Kritis lainnya (Edkins dan Williams, 2013).

Gaya pemikiran Habermas menggambarkan bahwa ia senang mendialogkan beberapa pemikiran teoritis terdahulu, mulai dari pemikiran idealisme Jerman hingga pada pemikiran filsuf empirisme. Tradisi ini selalu diidentikkan dengan tradisi pemikiran Jerman. Habermas, selaku filsuf Jerman tentunya tidak terlepas dari tradisi Jerman lainnya, yang senantiasa mendialogkan buah karya dari filsuf lainnya. Telah bertahun-tahun terdapat jurang pemisah antara teori sosial tradisi Jerman dengan Anglo-

Saxon. Para pemikir Jerman gemar mengkonstruksi sistem filsafat yang bersifat esoteris kompleks, sementara sebagian besar filsuf dan ilmuwan sosial berbahasa Inggris (Anglo-Saxon) memiliki pandangan yang berseberangan, mereka sangat mencurigai segala bentuk *Grand Theory*. Bila kemudian menerimanya, gejala ini banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Jurgen Habermas. Habermas merupakan seorang tokoh *grand theory* yang berusaha untuk “mendialogkan” berbagai kecenderungan dalam ilmu sosial dan filsafat sosial tradisi Inggris dan Amerika dengan teori sosial Tradisi Jerman (Supraja, 2017).

Permasalahan yang tengah merebak di masyarakat seperti realitas aktual dewasa ini ditandai dengan meningkatnya mobilitas sosial, kesadaran kultural yang lebih luas, dan globalisasi ekonomi. Ketiga gejala tersebut telah menjadikan asumsi-asumsi tradisional tentang masyarakat menjadi terisolasi, atau dengan kata lain konsep masyarakat homogen dalam pemikiran politik menjadi lebih dicurigai. Masyarakat kemudian lebih digambarkan sebagai multikultural (Christman dalam Iwan, 2014). Pengandaian-pengandaian sebagaimana muncul dalam politik demarkasi yang mengandaikan adanya kotak-kotak komunitas homogen yang membingkai individu-individu menjadi sebuah pengandaian yang secara kognitif dan normatif mengingkari realitas. Pluralitas menjadi bagian dari karakter sosial yang meski diterima dan dijadikan bagian dari bangunan analisis dan konstruksi sosial.

Pada sisi lain, meningkatnya komunikasi internasional telah membuat interaksi antar budaya dan tradisi menjadi sedemikian lebih kuat, walau masih dihantui oleh keraguan tentang kesamaan identitas dan kepentingan. Sudah menjadi kebutuhan dari umat manusia dewasa ini, bahwa penteorian tentang hak-hak asasi manusia tanpa penelitian ke dalam jenis-jenis manusia yang berbeda sebagaimana dikonseptualisasikan saat ini. Fenomena ini menjadi buah bibir di kalangan para cendekiawan dewasa ini, mereka menjadi ragu terhadap proses globalisasi yang begitu mencuat di kalangan masyarakat modern. Tentulah menjadi sebuah tanda tanya besar bagi mereka yang lahir belakangan. Kecurigaan demi kecurigaan yang terjadi di kalangan masyarakat intelektual terjadi ketika

sebuah perubahan sosial yang begitu besar mencuat akan berdampak pada aspek sosial, politik dan ekonomi. Mengapa permasalahan demi permasalahan tumbuh di kalangan masyarakat. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah hilangnya sikap kerangka normatif di kalangan masyarakat. Bahkan yang timbul adalah layaknya seekor binatang yang buas dengan kepentingannya.

Aspek ontologis-epistemologis terkait dengan kategori-kategori dasar tentang manusia dan masyarakat kemudian menjadi mengemuka. Titik pandang transendental atas hakikat manusia dan masyarakat mulai dipertanyakan. Namun apabila kerangka normatif transendental dalam memahami manusia dan masyarakatnya ditolak, maka pertanyaan yang timbul adalah adakah kerangka normatif lain yang menghargai pluralitas budaya atau pluralitas struktural yang tidak terjebak dalam pluralisme? Masih adakah kerangka normatif yang mampu merangkum segala perbedaan tanpa kehilangan daya pengarah menuju masyarakat damai sejahtera?

Jurgen Habermas pemikir kontemporer mencurahkan usahanya untuk menjawab persoalan-persoalan dasar di atas dengan tetap berpijak pada tradisi Teori Kritis. Teori Kritis yang dipahami sebagai teori sosial yang dikonsepsikan dengan tujuan praktis merupakan buah pikiran yang muncul dari refleksi yang luas tentang hakikat pengetahuan, struktur penelitian sosial, dasar normatif interaksi sosial, dan tendensi-tendensi politis, ekonomis, dan sosio-kultural dari zaman ini (McCarthy, 2006). Sebagai salah satu tokoh Teori Kritis Mazhab Frankfurt, Habermas juga dinilai sebagai seorang teoritikus Neo-Marxian yang pada tahun-tahun awal kariernya secara langsung sudah diasosiasikan dengan tokoh sekaliber Adorno dan Horkheimer di kala itu mereka juga sebagai seorang Neo-Marxian. Sekalipun dia memberikan sumbangan penting Teori Kritis, selama bertahun-tahun dia menggabungkan teori Marxian dengan banyak masukan teori yang lain dan menghasilkan serangkaian gagasan gagasan teori yang sangat khas (Ritzer, 2014).

Sumbangan buah pikir Habermas banyak dikonstruksi dari tradisi Kantian sebagai salah satu tradisi idealisme Jerman yaitu menempatkan

rasio satu-satunya sebagai alat pencerahan (Hardiman, 2009). Beberapa karya yang paling fenomenal di kalangan Teori Kritis Mazhab Frankfurt adalah antara lain; *The Structure Transformation of The Public Sphere* (1989), *Knowledge and Human Interests* (1971), *Legitimation Crisis* (1975), dua volume *The Theory of Communicative Action* (1984 dan 1987) dan *Between facts and Norms* (1996). Habermas juga banyak membaca karya poststrukturalis, pragmatisme Amerika, dan psikologi perkembangan (Edkins dan Williams, 2013). Membaca karya Habermas, maka kita diajak untuk berpikir keras dan memang Habermas sering dianggap salah satu teoritis kritis yang paling sulit dipahami.

Sebagai salah satu filsuf yang gemar mengkonstruksi beberapa pemikiran lainnya, Habermas mendapatkan legitimasi karya yang kaya dengan kekhasan sendiri. Nuansa akademisnya tumbuh dengan gejolak politik serta realitas sosial yang melatarbelakanginya. Secara otomotif, pemikiran Habermas dibumbui oleh nuansa politik afiliasi sebagaimana ditulis dalam karyanya *Knowledge and Human Interests* (1971) yang menegaskan bahwa setiap pengetahuan manusia memiliki kepentingan. Sebagai salah satu tokoh politik, Habermas paling berpengaruh dengan gagasan-gagasannya tentang masyarakat yang benar-benar demokratis. Selain itu, Habermas sangat mendewakan sebuah metode ilmiah yang mampu membebaskan manusia (emansipasi) dari segala dominasi. Jalan keluar dari penindasan menurut Habermas adalah melalui komunikasi bebas paksaan. Dengan cara ini, manusia akan menuju masyarakat demokratis tanpa ada yang paksaan ataupun penindasan. Selain itu, Habermas menciptakan sebuah kerangka metode ilmiah yang bebas dari penindasan atau kritik ideologi, yakni metodologi penelitian kritis dengan pendekatan “hermeneutika-dalam” yaitu suatu pendekatan refleksi-diri dalam metodologi penelitian kritis.

Perkenalan proyek emansipasi Teori Kritis Habermas pun menuai kontroversi. Dalam hal ini, masih banyak mengandung utopis dan beberapa pertanyaan yang kerap muncul di kalangan intelektual, seperti seandainya boleh mengajukan pertanyaan pesimis, bisakah konsepsi refleksi diri (*self reflection*) membebaskan manusia dari segala bentuk distorsi?

Apakah orang atau masyarakat yang sukses menjalankan program refleksi-diri berarti pula berhasil dalam mengatasi segala bentuk distorsi? Bagaimana komunikasi intersubjektifnya dapat diterjemahkan ke dalam kondisi sosiologis masyarakat yang belum sepenuhnya rasional, dimana dialog sering diartikan sebagai adu otak yang harus menghasilkan seorang pemenang.

Menyoal hal ini, tentu saja masih banyak pertanyaan yang harus diajukan. Habermas mengatakan bahwa proyek pemikirannya belum selesai atau dalam bahasa Inggris "*unifinish project*". Ide-ide Habermas, walau bagaimanapun juga telah mampu mengobrak-abrik gagasan yang telah lama mapan. Selain itu, ia mampu membuka selubung kebobrokan rasio positivism sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya. Selain itu, proyek Habermas walau memang banyak kontroversi terhadapnya dengan dalih utopia, akan tetapi sebagai sarana refleksi-diri, menuai segala bentuk sifat positif, seperti mampu mengevaluasi dan merefleksikan hal-hal yang bersifat distorsi. Untuk lebih jelasnya tentang karya Habermas akan diuraikan dalam bahasan selanjutnya dalam buku ini.

Kritik Terhadap Rasio Instrumental

Secara historis, proyek pencerahan (Renaissance) telah menciptakan rasionalisasi masyarakat modern. Hal demikian ditandai dengan adanya sistem kapitalisme di Barat. Apa yang menjadi pendasaran di sini adalah tentang bagaimana sebuah sistem kehidupan sehari-hari masyarakat semuanya serba naungan rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses pemisahan antara hal-hal yang abstrak (sakral) dengan hal-hal yang masuk akal (rasio). Puncaknya, ketika terjadinya zaman pencerahan (Renaissance) pada abad ke-18 yang ditandai dengan ilmu pengetahuan positif atau sekuler (Kartodirdjo, 1990). Akar sejarah inilah perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dibatasi lagi. Semua berada pada naungan rasionalitas. Selain itu, kondisi seperti ini juga ditandai dengan merebaknya paham positivisme di kalangan para ilmuwan sosial terlebih lagi ilmu pengetahuan alam.

Proyek rasionalisasi pada masyarakat modern telah menjadi sebuah keuntungan bagi orang perorangan. Karena rasionalisasi terdapat sebuah kepentingan terselubung yang tidak nampak dipermukaan dan bersifat

halus. Hal demikian, menjadikan akal budi subjektif (manusia) tenggelam berubah menjadi akal budi instrumental. Singkatnya, rasionalisasi di segala bidang, seperti pasar dan birokrasi, menjadikan lahirnya rasio instrumental yang netral dalam dirinya sendiri. Hal inilah yang dikritik habis-habisan oleh sekolah Frankfurt tanpa terkecuali Jurgen Habermas. Normalnya adalah akibat adanya pengaruh rasio positivisme menumbuhkan lahirnya rasio instrumental. Rasio Instrumental yakni rasio yang tak ubahnya menjadi alat belaka, ia kosong dalam dirinya sendiri sehingga mendorong hilangnya sikap praksis manusia itu sendiri (Sindhunata, 1983).

Akal budi objektif mempunyai wewenang terhadap manusia. Ia tidak netral, sebab isi objektifnya sendiri sudah mengandaikan bahwa ia mempunyai tujuan tertentu yang harus dikejar manusia. Sedangkan akal budi instrumentalis tak ubahnya suatu alat belaka. Ia netral, maka dapat digunakan bahkan diperalat untuk tujuan apa pun yang tidak berasal dari dirinya. Menurut Habermas bahwa akal budi subjektif atau rasio instrumental merebak di tengah-tengah perkembangan rasio positivisme dan mengakhiri sebuah pergeseran yang awalnya bersifat praksis tak ubahnya menjadi alat yang netral terhadap realitas atau objeknya. Hal demikian yang paling dikecam oleh pendiri Teori Kritik, sebab dengan adanya rasio instrumental, sikap emansipasi baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain hilang dengan sendiri. Keniscayaan terhadap perubahan di tengah-tengah masyarakat ada pada rasio instrumental itu sendiri.

Pemikiran paling populer dalam teori Habermas adalah kritiknya terhadap rasio instrumental yang menyamakan rasio itu berasal dari rasio yang dikembangkan oleh Weberian yang disebutnya (rasionalisasi). Menurut Habermas akibat adanya proses rasionalisasi dalam masyarakat modern, memunculkan kondisi masyarakat yang saling menindas karena logika yang dipakai dalam masyarakat modern adalah logika pasar dan birokrasi. Dengan demikian, nalar instrumental sangat memberikan andil dalam hal ini, sebab nalar itu menjadi sebuah nalar strategis-bertujuan (istilah Habermas). Apa yang dikatakan Habermas adalah logika saling menjatuhkan antar manusia disebabkan adanya strategis-tujuan.

Melalui logika tersebut, manusia tidak segan-segan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya karena yang dicari adalah untung-rugi. Deskripsi tentang logika nalar instrumental ada dalam logika pasar (*economy action*) yang Weber paling banyak membahas tentang hal demikian. Bagi Habermas, nalar instrumentalis mendorong pembentukan sebuah kolonialisasi dunia hidup yang paling banyak ditemukan dalam dunia pasar dan birokrasi, dimana manusia cenderung tidak berdaya akan hal itu, sebab mengikuti sistem yang ada tanpa melihat dampak yang ditimbulkannya.

Proses rasionalisasi juga dapat dijumpai dalam teori pilihan rasional Coleman yang berasumsi bahwa tindakan manusia mempunyai maksud dan tujuan yang dibimbing oleh hirarki yang tertata rapi dari preferensi. Dalam hal ini rasional berarti: pertama, aktor melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi dalam pemilihan suatu bentuk tindakan. Kedua, aktor juga menghitung biaya bagi setiap jalur perilaku. Ketiga, aktor berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan untuk mencapai pilihan tertentu. Logika-logika seperti itu mencuat di kalangan pasar dan birokrasi. Menurut Habermas rasio instrumental atau rasio strategis-tujuan bersifat monologis, dan jika hal demikian digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka konsekuensinya adalah saling menindas antar manusia, sebab logika itu tercermin dalam sikap saling mengobjektifkan antar manusia dengan kategori kepentingan teknis (McCarthy, 2006).

Agar manusia tidak saling menjatuhkan dengan nalar instrumental, maka Habermas menyarankan dengan menggunakan nalar komunikatif dengan kepentingan emansipatoris. Logika ini bersifat dialogis, dimana orang saling berkomunikasi antar sesamanya karena sifat dasar manusia adalah komunikatif. Dengan cara itu, diskursus tentang konsensus akan terbangun di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, Habermas memperkenalkan sebuah teori tindakan komunikatif (*comunicative of action*) yang menumbuhkan kesaling-pahaman di antara semua insan manusia. Melalui proses ini akan menciptakan keselarasan dan pencerahan, sehingga sikap demokratis timbul di tengah-tengah kehidupan manusia.

Tegasnyas bahwa nalar instrumental sangat dikecam oleh Habermas

karena dunia hidup ditenggelamkan kedalam rasio instrumental masyarakat modern. Selain sifatnya hanya sebatas alat untuk memanipulasi realitas, rasio instrumental juga kebal terhadap sikap praksis manusia. Rasio instrumental adalah rasio yang berfungsi sebagai alat belaka dan mudah dikendalikan karena sifatnya yang kosong dalam dirinya sendiri dan rasio ini sering dijumpai dalam nalar kepentingan-kepentingan teknis (empiris-analitik).

Kepentingan Ilmu Pengetahuan

Dalam karya *Knowledge and Human Interests* (1971), Habermas menuangkan proyek pemikirannya dengan mengatakan ilmu pengetahuan memiliki kepentingan masing-masing. Dalam konteks tersebut, Habermas membedakan tiga macam kategori ilmu pengetahuan dengan kategori kepentingan yang mendasarinya. Adapun ketiga kategori ilmu pengetahuan yang dimaksud disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Kelompok Ilmu dan Kepentingan

Kelompok Ilmu	Kepentingan atau Tujuan
Empiris-Analitis Ilmu-Ilmu Alam	<i>Nomotetis</i> (mencari hukum alam) kepentingan teknis
Historis-Hermeneutis; sejarah, sastra, sos-bud, dan lain-lain	<i>Ideografis</i> (pengungkapan makna) kepentingan: perluasan wawasan, komunikasi, dan tindakan bersama
Ilmu-Ilmu tindakan/Kritis: sosiologi, politik, filsafat, teori feminisme dan lain-lain	<i>Refleksi</i> kritis. Kepentingan: emansipatoris

Sumber: Knowledge and Human Interests (1971)

Kelompok ilmu pengetahuan yang pertama adalah kelompok ilmu pengetahuan empiris-analitis, yaitu kelompok ilmu pengetahuan alam dan sosial yang menerapkan pendekatan paradigma positivism, dimana ilmu pengetahuan bertujuan untuk menemukan hukum-hukum alam (*nature law*) dan fenomena sosial budaya yang bersifat (nomologis). Dengan menemukan hukum-hukum alam dan fenomena sosial budaya, maka kelompok ilmuawan ini dapat memprediksi dan mengontrol fenomena tersebut. Dengan demikian, kelompok ilmu pengetahuan ini memiliki kepen-

tingan dan tujuan teknis dengan menggunakan rasio sebagai pelaksana dan tujuan (rasio instrumental).

Selanjutnya kelompok ilmu yang kedua adalah ilmu pengetahuan historis-hermeneutis yang memiliki kepentingan kognitif-praktis. Ilmu yang tergolong ke dalam kelompok ilmu ini adalah ilmu sosial budaya yang mencoba memahami (*verstehen*) makna fenomena sosial-budaya masyarakat dengan menggunakan metodologi penafsiran (interpretatif). Adapun bahasa yang digunakan tidak sama seperti bahasa yang digunakan pada kelompok ilmu yang pertama, melainkan menggunakan bahasa sehari-hari sesuai dengan bahasa atau pernyataan ilmu sosial-budaya yang menempatkan interaksi manusia sebagai hubungan intersubjektif. Kepentingan ilmu pada kelompok ini bukan pada penguasaan atau dominasi teknokrasi terhadap sesama, melainkan demi memperluas kepentingan kesaling-pengertian/pemahaman dan intersubjektivitas yang dalam istilah Habermas disebut kepentingan praktis (Lubis, 2015).

Sedangkan kelompok ilmu yang ketiga adalah ilmu-ilmu tindakan/kritis, yaitu ilmu yang dikembangkan melalui refleksi-diri, sehingga melalui refleksi diri tersebut manusia dapat memahami kondisi-kondisi yang tidak adil maupun kondisi-kondisi yang menekan serta mampu mendistorsi keadaan manusia yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam kelompok ini, menurut Habermas ada kemungkinan untuk membebaskan individu atau masyarakat yang mengalami distorsi. Oleh karena itu, kepentingan yang mendasari ilmu ini adalah kepentingan emansipatoris. Secara khusus, Habermas mengemukakan bahwa psikoanalisis Freud dan kritik ideologi Marx sebagai bentuk pengetahuan yang mengandung refleksi-diri dan teori kritis. Namun sayangnya, kedua teori ini menurut Habermas telah terperosok dan terdistorsi pada kecenderungan determinis-positivisme (Hardiman, 2009).

Pengembangan ilmu-ilmu tindakan/Kritis menempatkan Teori Kritis Frankfurt sebagai salah satu mode pemikiran (*mode of thought*) yang berkembang di kalangan mereka dan filsuf Jerman yang beraliran Kantian. Tidak terkecuali Habermas yang mencoba meminimalisir semua ilmu pengetahuan yang tengah berkembang di kalangan teoritikus baik

Teori Kritis maupun teori-teori sosial lainnya. Dengan kata lain, Habermas, melalui proyek pemikirannya ingin menciptakan sebuah teori yang benar-benar emansipatoris dan inilah yang menjadi salah satu bentuk atau contoh yang telah direduksi ke dalam kelompok ilmu-ilmu tindakan-kritis. Secara detail, pelengkap kerangka Teori Kritis emansipasi Habermas adalah sebagaimana tertuang dalam karyanya yang berjudul tindakan komunikatif atau yang dikenal dengan istilah rasio komunikatif. Kerangka teori ini menuai perhatian di kalangan Teori Kritis, sebab rasio-rasio yang dituangkan dalam kerangka teori tersebut memberikan jalan baru dalam cita-cita emansipasi.

Dari pengkategorian ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam proyek pemikiran Habermas, disitulah mengajarkan kita bahwa perkembangan pengetahuan yang ada semuanya memiliki kepentingan, sebagaimana kelompok ilmu pengetahuan empiris-analitis memiliki kepentingan teknis (tradisi ilmu alam). Sedangkan kelompok ilmu pengetahuan historis-hermeneutis memiliki kepentingan untuk memahami fenomena makna sosial. Lain pula dengan kelompok ilmu pengetahuan tindakan/kritis memiliki kepentingan emansipatoris, yakni membebaskan manusia atau masyarakat dari segala belenggu dominasi yang terdistorsi. Lebih lanjut, Habermas mengatakan bahwa bahayanya kelompok ilmu pengetahuan empiris-analitis yang telah menjadi alat ideologi dari segala bidang ilmu pengetahuan sehingga hilangnya daya kritis di kalangan masyarakat.

Melalui mode pemikirannya (*mode of thought*) sebagaimana pengelompokan ilmu di atas, Habermas mengajarkan kita di balik ilmu pengetahuan yang kita konsumsi setiap harinya memiliki selubung hasrat kepentingan, sehingga perlu direduksi ulang dengan cara refleksi diri dan ini menciptakan sebuah tindakan kritis di kalangan ilmuwan kritis. Reduksi Habermas terhadap ketiga ilmu pengetahuan itu memberikan penjelasan bahwa masing-masing ilmu pengetahuan itu memiliki rasio sendiri-sendiri. Pertama, kelompok ilmu pengetahuan empiris-analitis memiliki kepentingan teknis karena itu secara otomatis menggunakan rasio instrumental (dalam istilah Habermas disebut dengan tindakan strategis-bertujuan). Melalui rasio instrumental menempatkan hubungan

manusia dengan alam sekitar bersifat monologal karena subjek berhubungan langsung dengan benda mati atau benda yang pasif.

Kedua, kelompok ilmu pengetahuan historis-hermeneutis memiliki kepentingan perluasan cakrawala makna sosial, karena itu ia menggunakan rasio *verstehen* (memahami), sehingga dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya bersifat subjektif. Ketiga, kelompok ilmu sosial-kritis atau tindakan/kritis memiliki kepentingan emansipatoris, karena itu secara tidak langsung mereduksi rasio komunikatif. Melalui rasio komunikatif, maka sifat hubungan dalam dunia sosial bersifat dialogis dengan maksud untuk menciptakan emansipatif (membebaskan). Secara sederhana rasio dari ketika kelompok ilmu tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Kelompok Ilmu dan Rasionya Menurut Habermas

Kelompok Ilmu	Rasio Ilmu	Hubungan
Empiris-analitis	Rasio Instrumental	Monologal
Historis-hermeneutis	Rasio Verstehen	Subjektif (memahami)
Sosial-kritis/tindakan kritis	Rasio Komunikatif	Dialogal (konsensus)

Paradigma Kerja dan Paradigma Komunikatif

Konsistensi Habermas dengan kerangka teorinya dalam menciptakan manusia yang bebas dari distorsi ada pada teori tindakan-kritisnya yang disebut dengan tindakan komunikatif. Dalam karya Habermas tentang tindakan komunikatif memperjelas dua kategori paradigma, yaitu paradigma kerja (*arbeit*) dan paradigma komunikatif (*communication*). Pada paradigma kerja sebagaimana dilakukan oleh Marxisme menempatkan logika ilmu alam (*naturewissenschaften*) sebagai salah satu pendekatannya. Lebih lanjut, Habermas mengatakan bahwa paradigma kerja sebuah tindakan praksis manusia yang sifatnya tindakan strategis-bertujuan, sehingga tindakan ini bersifat dipaksakan (Hardiman, 2009). Sedangkan paradigma komunikatif juga merupakan salah satu praksis kehidupan manusia, hanya Marx mengabaikan tindakan ini dan memfokuskan kajiannya

pada praxis manusia yakni kerja.

Pada mulanya Marx menjadikan teori praxis-nya dalam hubungan manusia dengan alam. Marx mengartikan kerja sebagai bentuk praxis manusia, sehingga kerja sebagai bentuk produksi terhadap alam. Dengan kata lain, karena kerja menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi. Hanya saja Marx tidak membayangkan bahwa jika hal ini direduksi ke dalam dunia kehidupan sosial, maka akan terjadi sebuah penguasaan, sebab logika yang dipakai adalah logika instrumental atau strategis-bertujuan. Hal ini tergambar dalam teori Karl Marx tentang konflik kelas. Marx mengartikan bahwa sebuah konflik kelas adalah bentuk dari moral kehidupan sosial yang beroperasi berdasarkan kerja sosial. Di sini Marx berpikir tentang dialektika kehidupan moral yang beroperasi berdasarkan kerja sosial. Sebagai hukum gerak dari konflik yang terjadi antara berbagai pihak yang ada. Singkatnya, Marx mengartikan bahwa konflik kelas sebagai bentuk dialektika moral kehidupan sosial yang beroperasi berdasarkan kerja sosial yang dibentuk oleh tekanan institusional dari luar yang memaksa individu untuk melakukan tindakan, sehingga kemenangan yang diraih oleh kelompok kelas marginal, kembali memaksa kelompok kuasa dan ini terjadi secara berulang dan membentuk sistem yang baru (MacCarty, 2006).

Dengan demikian, Marx melalui paradigma kerja menciptakan masyarakat yang sadar beroperasi berdasarkan hubungan subjek (orang) dengan objek (alam dan manusia lain. Hubungan ini bersifat monologal, sebab orang akan mengobjektifkan orang lain sama seperti benda yang pasif. Gaya seperti ini ada pada gagasan ilmu kelaman (*naturewissenschaften*). Akibatnya, orang saling menjatuhkan satu sama lainnya. Gaya seperti demikian akan menciptakan sebuah rasionalitas strategis-bertujuan, dimana rasio instrumental sebagai alatnya. Kesadaran melalui kerja dapat saja bersifat semu atau dengan istilah Habermas “kesadaran palsu”. Karenanya tindakan yang dilakukan dapat memaksa orang lain untuk mengikutinya tanpa adanya evaluasi reflektif dari orang yang bertindak. Hubungan subjek-objek jika diteruskan pada hubungan level inter-subjektif, maka ditemukan orang-orang yang melakukan hubungan akan

saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, sebab logika yang digunakan adalah pilihan rasional bertujuan atau strategis-bertujuan. Logika demikian inilah yang paling dikecam dan dikritisi oleh Habermas.

Menurut Habermas deskripsi tentang kerja begitu penting karena dengan kerja atau tindakan rasional bertujuan dapat dimahaminya tindakan instrumental atau pemilihan rasional atau gabungan keduanya. Tindakan instrumental ditentukan oleh aturan-aturan teknis yang berdasarkan pengetahuan empiris. Di dalam setiap hal aturan-aturan itu menyatakan prediksi-prediksi bersyarat tentang peristiwa-peristiwa fisik atau sosial yang dapat diamati. Prediksi-prediksi ini dapat membuktikan tepat atau keliru. Kelakuan pemilihan rasional ditentukan oleh strategi-strategi yang didasarkan atas pengetahuan analitis. Strategi itu menyatakan secara tidak langsung deduksi-deduksi dari aturan-aturan preferensi (sistem-sistem nilai) dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan; proposisi-proposisi ini baik deduksi secara tepat atau keliru. Tindakan rasional bertujuan menentukan tujuan-tujuan pada kondisi-kondisi yang telah ada. Tetapi sementara tindakan instrumental mengatur sarana-sarana yang cocok atau tidak cocok menurut kriteria penguasaan efektif atas kenyataan, tindakan strategis tergantung hanya pada evaluasi yang tepat atas pemilihan-pemilihan alternatif yang mungkin, yang dihasilkan dari kalkulasi yang ditambahkan oleh nilai-nilai dan norma-norma

Sedangkan pada logika interaksi atau tindakan komunikatif sebagaimana yang dimaksudkan oleh Habermas mengutamakan pola hubungan melalui komunikasi antara individu-individu yang bersifat dialogis. Artinya, aktor yang satu dengan aktor yang lainnya saling mengemukakan argumentasinya, sehingga terlihat ada hubungan intersubjektif, yakni hubungan subjek-subjek. Apa yang diinginkan Habermas adalah sebuah konsensus (kesaling-pahaman) antar penutur yang satu dengan penutur yang lainnya, sehingga mencapai level pencerahan. Tetapi, Habermas tidak mengabaikan paradigma kerja dengan logika strategis-bertujuan, melainkan Habermas membandingkan antara keduanya, yakni paradigma kerja (*arbeit*) dan paradigma komunikasi.

Kedua paradigma itu, menurut Habermas adalah bentuk praxis

dalam kehidupan manusia. Hanya saja, Habermas membatasi kedua ruang itu dengan mengandaikan bahwa kerja berada pada ranah hubungan manusia dengan alam atau kepentingan teknis, sehingga pengembangan ilmu teknologi bisa menjadi terus dikembangkan. Sedangkan komunikasi berada pada ranah kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena sifat dasar manusia adalah interaksi antar sesamanya, sehinggah hubungan yang dibangun adalah intersubjektif (kesaling-pahaman/konsensus). Tindakan komunikatif ditentukan oleh norma-norma konsensual yang mengikat yang menentukan harapan-harapan timbal balik mengenai tingkah laku dan yang harus dimengerti dan diketahui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang bertindak. Norma-norma sosial diberlakukan lewat sanksi-sanksi. Makna dari norma-norma itu diobjektifkan dalam komunikasi sehari-hari. Untuk lebih jelasnya perbedaan kedua paradigma itu, akan dirangkum dalam sebuah tabel, yakni sebagai berikut:

Tabel 5.3. Perbedaan Paradigma Kerja dan Paradigma Komunikatif Habermas

Paradigma	Penekanan	Logika	Hubungan	Tujuan
Kerja (<i>arbeit</i>)	Strategis-bertujuan	Teknis	Subjek-objek	Kesaling-menjatuhkan
Komunikatif (<i>communication</i>)	Dialog-rasional	Inter-subjektif	Subjek-subjek	Kesaling-pahaman

Dengan demikian, hanya dengan melalui jalan komunikasi kemungkinan seseorang akan menemukan konsensus dan terciptalah pencerahan. Habermas tidak setuju dengan Marx bahwa orang diciptakan sepenuhnya melalui kerja manusia. Dengan mengambil gagasan dari Hegel dalam buku *Phenomenology of Mind* dan dari teori komunikasi dan tindakan berbicara, Habermas justru berpandangan bahwa orang menghumanisasi dirinya melalui interaksi (Agger, 2003). Dengan kerangka teori tindakan komunikasi, Habermas membuka jalan baru bagi Teori Kritis yang sarat dengan emansipasi. Jika pada level generasi pertama mengalami jalan buntu dengan teorinya sendiri, karena tidak ada lagi ruang yang mampu dilihat untuk sampai pada cita-cita emansipasi, maka

Habermas melihat proses emansipasi dapat ditemukan melalui jalan komunikasi.

Untuk sampai pada proses pencerahan dengan menggunakan jalan komunikatif, perlu adanya syarat (*validity*) agar tercapainya komunikatif bebas paksaan (*communicative free distortion*). Syarat-syarat ini hanya ada pada seseorang yang memiliki kemampuan komunikatif. Kemahiran dalam komunikasi sangat menentukan terjadinya sebuah konsensus atau kesaling-pahaman. Habermas mengatakan untuk tercapainya konsensus maka harus memiliki kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif merupakan kemampuan seorang pembicara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban validitas ucapan dalam tindakan komunikatif, meliputi: kelengkapan (*comprehensibility*), kebenaran (*truth*), kebenaran normatif (*normative rightness*), dan dapat dipercaya (*truthfulness*). *Comprehensibility* merupakan persyaratan minimum yang berarti kemampuan untuk memproduksi kalimat dengan tata bahasa yang benar. *Truth* adalah kebenaran yang diungkapkan oleh pembicara dalam arti faktual, misalnya: kiblat sholat umat muslim berarti bahwa umat muslim harus sholat menghadap ke kiblat. Kebenaran normatif (*normative rightness*) adalah gagasan bahwa apapun klaim normatif si pembicara harus dianggap sah berdasarkan norma-norma oleh komunitas, misalnya: mencuri itu haram hukumnya. Selain itu, kompetensi komunikasi juga mempersyaratkan pembicara yang harus jujur (*truthfulness*) dan dapat dipercaya saat merepresentasikan keyakinan dan niat.

Perihal tersebut menegaskan bahwa dalam konteks tindakan komunikatif, seseorang rasional tidak hanya cukup jika ia mampu mengajukan suatu pernyataan dan ketika dikritik ia bisa membuktikan alasan dengan cara menunjukkan bukti-bukti yang tepat, tetapi juga jika ia mengikuti norma yang mapan dan ketika dikritik mampu membenarkan tindakannya dengan cara menjelaskan situasi itu dalam cahaya harapan yang sah (Edkins dan Williams, 2013).

D. Generasi Ketiga

Dinamika perkembangan pemikiran Teori Kritik Mazhab Frankfurt terus berlangsung dalam domain kritik internal dalam lembaga mereka. Warna kritikan di antara mereka pun menunjukkan adanya perbedaan, sehingga seringkali dimaknai bahwa pemikiran Teori Kritik Mazhab Frankfurt mengalami pengkotak-kotakan dari generasi ke generasi. Atas perbedaan-perbedaan pemikiran tersebutlah kemudian melahirkan tipe pemikiran baru yang selanjutnya disebut sebagai generasi ketiga. Lahirnya generasi Mazhab Frankfurt, tentunya tidak terlepas dari berbagai literatur dan sudut pandang dalam melihat masyarakat, khususnya terkait dengan misi emansipasi masyarakat yang terdistorsi.

Di sinilah letak menariknya pemikiran kalangan Mazhab Frankfurt karena mereka lahir dari lembaga yang sama, namun memiliki fokus aksentuasi teori yang berbeda-beda. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa Teori Kritik yang dicetus oleh pendahulunya berbeda dengan yang dicetuskan oleh para penerusnya, sehingga memungkinkan lahirnya Teori Kritik Masyarakat yang baru. Selain itu, tak dapat dipungkiri bahwa dari beberapa generasi Teori Kritik memiliki cara pandang yang berbeda dari persolan emansipasi, sehingga cukup memberi kesan lahirnya sebuah paradigma dari masing-masing generasi. Kendati pun generasi memiliki cara pandang yang berbeda, mereka tidak pernah terlepas dari para pendahulunya yakni idealisme Jerman (Kantian, Hegelian, dan Marxian). Generasi ketiga Teori Kritik Mazhab Frankfurt, lahir dari beberapa tilikan dari pendahulunya yakni, Jurgen Habermas. Kendati murid dari generasi kedua (Jurgen Habermas), tetapi proyek pemikirannya jauh berbeda dengan gurunya. Adalah Axel Honneth selaku generasi ketiga Teori Kritik Mazhab Frankfurt yang memiliki mode pemikiran (*mode of Thought*) yang khas dari pendahulunya.

Axelt Honneth

Biografi dan Karyannya

Axel Honneth lahir di Essen, Jerman pada 18 Juli 1949. Ia adalah filsuf sekaligus teoritikus sosial yang dikenal sebagai generasi ketiga dari Teori Kritis. Honneth menempuh pendidikan di Universitas Bonn dan

Bochum pada tahun 1969-1974 dan memperoleh gelar M.A di bidang filsafat pada tahun 1974. Ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Berlin dan Munich. Di Munich, Honneth pernah di bawah bimbingan langsung Jurgen Habermas (Lubis, 2015). Pada tahun 2001, profesor filsafat yang juga menekuni teori sosial, etika, dan sastra (Jerman) ini menjadi direktur Institute for Social Research di Universitas Frankfurt. Sejak tahun 2011 Honneth mengajar di Departemen Filsafat Universitas Colombia Amerika dan menjadi profesor di sana.

Jejak Honneth dalam Teori Kritis tidak meninggalkan bekas seperti para pendahulunya. Honneth dalam proyek pemikirannya menghasilkan karya kritis masyarakat dalam segi subjektivitasnya. Artinya, Honnet mengembangkan sebuah teori yang bertolak pada kedirian individu. Seperti para pendahulunya, Honnet juga banyak meninggalkan hasil karya emansipasi. Beberapa karya diantaranya seperti, *Social Action and Human Nature* (ditulis bersama Hans Joas); *The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory*; *The Fragmented World of The Social: Essays in Social and Political Philosophy*; *The Struggle For Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*; *Reification: A Recognition-Theoretical View*; *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory* dan sebagainya (Lubis, 2015).

Dengan fokus kajian pada persoalan-persoalan sosial-politik dan filsafat moral, khususnya menyangkut antara kekuasaan, pengakuan, dan respek. Honneth menemukan modernitas masyarakat ditandai oleh membesarnya patologi sosial. Artinya, relasi sosial masyarakat dalam perkembangannya mengalami distorsi yang disebabkan oleh dominasi rasio instrumental. Akibat kendali rasio instrumental, rasionalitas mengalami defisit terutama fungsi kritisnya tidak berkembang seiring perkembangan masyarakat yang ditopang kemajuan teknologi. Di sini Honnet mencoba menghidupkan kembali warisan pemikiran tentang praksis rasional melalui respons politis terhadap penginstrumentalisasian dimensi modernitas. Menurutnya, subjektivitas mesti diatasi dengan mengembangkan paradigma intersubjektivitas berdasarkan pengakuan, selain perhatian pada persoalan rasionalisme instrumental. Honnet mencerminkan kesamaan

dengan gurunya (Jurgen Habermas) dalam hal kritik terhadap rasio instrumental, intersubjektivitas, dan tentang normatif. Meski demikian, Honnet memberikan jejak pemikiran yang jauh berbeda dengan pendahulunya.

Jika para pendahulunya melihat kriteria normatif dibimbing sebatas oleh rasionalitas kognitifnya sebagaimana dalam proyek Habermas, maka Honnet sebaliknya berdasarkan normativitas atas pengakuan yang berhubungan dengan disposisi batin subjek. Menurut Honnet, proyek kritis Habermasian dengan teori tindakan komunikatifnya membatasi manusia hanya pada dimensi rasionalitasnya dan melupakan dimensi lain dari diri manusia, terutama aspek pengakuan (Runesi, 2014). Kalau Habermasian mengatasi rasio instrumental dengan menggunakan bahasa dengan mengembangkan kompetensi komunikatifnya, Honneth malah sebaliknya mengarahkan perhatiannya pada dimensi pra-kognitif dan segi efeksi manusia sebagai unsur penting.

Di sini Honneth mengangkat kembali “pengakuan” sebagai aspek penting dari semangat modernitas. Bagi Habermasian, intersubjektivitas terkait dengan struktur “linguistik” dalam sebuah jalur quasi transendental. Di situ, dimensi pragmatis dari tindakan wicara di antara para pembicara, yang memang diperlukan sebagai norma, yang secara implisit terdapat dalam setiap pertukaran rasio intersubjektif dieksplisitkan melalui argumentasi. Sedangkan bagi Honneth, tidak hanya bagi bahasa *per se* menjadi satu-satunya dimensi konstitutif bagi hubungan intersubjektivitas, tetapi juga perjuangan bagi pengakuan sosial atas diri subjek di dalam masyarakat. Maka, klaim Habermasian bahwa dilema kehidupan sosial berakar pada level abstraksi menurut Honneth tidak terlalu tepat, sebaliknya justru merupakan persoalan konflik dan resolusi pada level konkret (Runesi, 2014). Honneth jauh melampaui pendahulunya mengenai proyek emansipasi dalam masyarakat, tetapi juga Honneth menempatkan Teori Kritisnya tidak terlepas dari idealisme Jerman (Kantian, dan Hegelian).

Pemikiran Honneth yang tak kalah pentingnya perbincangan terkait ihwal Teori Kritis, yaitu tentang teori pengakuan (*theory of recognition*)

atau juga kerap disebut sebagai politik pengakuan (Lubis, 2015). Jika dilihat dengan seksama karya Honneth, menunjukkan ada ruang pemisah antara pendahulunya. Perbedaan itu terletak dalam melihat masalah kemasyarakatan dilihat dalam bentuk rasionalitasnya atau dengan istilah defisit rasionalitas. Oleh para pendahulunya (baik generasi pertama maupun generasi kedua), munculnya defisit rasionalitas ini, inilah kemudian yang digambarkan oleh Horkheimer dengan istilah masyarakat yang irasional, oleh Adorno dengan istilah masyarakat yang teradministrasikan yang oleh Marcuse menyebutkan dengan istilah masyarakat satu dimensi, dan Habermas dengan istilah kolonisasi dunia kehidupan. Sementara Honneth, kendati tidak meninggalkan tradisi Teori Kritis yang bersifat kritis-emansipatoris melihat bahwa persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul saat ini (*problem society contemporary*) timbul karena persoalan etik (Lubis, 2015).

Teori Pengakuan

Dalam karya Honneth yang paling fenomenal di kalangan Teori Kritis Mazhab Frankfurt adalah tentang teori pengakuan atau yang juga disebut sebagai politik pengakuan. Buku itu berjudul: *The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflict*. Dalam buku itu, Honneth merumuskan konsep atau teori pengakuannya dengan berangkat dari pemikiran Hegel. Oleh karena itu, maka berbicara mengenai politik pengakuan Honneth di sini tidak dielakkan lagi dalam pembicaraan terkait pemikiran Hegel.

Hegel merumuskan konsep pengakuannya dengan cara melakukan sintesis terhadap berbagai ide atau teori filsafat (moral) yang berkembang pada masa ia hidup. Ide-ide atau teorinya terinspirasi dari ide Hobbes yang mengatakan bahwa manusia didorong dan dikendalikan selalu oleh keinginan untuk memperoleh kehormatan dan harga diri. Selain itu juga terinspirasi dari ide Rosseau yang berpendapat bahwa manusia kehilangan kenyamanan dan kedamaiannya yang sebelum mereka miliki di dalam kondisi alamiah (*state of nature*) sejak manusia mengenal negara. Demikian juga Hegel mendapat pengaruh dari ide Fichte yang mengungkapkan bahwa subjek dapat mencapai kebebasan hanya jika subjek di-

dorong untuk menggunakan otonomi rasional dan menganggap individu lain sebagai individu yang setara dan sama bebasnya. Dengan melakukan sintesis atas ide atau teori dari para pemikir tersebut, Hegel tiba pada kesimpulan tentang konsep kesadaran diri yang dialami melalui proses pengakuan timbal balik (Honneth dalam Lubis, 2015). Relasi antara “kesadaran diri dan pengakuan timbal balik” yang menjadi pendasaran filsafat pemikiran Hegel itu, tidaklah terjadi secara linear atau langsung. Dengan kata lain, ada yang menggerakkan dari kedua konsep tersebut. Di sinilah, Hegel menemukan sebuah ide baru, yakni perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*struggle of recognition*).

Dengan membaca ulang filsafat idealisme Hegel dalam konteks kontemporer, Honneth menunjukkan bahwa ide yang mengatakan bahwa teori sosial dan politik yang hanya didasarkan semata-mata atas premis-premis atomistic seperti yang dilakukan Hobbes bahwa manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan konsep semua melawan semua. Menurut Honneth premis-premis seperti itu tidak mampu mengeluarkan manusia pada ketergantungan rasio instrumental tanpa menyentuh ruang integrasi sebagai subjek dan agen moral. Singkatnya, Honneth mau memperkenalkan sebuah “pengakuan” subjek yang dinilai dari segi moralitasnya. Di sinilah ruang terbaru dalam Teori Kritis yang dikembangkan oleh Honneth tanpa menghilangkan identitas, yaitu emansipasi. Ruang terbaru Teori Kritis yang dikembangkan oleh Honneth adalah bentuk pembelokan dari kepentingan instrumental menuju kepentingan etis.

Dalam teori pengakuan Honneth, ia menyangkal Habermas yang mengatakan bahwa relasi sosial dalam masyarakat akan terjalin dengan sendirinya dalam ruang publik yang digambarkan sebagai masyarakat komunikatif. Dengan kata lain, subjek dapat langsung berkomunikasi dengan subjek lain tanpa adanya pengakuan diri di tengah-tengah masyarakat. Di sini, Habermasian tidak melihat subjek etis, melainkan hanya melihat subjek menuju pada bentuk rasionalitasnya yang ditandai dengan tindakan komunikatif sehingga menciptakan konsensus. Menurut Honneth, argumentasi semacam itu tidaklah kondusif dalam intersubjektif manusia,

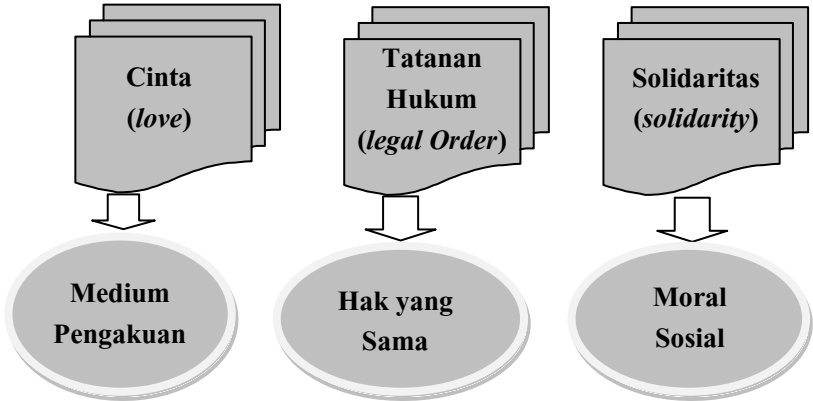
sebab kehidupan sosial itu ditandai dengan moralitas dan etis yang dimiliki setiap subjek. Karena adanya moralitas dan etis, subjek yang berhubungan akan menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan kermartabatan antar sesama subjek.

Dengan menempatkan dimensi “pengakuan” sebagai yang utama dalam menjalin relasi kehidupan sosial, Honneth mengungkapkan keyakinannya bahwa pengutamakan relasi interpersonal dibandingkan tindakan instrumental membuka kemungkinan bagi tiap pembicara yang terlibat dalam mengekspresikan diri di hadapan pasangan komunikasi mereka. Sebagai seorang pribadi dan melalui perspektif yang dimiliki ia akan terdorong untuk mengakui yang lain sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak untuk berkembang dan mengembangkan diri. Posisi Honneth di sini, dibanding Habermas yang menitikberatkan teori kritisnya pada pengembangan kapasitas argumentatif subjek, lebih menyentuh disposisi subjek berhadapan dengan subjek lain. Honneth mau menunjukkan bahwa pengakuan merupakan kondisi keharusan (*sine qua non*) bagi moralitas subjek atau agen sosial (sebagai grammar sosial) (Runesi, 2014). Dengan demikian, Honneth berangkat dari kepentingan etis melalui jalan pengakuan, sedangkan Habermas berangkat dari kepentingan rasionalitas melalui jalan komunikatif.

Dalam teori “pengakuan” atau politik pengakuan yang dirumuskan Honneth tidak serta merta bersifat linear. Untuk mencapai sebuah relasi-relasi sosial, dalam teori pengakuan memiliki tiga wilayah konseptual sehingga tercapailah pencerahan. Hal ini disebut sebagai prasyarat normatif otonomi subjek pada level pengakuan. Menurut Lubis (2015), adapun ketiga wilayah itu adalah cinta, hukum, dan solidaritas. Cinta disebut sebagai medium pengakuan, sementara hukum adalah forma yang memungkinkan terjadinya realisasi diri, sedangkan solidaritas mengandung potensi bagi perkembangan moral sosial masyarakat. Jika diabstraksikan ke dalam dunia kehidupan, maka ditemukan bahwa hidup efektif yang terlindungi dalam ruang intim (cinta), subjek dapat melihat dirinya sama dengan semua orang (hukum), dan subjek mampu melihat bahwa kontribusinya dalam hidup sosial diakui atau dihargai (solidaritas). Tiga bentuk peng-

akuan timbal balik tersebut, menjadi “infrastruktur moral” yang memungkinkan tercipta, terjadi, dan berlangsungnya interaksi sosial dimana setiap martabat dan identitas (karakter-karakter atau keunikan-keunikan) seseorang dijamin (Lubis, 2015). Untuk memudahkan kita dalam memahami teori pengakuan timbal balik Honneth akan digambarkan dibawah ini:

Gambar. 5.1. Tiga Wilayah Teori Pengakuan Honneth



Dengan mengadopsi idealisme Hegel, tiga wilayah pengakuan timbali balik tersebut dikonstruksi dalam teori pengakuan Honneth, sehingga menemukan sebuah konsep sendiri untuk mencapai sebuah emansipasi. Di sini, dapat dimaknai bahwa Honneth dengan para pendahulunya berbeda melihat perihal praksis Teori Kritis. Jika para pendahulunya melihat praksis manusia berangkat dari kepentingan rasionya atau dalam bahasa Habermas kepentingan-kognitif. Sedangkan Honneth berangkat dari kepentingan-etis yang menandakan bahwa ada perbedaan cara pandang Honneth dalam menciptakan Teori Kritis emansipatoris.

Menurut Honneth, jika subjek menginginkan kebebasan dari distorsi, maka harus memiliki tiga wilayah tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Rekonstruksi politik-etis atau politik-moral dalam Teori Kritis menjadikan Honneth sebagai generasi ketiga Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang berbeda jauh dengan pendahulunya. Kendati, Honneth berbeda dengan pendahulunya ia juga tidak terlepas dari cara pemikiran filsuf yang di pandang kritis oleh Tokoh Teori Kritis, yakni

(Kantian, Hegelian, dan Marxian).

Dalam kerangka teori pengakuan Honneth, berangkat dari kondisi masyarakat yang bersifat patologi sosial (*society pathology*). Dari sini, Honneth (Lubis, 2015) mendeskripsikan sebagai penghinaan (*disrespect*) yang dialami oleh subjek dalam kehidupannya di masyarakat. Oleh karena itu, penghinaan ini kemungkinan dapat dihindari melalui ketiga wilayah dalam teori pengakuan Honneth. Menurut Honneth ada tiga tipe penghinaan. Pertama, penghinaan fisik misalnya penyiksaan, pemerkosaan, atau bahkan pencabulan. Kedua, pengingkaran atau penyangkalan terhadap hak-hak legal subjek misalnya pengrekrutan martabat seseorang atau tidak diberikannya hak-haknya yang semestinya mereka peroleh dalam komunitas masyarakat (masyarakat/negara tertentu) seperti hak asasi manusia. Ketiga, pengrusakan terhadap nilai-nilai partikular kelompok sosial atau pengrusakan terhadap harga diri dan kepercayaan diri subjek, misalnya pelarangan kepada individu dalam menentukan jalannya sendiri (dalam hal ini kekhasan individu masing-masing) atau adanya sikap keterpaksaan subjek untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok mayoritas yang berbeda (Honneth dalam Lubis, 2015).

Membaca karya Honneth kita diarahkan untuk berpijak pada satu konseptual tentang politik etis atau politik moral. Pembelokan ini membuat Honneth menjadi generasi ketiga Teori Kritis tanpa menghilangkan cita-cita emansipasi manusia dari belenggu distorsi dalam kehidupan masyarakat. Honneth mengingatkan kita, sebuah kajian ilmu pengetahuan pada level etika dan moral. Hal ini tercermin dalam misi emansipasinya, yaitu politik pengakuan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Singkatnya, sebagai salah satu seorang yang pemikir yang kritis-emansipatoris, Honneth menempatkan fokus kajiannya pada level praksis-moral subjek. Dengan melalui jalan pengakuan memberi kemungkinan subjek atau agen dapat merdeka dari distorsi yang ada di dalam masyarakat.

Berbagai generasi Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang telah dipaparkan di atas berbeda dalam membuat kerangka teori yang bersifat emansipatoris. Meski memiliki kerangka teoritis yang berbeda, mereka semua tidak melepaskan idealisme Jerman yang dinaungi oleh tokoh-

tokoh kritis seperti Kantian, Hegelian, Marxian, dan Freudian. Dengan demikian, ada beberapa yang dapat ditarik benang merahnya, yakni:

Pertama, Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang dikembangkan dari generasi ke generasi memiliki perbedaan yang signifikan dalam melihat proses emansipatoris. Ditinjau dari segi teoritisnya dimana mereka saling mengkritik satu sama lainnya sehingga menghasilkan konseptual tersendiri. Meski memiliki perbedaan dalam konseptual, namun generasi Teori Kritis Mazhab Frankfurt tidak pernah lepas dari idealisme Jerman.

Kedua, Teori Kritis yang dihasilkan oleh masing-masing generasi melihat akar permasalahan masyarakat modern karena adanya kesenjangan struktural. Teori Kritis ingin menyingkapi struktur yang mendominasi masyarakat modern kemudian membantu masyarakat untuk memahami akar permasalahan penindasan dan ketidakadilan yang melilit mereka. Singkatnya, Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang dibangun oleh generasi ke generasi adalah teori yang bersifat emansipatoris.

Ketiga, Teori Kritis Mazhab Frankfurt memberikan peringatan kepada manusia modern mereka tengah ditindas atau didominasi oleh kesadaran palsu yang dilanggengkan oleh ideologi. Di sinilah, Teori Kritis melakukan gerakan kritikan terhadap ideologi dalam rangka menyingkapi kepentingan-kepentingan ideologi tersebut. Sehingga, Teori Kritis Mazhab Frankfurt tidak mau terjebak dalam salah satu kerangkeng ideologis, melainkan mengadakan evaluasi secara terus-menerus.

Bab 6

Penutup

A. Implikasi Teori dan Praksis

Sejak zaman Yunani kuno pengembangan ilmu pengetahuan sudah terasa, dimana diawali dengan perdebatan seputar alam semesta (masa pra-Socrates), kemudian bergulir ke arah perdebatan realitas sosial (Socrates – Plato – Aristoteles). Perihal ini mencerminkan bahwa pada masa Yunani Kuno manusia telah mengalami cara-cara berpikir dalam membaca realitas. Irama perkembangan ilmu pengetahuan pun kemudian mengalami kemerosotan di masa Abad Pertengahan karena dominasi otoritas Gereja. Berkat ajaran provokatif Luther dan Calvin berhasil menggulingkan kekuasaan Gereja, sehingga melalui semboyan “beranilah berpikir sendiri” menggeser arus utama pemikiran dari teosentrisme menuju antroposentrisme. Keberhasilan tersebut menjadi ruang bagi gerakan humanisme di masa modern yang ditandai oleh masa *Renaissance* dan *Aufklarung*. Di masa inilah para ilmuwan dengan giatnya merumuskan dan menemukan hukum-hukum keteraturan dengan menggunakan logika ilmu pengetahuan empiris-analitik sebagaimana tradisi ilmu kealaman. Di era ini pulalah perkembangan ilmu sekuler semakin meningkat dengan memosisikan logika manusia sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan kebenaran.

Perkembangan sains memiliki nilai plus tersendiri di kalangan manusia memberikan pencerahan yang sangat signifikan dengan kebutuhan manusia di kala itu. Puncaknya, ketika cara berpikir positivisme mencuat di kalangan semua ilmu pengetahuan tanpa terkecuali ilmu pengetahuan sosial itu sendiri. Paradigma positivisme, mengajarkan sebuah pandangan empiris benar-benar ada dalam keteraturan alam. Memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum alam (*nature law*) yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tidak menjadi soal karena hukum-hukum alam mendapatkan nilai tersendiri dalam hal perkembangan ilmu teknologi dan sains modern. Ilmu pengetahuan atau sains

modern telah mampu membuat manusia berada dalam kemudahan untuk segala aktivitas sehari-harinya. Apa lagi dibarengi dengan kemampuan teknologi yang begitu canggih, semua ini adalah karena ilmu pengetahuan positif. Singkatnya, positivisme memberikan penguasaan atas alam raya ini atau manusia mampu menguasai alam dengan hasil karya berupa teknologinya.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibarengi cara berpikir positivistik di satu sisi membawa kemajuan sains dan teknologi. Namun, di sisi lain paradigma ini membawa kerusakan dalam kehidupan manusia dewasa ini. Seiring perkembangannya dominasi sains dan teknologi kembali memanipulatif penciptanya sendiri. Akibatnya, manusia kembali dalam kungkungan ideologis modern sama persis yang dilakukan oleh Gerejawan. Sains dan teknologi tidak bersifat memanusiakan manusia modern, melainkan bersifat manipulatif dan merusak kehidupan manusia. Inilah yang dikatakan dalam paradigma Kritis Mazhab Frankfurt yang kerap baru timbul di kalangan pemikir idealisme Jerman. Menurut ilmuwan ini, manusia modern sangat sibuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memperhatikan akibat yang diciptakannya sendiri. Teknologi dan sains telah menggantikan posisi Gerejawan pada masa silam lalu, yakni memanipulatif kehidupan sosial kemasyarakatan dan menjadi ideologi di kalangan lini ilmu pengetahuan. Sifat keuniversalan dari paradigma sains dan teknologi yang dikembangkan cara berpikir positivisme, sangat dikecam oleh aliran paradigma Kritis Mazhab Frankfurt. Menurut mereka, dengan cara menguniversalkan paradigma berarti mengabaikan hal yang bersifat lokal.

Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt menginginkan sebuah pandangan refleksi secara terus-menerus, sehingga tidak terjadi sebuah keterjebakan ideologi dalam pendekatan segala lini ilmu pengetahuan, tanpa terkecuali ilmu pengetahuan sosial. Karena itu, sebagai ilmu tentunya pendekatan yang lahir tidak kebal terhadap kritikan sebagaimana yang dilakukan oleh paradigma Kritis Mazhab Frankfurt. Menurut Mazhab Frankfurt, ini harus didaur ulang agar supaya ilmu pengetahuan tidak mengalami zona nyaman seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan empiris-analitik yang

“membabtis” ilmu pengetahuan empiris sebagai ilmu yang paling sah dalam sejarah umat manusia. Akibatnya, mengabaikan sebuah tradisi ilmuwan yang berhaluan seni memahami tanpa terkecuali paradigma Kritis Mazhab Frankfurt sendiri.

Refleksi filosofis sejarah intelektual dari kalangan ilmuwan, mendorong terjadinya dinamika ilmu pengetahuan, sehingga peradaban manusia terus mengalami perubahan pula yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan itu, masing-masing ilmu pengetahuan memiliki cara pandang tersendiri dalam melihat dan menata masa depan manusia seperti yang dilakukan oleh paradigma Kritis Mazhab Frankfurt, dimana sekelompok ilmuwan ini mengkritisi habis-habisan ilmu pengetahuan yang berhaluan positivistik ke dalam ranah ilmu sosial. Mereka tidak ingin menggunakan epistemologi positivistik dalam menjawab tantangan umat manusia modern dan menurut mereka positivistik mandul dalam masalah praksis manusia dalam teorinya sendiri. Kemandulan itu disebabkan sains positif yang bersifat netral terhadap realitas dengan alasan mendapatkan pengetahuan yang benar-benar objektif. Mazhab Frankfurt dalam paradigmanya berusaha berada dalam ketegangan antara yang transendental dan yang empiris melalui metodologi dialektika, sehingga hasilnya adalah refleksi terhadap proyek pemikiran yang telah mapan dan menjadi alat ideologis segala lini ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, paradigma Kritis Mazhab Frankfurt sebagai paradigma pembebasan (emansipasi), maka proyek pemikirannya dialamatkan juga kepada kondisi masyarakat yang tidak dewasa atau irrasional, sehingga ada dua fokus kajian paradigma Kritis Mazhab Frankfurt. Pertama, kritik terhadap mode pemikiran (*mode of thought*) yang telah mapan dan menjadi alat ideologis di segala lini ilmu pengetahuan. Kedua, kritik terhadap masyarakat yang irrasional. Pada permulaan yang pertama, Mazhab Frankfurt merefleksikan kembali akar masalah mode pemikiran yang telah mapan, dan ditemukan akar masalahnya adalah rasio melulu menjadi alat belaka atau istilah yang kerap dikenal rasio instrumental. Sedangkan pada yang kedua, Mazhab Frankfurt memfokuskan pada masyarakat yang tidak rasional lagi atau irrasional, seperti pada masyarakat yang penuh dengan

manipulatif dan paksaan sistem, dan menginginkan situasi dan kondisi itu harus dibebaskan (emansipatoris).

Hadirnya paradigma Kritis Mazhab Frankfurt membantu kita dalam memperjelas bahwa implikasi sains dan teknologi dalam dunia sosial menyebabkan lahirnya bentuk patologi sosial dan penyimpangan. Dengan pisau analitis paradigma Kritis Mazhab Frankfurt telah membuka ruang terbaru dalam kajian bidang sosial kemasyarakatan. Dominasi pengetahuan empirik-analitik telah membawa pemahaman manusia bahwa satu-satunya ilmu pengetahuan yang paling sah. Akibatnya, membungkam pengetahuan yang lainnya termasuk ilmu kemanusiaan. Sedangkan lewat pengetahuan historik-hermeneutik, Mazhab Frankfurt menunjukkan dimensi praksis hidup manusia yang sesungguhnya tidak sekadar apa yang nampak, apa yang fisik, karena hidup meliputi juga dunia pemaknaan, interpretasi. Dalam konteks itu, maka paradigma Kritis Mazhab Frankfurt mengusulkan bentuk interpretasi dengan metode hermeneutika-dialektis atau hermeneutika-kritis. Generasi kedua (Habermas) mengusulkan bentuk pengetahuan emansipatoris yang memainkan peran dalam bentuk reflektif, membongkar kedok segala bentuk hubungan yang berbau membeku, ia juga sekaligus membebaskan masyarakat dari segala bentuk ideologi yang eksploitatif dan terdistorsi.

Dengan demikian, ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dalam membaca paradigma Kritis Mazhab Frankfurt, yakni: pertama, Mazhab Frankfurt menginginkan kepada masyarakat agar menumbuhkan jiwa kritis supaya tidak dimanipulatif lagi. Kedua, menginginkan masyarakat dalam kondisi yang lebih baik lagi atau ideal. Ketiga, menumbuhkan jiwa kritis, bukan berarti menjungkir balikkan sistem dengan cara tindakan kekerasan, sebab dengan cara itu sama seperti mengembalikan kekuasaan yang baru. Keempat, dengan jiwa kritis, kita dapat merefleksikan kembali akar permasalahan yang kita hadapi dan orang lain, karena kritis berarti mengevaluasi kesalahan sendiri. Kelima, dengan refleksi seseorang tidak mudah terjebak pada situasi dan kondisi atau tradisi yang menurut mereka paling baik melainkan terjadi evaluasi tradisi secara terus-menerus.

B. Implikasi Metodologis

Membaca paradigma Kritis Mazhab Frankfurt yang “berbau” pembebasan (emansipatoris) tentunya saja memerlukan kajian yang sangat mendalam. Jadi, dalam tulisan ini belum menjelaskan secara komprehensif dan masih dangkal. Tetapi, setidaknya-tidaknya memberikan pemahaman yang memadai bahwa pengetahuan sosial dan pengetahuan alam sangat jauh berbeda dalam kajian paradigmatis. Hal ini, ditandai dengan bentuk epistemologi dan aksiologi kajian masing-masing ilmu itu. Ilmu sosial kemanusiaan seperti sosiologi sebagaimana yang dikatakan oleh Berger bahwa bukan seperangkat doktrin melainkan sebuah ilmu pengetahuan, maka dari itu ilmu kemanusiaan tidak kebal terhadap penelanjangan dalam konteks paradigmatis. Dengan pengetahuan paradigma Kritis, maka segala bentuk doktrin mungkin akan didaur ulang dan mungkin bisa saja ditinggalkan sama sekali.

Paradigma Kritis Mazhab Frankfurt yang berhaluan paradigma pembebasan boleh jadi bukan satu-satunya pengetahuan yang paling sah dalam hal emansipatoris. Tentunya, masih banyak yang perlu dibaca dan dievaluasi dalam kajian paradigmatisnya. Tetapi, paling tidak epistemologi yang telah jelaskan oleh paradigma Mazhab Frankfurt telah membuka ruang pembebasan atau kesadaran apalagi paradigmanya melampaui paradigma yang maksudkan oleh Marxisme yang bertolak pada argumentasi kekerasan harus dilawan dengan kekerasan. Padahal Mazhab Frankfurt sangat mengecam bentuk tindakan kekerasan tersebut. Berbeda dengan Marxisme, Mazhab Frankfurt melalui paradigmatisnya mencita-citakan bentuk masyarakat yang ideal. Sebagaimana Habermas (generasi kedua) yang menginginkan masyarakat bebas dari paksaan, sehingga menumbuhkan manusia dalam ruang komunikasi bebas paksaan. Hal demikian, banyak kritikan yang dialamatkan kepada paradigma pembebasan melalui jalan komunikasi bebas paksaan berhubung sangat bersifat utopis. Akan tetapi, dengan dua paradigma yang telah diperkenalkan, yakni paradigma kerja dan komunikasi telah menyinggung sifat dasar manusia dan ini membawa ruang yang bagus dalam eksploitasi ilmu sosial kemanusiaan.

Dengan demikian, Mazhab Frankfurt dengan paradigma hermeneutika dialektis atau hermeneutika kritis memberikan peluang kepada ilmuwan selanjutnya untuk terus mengeksplorasi pengetahuan sosial kemanusiaan yang bersifat lebih hidup dibandingkan paradigma yang berbau positivistik. Dengan wilayah pemikiran itu, sangat menarik untuk dikaji dan dieksplorasi, memungkinkan akan lahirnya pengetahuan yang baru dalam kajian ilmu sosial kemanusiaan kedepannya. Terlebih lagi para ilmuwan Mazhab Frankfurt memiliki generasi-generasi yang terus mengembangkan ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan dalam kanca pemikiran filsafat, sosial, politik, agama dan ekonomi sangat baik untuk disimak. Perihal yang perlu diketahui bahwa paradigma Kritis Mazhab Frankfurt masih terus dikembangkan sepanjang berbicara tentang metodologi ilmu sosial kemanusiaan. Apalagi tokoh-tokohnya sekaliber Habermas pernah mengatakan bahwa Teori Kritis adalah proyek pemikiran yang belum selesai (*unfinished project*). Argumentasi semacam ini memberikan pemahaman bahwa produk emansipatoris paradigma Kritis Mazhab Frankfurt bukanlah satu satunya proyek yang paling ampuh dalam hal emansipatoris.

Daftar Pustaka

- Achmadi, Asmoro. 2011. *Filsafat Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arviani, Heidy. 2013. Budaya Global Dalam Industri Budaya: Tinjauan Madzhab Frankfurt Terhadap Iklan, Pop Culture, dan Industri Hiburan. *Global & policy*. Vol.1. No.2.
- Bagir, Haidar. 2017. *Epistemologi Tasawuf, Sebuah Pengantar*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Bertens, K. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris – Jerman*. Jakarta: Gramedia.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. London: University of California Press.
- Darmaji, Agus. 2013. Herbert Marcuse Tentang Masyarakat Satu Dimensi. *Ilmu Usuluddin*. Vol. 1. No.6.
- Edkins, Jenny & Williams, Vaughan, Nick. 2013. *Teori-Teori Kritis, Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guba, E.G. dan Lincoln, Y.S. 1994. “Competing Paradigm in Qualitative Research”, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln (Eds.) *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Habermas, Jurgen. 1971. *Knowledge and Human Interests*. Boston: Beacon Press.
- Hardiman, Budi F. 2009. *Kritik Ideologi, Menyingkapi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- _____. 2011. *Pemikir-Pemikir yang Membentuk Dunia Modern*. Jakarta: Erlangga.

- Hasbiansyah, O. 2008. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator*. Vol. 9, No.1.
- Iwan. 2014. Menelaah Teori Kritis Jurgen Habermas. *Jurnal Edueksos*. Vol. III. No 2.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuhn, Thomas S. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Lubis, Yusuf, Akhyar. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maksum, Ali. 2016. *Pengantar Filsafat: dari Masa Klasik hingga Postmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- McCarty, Thomas. 2006. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Mulyatno, CB. 2013. Demokrasi Sosial Menurut Herbert Marcuse. *Jurnal Filsafat*. Vol.2. No.2.
- Poejawijatna, I.R. 1994. *Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poloma, Margaret M. 2013. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George. 2014. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern, edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Runesi T, Yasintus. 2014. Pengakuan Sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth. *Melintas*. 30. 3.
- Shadr, Baqir. 2013. *Falsafatuna*. Yogyakarta: RausynFikr Institute.
- Sindhunata. 1983. *Dilema Usaha Manusia Rasional*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suaedi. 2016. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bogor: IPB Press.
- Sumarna, Cecep. 2006. *Filsafat Ilmu dari Hakikat Menuju Nilai*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Sunarto. 2003. “Konstruksi Pemikiran Max Horkheimer: Kritik atas Masyarakat Modern” dalam Santoso, Listiyono, dkk. 2003. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Supraja, Muhammad. 2017. *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surajiyo. 2005. *Ilmu filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tafsir, Ahmad. 2016. *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik Ke Filosofi Post Positivistik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Indeks

A

Antroposentrisme 8, 11, 15.
Aufklärung 8, 11, 12, 15, 134.
Axiology 14, 78, 88, 89, 90.

C

Cogito ergo sum 13, 34,

E

Emansipasi 9, 35, 37, 62, 63, 64,
68, 70, 73, 78, 85, 87, 90, 105, 106,
107, 109, 113, 115, 119, 123, 124,
125, 127.
Epistemology 14, 78, 82, 90.
Erklaren 35, 71, 74, 81.

F

Fenomenologis 20, 29, 31, 32, 37.

M

Mode of thought 70, 74, 80, 81,
118, 119, 125.

N

Nature law 13, 16, 25, 26, 35, 117,
134.

O

Ontology 78, 90.

P

Praxis 19, 37, 62, 63, 64, 67, 70,
71, 73, 74, 75, 78, 80, 86, 90, 107,
115.

R

Refleksi-diri 71, 72, 85, 86, 87, 88,
113, 114, 118,
Renaissance 8, 9, 12, 114, 134.

S

Status quo 36, 69, 80, 87, 101, 105,

T

Teologis 22, 23, 85.

V

Value free 36, 44, 89,
Verstehen 17, 35, 49, 50, 51, 54,
58, 59, 118, 120

Tentang Penulis



Ambo Upe lahir pada tanggal 8 Februari 1983 dari pasangan H. Sultan dengan Hj. Jintang. Dalam bidang pendidikan, penulis secara konsisten menekuni bidang ilmu Sosiologi sejak S1 hingga S3. Pada tahun 2006, penulis menyelesaikan sarjana pada program studi sosiologi di Universitas Haluoleo dengan predikat lulusan terbaik. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi pada program studi sosiologi PPs Universitas Hasanuddin dan berhasil mempertahankan predikat lulusan terbaik pada tahun 2008. Setelah mengabdikan diri di Universitas Halu Oleo selama 4 tahun, penulis kemudian melanjutkan studi doctoral dalam bidang ilmu sosiologi di PPs Universitas Negeri Makassar dan kembali mempertahankan predikat lulusan terbaik pada tahun 2016.

Dosen tetap Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo ini telah menulis beberapa buku antara lain: *Sosiologi Politik Kontemporer* (Prestasi Pustaka, 2008); *Azas-Azas Multiple Researches: dari Denzin hingga John Creswell dan Penerapannya* (Tiara Wacana, 2009); *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik* (RajaGrafindo Persada, 2010); *Metode Penelitian Sosial: Filosofi dan Desain Praktis* (Literacy Institute, 2016); *Pengantar Statistika Sosial: Suatu Pengenalan Statistika Modern* (Literacy Institute, 2017); dan *Tambang dan Perlawanan Rakyat* (RajaGrafindo Persada, 2018).

Sejak tahun 2016, pemimpin redaksi jurnal *Neo Societal* ini telah menyunting belasan naskah buku antara lain: *Teori Organisasi dalam Sektor Publik* (Ganding Pustaka, 2016); *Outsourcing: Menyingkap Relasi Hegemonik dalam Praktik Ketenagakerjaan* (Oase Pustaka, 2016); *Formasi Sosial Pemulung: Potret Keterbelakangan dalam Pembangunan* (Oase Pustaka, 2016); *Sosiologi Kesehatan: Kajian Perubahan Sosial atas Penerimaan Metode Vasektomi* (Oase Pustaka, 2016); *Sosiologi Kese-*

hatan: Teori dan Aplikasi dalam Penelitian Perilaku Merokok Lima Keluarga Miskin di Perkotaan (Oase Pustaka, 2016); *Politik Lokal: Peran Tokoh Adat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah* (Kekata Publisher, 2016); *Atmosfer Politik: Relasi Penguasa dan Pengusaha dalam Pembangunan di Indonesia* (Literacy Institute, 2017); *Habitus, Modal dan Kelembagaan Pembudidaya Rumput Laut dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir* (Depublish, 2017); dan *Politisi Toraja di Panggung Politik Lokal* (Literacy Institute, 2018).

Dalam keseharian di kampus, penulis mengampu mata kuliah: Filsafat Sosial, Teori Sosiologi Klasik, Teori Sosiologi Modern, Teori Sosiologi Kritik & Postmodern, Metode Penelitian Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Riset Pembebasan, dan Pengantar Statistika Sosial. Selain melalui proses perkuliahan, proses pembelajaran juga dilakukan oleh penulis melalui Forum Diskusi Mungguan yang diikuti oleh sejumlah mahasiswa di beberapa angkatan, dan sesungguhnya dari sanalah buku ini diracik bersama Saudara Abdul Wahid yang ketika itu masih mahasiswa.



Abd. Wahid, adalah alumni pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Lahir di Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara pada tanggal 3 Juli 1996. Menyelesaikan pendidikan sarjana S1 Jurusan Sosiologi FISIP UHO pada tahun 2019. Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berorganisasi baik dalam lingkup kampus maupun di luar kampus. Di dalam kampus, penulis menduduki jabatan sebagai koordinator bidang kajian sosiologi di dalam organisasi HMJ-Sosiologi FISIP UHO pada tahun 2017. Sedangkan di luar kampus menduduki jabatan sebagai sekretaris dalam organisasi ruang lingkup Kecamatan, yakni organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Laeya (IPPMAL). Sebagai

Koordinator Bidang Kajian Sosiologi, penulis mendirikan Forum Diskusi Mingguan bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya yang difasilitasi oleh salah seorang dosen sosiologi yang juga merupakan penulis buku ini. Semasa Kuliah, penulis aktif dalam diskusi dengan dosen dan rekan mahasiswa lainnya dalam kajian bidang paradigma dan teori-teori sosiologi. Penulis memiliki minat dalam membaca buku-buku teori-teori sosiologi, paradigma sosiologi, dan buku-buku filsafat sosial. Tidak heran bahwa buku yang ada di tangan pembaca adalah hasil dari forum diskusi mingguan yang telah dipadatkan melalui beberapa referensi sosiologi. Sebelum menulis buku ini, penulis juga telah melahirkan karya ilmiah berupa jurnal dengan judul Rasionalitas Pergeseran Generasi Masyarakat Tani yang merupakan hasil penelitian skripsi penulis.
